

## Lampiran 3.5.:

## PENINGKATAN PENYANTUNAN KAUM DHUAFA

BAB I  
PENDAHULUAN

Sudah sangat dikenal bahwa KHA. Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah melalui pengajiannya merealisasikan pelaksanaan perintah sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Ma'un. Bertolak pengamalan inilah kemudian Muhammadiyah berkembang dan menugaskan Majelis Pertolongan Kesengsaraan Oemoem (MPKO) yang kemudian berkembang menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) dengan segala aspeknya.

Pada saat ini gerakan yang dirintis oleh Muhammadiyah telah menjadi budaya di ummat Islam di Indonesia (tidak terbatas dalam lingkungan Muhammadiyah saja), antara lain pengumpulan zakat fitrah maupun zakat mal oleh amil yang kemudian dibagikan kepada yang berhak; pendirian Panti Asuhan-Panti Asuhan di lingkungan ummat Islam dan sebagainya.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu diberikan perhatian yang tinggi dalam pembangunan bangsa, dan tidak jarang masalah kemiskinan dijadikan alasan untuk melontarkan kritik terhadap Pemerintah karena tidak mampu menanganinya secara tuntas. Di negara-negara maju perdebatan untuk meningkatkan jumlah bantuan social untuk menolong kelompok miskin, memberi indikasi bahwa masalah kemiskinan ini tidak hanya ada di negara-negara berkembang saja tetapi ada di negara-negara yang telah maju. Bahwa adanya penduduk miskin di suatu negara merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

Para ahli ekonomi menamakan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dengan istilah 'lingkaran kemiskinan' (*vicious circles*). Lingkaran kemiskinan ini merupakan rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, sedemikian rupa keadaan yang menyebabkan masyarakat tetap miskin dan bahkan akan mengalami banyak kesukaran untuk dapat lolos dari kemiskinan tersebut. Pembangunan di bidang sosial tak kalah pentingnya dibanding dengan ekonomi, bahkan keduanya perlu berjalan sejajar. Tercapainya kesejahteraan sosial akan terpengaruh positif bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dari pengertian tersebut di atas, tersirat bahwa tingkat kesejahteraan tertentu dari individu maupun kelompok dapat tercapai bila kebutuhan dasarnya baik lahiriyah (sandang, pangan, papan) maupun batiniyah (keamanan, keberagamaan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya). Dalam kaitan dengan masalah tersebut, Muhammadiyah telah sejak awal berdirinya melakukan berbagai macam kegiatan dan telah berkembang hampir di seluruh pelosok tanah air.

Pada kesempatan Muktamar di mana program dievaluasi dan dirumuskan program baru, maka Program Penanganan Kaum Dhu'afa perlu mendapatkan prioritas utama.

## BAB II

### LANDASAN HUKUM FORMAL (UUD 45) TENTANG PENANGGULANGAN KAUM DHU'AFA

Dalam Pembukaan UUD 45 dikemukakan dengan tegas cita-cita rakyat Indonesia mengenai negara Indonesia, yang dengan kata-kata “Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Itulah maksud rakyat Indonesia untuk membentuk negara guna mencapai lima hal: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendapatkan tujuan itu kita telah mempergunakan waktu hampir 45 tahun, sedang untuk mencapai Indonesia yang adil kita masih memerlukan waktu paling kurang 25 – 30 tahun lagi.

Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia yang merdeka telah kita rebut dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kita menganut ajaran: “... jika pemerintahan baru sanggup mempertahankan undang-undang dasar baru dengan cara yang efektif, maka pemerintahan itu dan undang-undang dasar itu adalah menurut hukum internasional, pemerintahan yang sah dan undang-undang dasar yang berlaku bagi negara itu. Oleh karena itu UUD 1945 dalam periode 1945-1949 menurut kita adalah UUD Republik Indonesia yang merdeka.

Dengan selesainya peristiwa-peristiwa Darul Islam di Jawa Barat, gerakan pemisahan diri dari Republik Indonesia Maluku, Darul Islam di Sulawesi Selatan, pemberontakan Aceh, pemberontakan PRRI di Sumatera dan Sulawesi Utara dan terintegrasinya Irian Barat ke Ibu Pertiwi, Republik Indonesia yang bersatu sebagai yang dicita-citakan oleh Bapak-bapak Kemerdekaan kita dalam Panitia Penyelidik dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah tercapai.

Dengan pengakuan kedaulatan negara kita oleh negara-negara Arab pada tahun 1947 dan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, kemudian oleh sebagian besar negara-negara lain setelah itu, Indonesia yang berdaulat telah diakui hampir semua negara-negara berdaulat di muka bumi ini.

Ketiga-tiga pembangunan nasional yang berintikan politik, yaitu mengenai Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, telah kita capai dalam kurun waktu 1945 – 1947 di bawah kepresidenan Ir. Soekarno.

Dalam usaha pembangunan nasional yang berintikan ekonomi dari hasil kepresidenan Jenderal Soeharto dalam kurun waktu 1967 – 1993, insya Allah cita-cita rakyat Indonesia mengenai Indonesia yang makmur telah ditetapkan landasan dan asas-asasnya. Menurut data yang ada sejak 1976 sampai 1987 jumlah dan prosentase penduduk miskin semakin mengecil (berkurang). Distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia semakin baik, ketimpangan semakin berkurang. Bahkan menurut statistik Food and Agricultural Organization (FAO), pertumbuhan Indonesia dalam per kapita produksi padi-padian antara 1974/5 dan 1984/5 adalah tertinggi kedua di Asia sesudah Burma (Myanmar). Dalam bulan Nopember 1985, Presiden Soeharto telah diundang untuk berbicara di depan Konperensi 40 tahun Peringatan FAO di Roma sebagai wakil negara-negara berkembang. Undangan itu adalah pengakuan hasil-hasil Indonesia yang monumental di bidang pertanian.

Pada waktu ini pakar-pakar sedang mempersiapkan pola umum pembangunan jangka panjang yang meliputi waktu 25 tahun mendatang. Dalam salah satu pertemuan-pertemuan itu, saya mengusulkan: “Jika cita-cita rakyat Indonesia mengenai negara Indonesia yang telah dikemukakan oleh Pembukaan UUD 1945 itu tetap menjadi pegangan dan pedoman kita, maka cita-cita negara Indonesia yang adil, tidak dapat tidak harus

menjadi inti dari pola umum pembangunan nasional kita dalam jangka panjang yang akan datang”.

Oleh karena untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil tidak cukup dengan penempatan kata-kata “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dalam UUD saja, tetapi memerlukan penjabaran dalam hukum dan perundang-undangan sesuai dengan prinsip Negara Hukum Pancasila. Untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil, ukuran dan nilai yang harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum, maka untuk itu. Tepatlah bila pembangunan nasional 25 tahun setelah 1993 itu adalah berintikan hukum untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak berdiri pada tahun 1912 Muhammadiyah telah bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pembinaan kesejahteraan ummat. Oleh karena secara nasional dan mondial masalah kesenjangan social merupakan persoalan yang harus diatasi sebelum api memercik, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1989 di Lhokseumawe memutuskan Pembinaan dan Penyantunan Kaum Dhu’afa sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan “kaum dhu’afa” adalah kaum lemah, fakir-miskin yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mampu kerja karena lanjut usia, cacat mental dan fisik yang memerlukan santunan secara terus-menerus. Secara khusus, pengertian “dhu’afa” juga mencakup kaum yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak sehingga memerlukan bantuan modal, pendidikan ketrampilan, manajemen dan teknologi untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya (dhu’afa struktural).
2. Pembinaan kaum dhu’afa yang selama ini telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah perlu ditingkatkan dan diintensifkan yang ditujukan kepada prinsip “memberi kail, bukan memberi ikan” terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dengan mengusahakan factor-faktor produksi yang terdiri dari: (a) lahan, (b) modal, (c) manajemen, dan (d) teknologi.

#### **Ad. a. Lahan**

1. Perlu diusahakan agar lahan dapat tetap dimiliki dalam luasan yang memadai untuk kaum dhu’afa.
2. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah perlu mendapatkan hak penggunaan lahan untuk usaha-usaha pertanian dan perkebunan.

#### **Ad. b. Modal**

1. Penumpukan modal dilakukan dengan melakukan pengeralahan dana, pengelolaan dana dan pengendalian dana. Pengerahan dilaksanakan dengan menggiatkan penarikan zakat maal, zakat profesi, infaq, basis Muhammadiyah Pusat, Wilayah dan Daerah-Daerah.
2. Pengelolaan modal perlu dilakukan dengan pengendalian yang efektif dan efisien dengan mengembangkan lembaga-lembaga pengelolaan dana secara modern.
3. Untuk memantapkan pembentukan Bank Perkreditan Rakyat, diharapkan dari Majelis Tarjih, agar masalah bunga Bank yang masih menggantung persoalannya, kiranya mendapat penyelesaian kajian dan kesimpulan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

**Ad. c. Managemen**

Pimpinan Muhammadiyah perlu mengembangkan dan memperbanyak kursus-kursus ketrampilan manajemen bagi pengusaha kecil, dan menyebarluaskan kepada kaum dhu'afa.

Diperlukan upaya yang lebih efektif untuk memajukan pemasaran hasil-hasil produksi dan juga pemasaran yang dilaksanakan oleh kaum dhu'afa.

**Ad. d. Teknologi**

Pimpinan Muhammadiyah perlu mengusahakan teknologi pertanian, pengembangan industri pedesaan dengan bekerja sama dengan balai-balai penelitian dan penyuluhan, baik pemerintah maupun swasta.

**BAB III**  
**PROFIL KEMISKINAN DAN**  
**DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA**  
*(Sumber: BPS, No. Publikasi 03310, 8906 tahun 1989)*

**1. Trend Tingkat Kemiskinan 1976 – 1987**

Di daerah kota, besarnya pendaptan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp. 4.522,00 perkapita pada tahun 1976, sedang pada tahun 1987 adalah Rp.17.381,00. Ini berarti apabila suatu rumah tangga mempunyai 3 orang anak, maka untuk mampu menghidupi rumah tangga tersebut dengan total anggota rumah tangga 5 orang harus mempunyai rata-rata pendapatan setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.22.610,00 pada tahun 1976 dan sekitar Rp.86.905,00 pada tahun 1987.

Di daerah pedesaan, pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah kota, yaitu sekitar Rp.2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp.10.294,00 pada tahun 1987, atau sekitar Rp.14.245,00 dan Rp.51.470,00 untuk setiap rumah tangga dengan anggota 5 anak pada periode tersebut di atas.

Hal ini dapat difahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah kota mempunyai kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pula pola pengeluaran. Batas garis kemiskinan antara daerah kota dan pedesaan pada kurun waktu 1976 – 1987 dapat dilihat pada tabel 1 di belakang.

**2. Perkembangan Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin**

Jumlah prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dewasa ini telah cukup jauh di bawah tingkat kemiskinan tahun 1976 (lihat table 3.2. di belakang). Kecenderungan ini terutama terjadi di daerah pedesaan. Pada tahun 1976 terdapat sekitar 54,2 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau 40,08% dari seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurun dengan cepat, hingga pada tahun 1987 tinggal 30,00 juta atau 17,42% dari seluruh penduduk Indonesia.

**3. Trend Beberapa Indikator Kesejahteraan Rakyat**

**a. Indikator persediaan kalori dan protein.** Keadaan gizi merupakan indikator utama yang digunakan dalam menggambarkan taraf hidup penduduk. Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu tujuan penting dalam upaya peningkatan mutu hidup penduduk (lihat tabel 4.1. di belakang).

- b. Indikator kondisi kesehatan.** Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok/ dasar karena kesehatan yang baik akan dapat memberikan kehidupan yang baik dan lebih produktif. Selain itu kesehatan dapat juga dipakai sebagai ukuran kesejahteraan seseorang, sedang keadaan sanitasi dan lingkungan yang baik akan dapat mengurangi berjangkitnya penyakit menular dan dapat meningkatkan mutu hidup manusia.

Indikator yang digunakan dalam menggambarkan kesehatan adalah prosentase penduduk yang sakit, prosentase angka kematian bayi dan angka harapan hidup, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga dokter dan paramedic dibanding jumlah penduduk, juga termasuk indikator penentu kesehatan (lihat tabel 4.3. di belakang).

- c. Indikator kondisi pendidikan.** Pendidikan dipandang sangat vital sebagai indikator kesejahteraan rakyat, dan bahkan dijadikan indikator yang dapat digunakan menggambarkan keadaan pendidikan adalah jumlah penduduk usia sekolah (7 – 24 th.) yang tidak atau belum pernah sekolah, tingkat putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, rasio perbandingan jumlah murid dengan guru, tingkat melek huruf, dan sebagainya (lihat tabel 4.9, di belakang).

Sekolah Dasar yang berusia 7 – 12 tahun sudah mencapai 97,2 persen dari 23.809 ribu penduduk usia tersebut. Keadaan tersebut terus membaik hingga mencapai 99,6 persen dari 24.694,7 ribu penduduk pada tahun 1985/1986, dan sedikit menurun pada tahun berikutnya yaitu 99,4 persen dari 25.149,7 ribu penduduk. Program Wajib Belajar usia 7 – 12 tahun yang dilakukan pemerintah tampak berhasil walaupun belum maksimal. Tingkat partisipasi Sekolah Menengah (SMTP), selama periode 1983/1984 – 1986/1987 terus membaik walaupun belum begitu besar karena masih adanya lulusan SD yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi (SMTP) (lihat tabel 4.10 di belakang).

Hal lain yang berhubungan dengan masalah pendidikan selain tingkat partisipasi adalah masalah mutu. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah rasio murid-guru.

Rasio murid-guru pada sekolah dasar selama tahun 1983/1984 – 1986/1987, semakin menurun dari tahun ke tahun (lihat table 5.11. di belakang). Hal ini dapat menunjukkan suatu kenaikan mutu pendidikan sekolah dasar karena guru akan dapat lebih memberi perhatian yang cukup terhadap anak didiknya. Pada sekolah menengah tingkat pertama rasio murid-guru walaupun menurut tetapi tidak secepat yang terjadi pada sekolah dasar.

Dalam pendidikan selain masalah perkembangan yang begitu pesat juga terdapat masalah putus sekolah. Banyak alasan yang menyebabkan penduduk tidak dapat melanjutkan sekolahnya, antara lain biaya sekolah, jauhnya letak gedung sekolah dari tempat tinggal ataupun alasan karena merasa tidak perlu lagi melanjutkan sekolah dan sebagainya. Selama 1983/1984 – 1985/1986, angka putus sekolah dasar berhasil diturunkan, sedangkan pada tingkat smtp umum angka tersebut tetap sebesar 4,3 persen bahkan untuk tingkat smtp kejuruan angka tersebut meningkat dari 4,3 persen menjadi 4,4 persen (lihat table 4.12. di belakang).

Gambaran umum tingkat kecerdasan masyarakat dapat ditunjukkan dengan tingkat melek huruf. Menurut hasil survey Penduduk Antar Sensus 1985, 80,9 persen dari penduduk berumur 10 tahun ke atas melek huruf (lihat table 4.13. di belakang).

Dibandingkan tahun 1980 (Sensus Penduduk 1980) terjadi kemajuan dalam 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 1980 tingkat melek huruf sebesar 71,2 persen. Kenaikan ini terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan walaupun data yang ada menunjukkan bahwa tingkat melek huruf di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan.

#### BAB IV LANDASAN/PENGERTIAN DHU'AFA MENURUT AL-QUR'AN DAN SUNNAH RASUL

1. Islam mengajarkan agar ummatnya menjadi ummat yang kuat.  
Rasulullah saw. bersabda:

*"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah ..."* (H. R. Muslim dari Abu Hurairah ra.)

Dimaksud dengan orang mukmin yang kuat adalah orang mukmin yang kuat fisik, mental spiritual, ilmu, ekonomi dsb., baik perorangan maupun kelompok.

2. Kemiskinan yang mengakibatkan kelaparan merupakan salah satu segi kelemahan yang wajib diatasi. Rasulullah saw. berdo'a:

*"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruk teman tidur, dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat, karena ia adalah seburuk-buruk budi pekerti"*. (H. R. Abu Dawud dari Abu Hurairah ra dengan sanad yang shahih).

3. Hidup dengan petunjuk Allah, ketaqwaan, menjunjung tinggi harga diri dan kecukupan keperluan hidup merupakan unsur-unsur kekuatan yang harus selalu diusahakan. Rasulullah saw. berdo'a:

*"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu petunjuk, taqwa, pandai memelihara harga diri dan hidup berkecukupan"* (H. R. Muslim dari Ibnu Mas'ud ra.)

4. Kecukupan keperluan hidup merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri. Al-Qur'an menyebutkan nikmat kecukupan yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad saw.:

*"Dan Dia mendapatimu berkekurangan, kemudian Dia memberikan kecukupan"* (Q. S. Adh-Dhuha: 7).

5. Kemiskinan mudah menarik orang kepada kekafiran. Rasulullah saw. berdo'a:

*"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran dan kekafiran"*.  
(H. R. Nasa'I dan Ibnu Hibban dari Abi Sa'id ra.)

6. Kemiskinan mudah menarik kepada perangai rendah. Rasulullah saw. bersabda:

*"Sesungguhnya orang apabila menanggung beban utang jika berkata berjasta dan apabila berjanji berkhianat"* (H. R. Bukhari dari Aisyah ra.)

7. Kemiskinan mengurangi kemampuan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengajarkan agar orang yang belum berkemampuan memikul beban biaya rumah tangga agar bersabar dan tetap



memelihara kesucian diri, hingga Allah memberikan kecukupan. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

*"Orang-orang yang memperoleh beaya hidup berkeluarga hendaklah memelihara kesucian dirinya (dan bersabar), hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya dari anugerah-Nya." (Q. S. An-Nur: 33).*

8. Kemiskinan mudah menarik kepada kriminalitas yang merugikan masyarakat. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra. Yang menceritakan seorang sahabat bersedekah, tetapi ternyata sedekahnya diberikan kepada seorang pencuri. Merasa salah alamat, iapun bersedekah lagi. Ternyata sedekah yang kedua kalinya itu diberikan kepada perempuan pezina (pelacur). Merasa salah alamat, iapun bersedekah yang ketiga kalinya. Ternyata sedekah ini diberikan kepada orang kaya tetapi kikir. Orang yang bersedekah itupun merasa tidak tepat, yang menerima bukan yang dikehendaki atau bukan yang semestinya menerima. Tetapi dalam tidurnya ia merasa didatangi seseorang yang mengatakan:

*"Sedekahmu kepada pencuri mudah-mudahan akan menyadarkannya untuk menghentikan mencuri, sedekahmu kepada perempuan pezina mudah-mudahan akan menyadarkannya berhenti berzina, dan sedekahmu kepada orang kaya mudah-mudahan menjadi pelajaran baginya untuk mau menyedekahkan sebagian kekayaannya yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya."*

9. Untuk memperoleh kecukupan keperluan hidup, Islam mendorong semangat kerja dan usaha. Allah berfirman:

*"Dialah yang telah menjadikan bumi untukmu dan mudah kamu jalani; maka berjalanlah di berbagai penjurunya dan makanlah rizki Allah: (Q. S. Al-Mulk: 15)*

Rasulullah saw. bersabda:

*"Tidak makan seseorang makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Allah Dawud as. makan dari hasil kerjanya sendiri." (H. R. Bukhari dari Miqdam bin Ma'di Karib ra.)*

Rasulullah saw. bersabda:

*"Sungguh jika kamu mencari kayu, kemudian diikat dan dibawa di atas punggungnya (kemudian dijual untuk mencukupi keperluan hidupnya) adalah lebih baik bagimu daripada kamu minta-minta kepada orang lain yang mungkin diberi atau ditolak." (H. R. Bukhari dari Abu Hurairah ra.)*

10. Islam mengakui perbedaan perolehan, ada yang berkesempatan memperoleh lebih, ada yang memperoleh pas dan ada yang memperoleh kurang dari keperluan nafkah hidupnya.

Dalam hubungan ini Allah berfirman:

*"Kami telah membagi penghidupan mereka di dunia dan Kami telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain." (Q. S. Az-Zukhruf: 32).*

11. Perbedaan kaya miskin diakui adanya, namun dalam kehidupan bermasyarakat harus diwujudkan solidaritas sosial, hidup saling bertolong-tolongan, saling membantu untuk terpenuhi keperluan hidupnya.

Islam menanamkan rasa wajib saling mencintai antar sesama muslim. Rasulullah saw. mengajarkan:

*“Tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.”* (H. R. Bukhari dari Anas ra.).

Rasulullah saw. mengajarkan juga:

*“Orang mukmin bagi orang mukmin lain ibarat tembok/bangunan, yang sebagian menguatkan yang sebagian lainnya.”* (H. R. Bukhari-Muslim dari Abu Musa ra.).

Rasulullah saw. mengajarkan juga:

*“Kau menyaksikan orang-orang mukmin hubungan saling mengasihani, saling menyayangi dan saling lemah lembut ibarat satu badan, jika ia mengadakan anggotanya yang sakit, maka seluruh badan akan membantu dengan berjaga tidak tidur dan merasakan panas.”* (H. R. Bukhari dari Nu'man bin Basyir ra.)

Dalam bentuk yang umum Al-Qur'an mengajarkan:

*“Bertolong-tolonganlah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (Q. S. Al-Maidah: 2).

12. Islam mengajarkan bahwa Allah membagi rizki kepada umat manusia berlebih kurang (Q. S. An-Nahl: 71). Harta yang diperoleh oleh yang mendapat rizki lebih terkait dengan hak orang-orang yang memperoleh rizki kurang (Q. S. Adz-Dzariyat: 19). Untuk menunaikan hak orang-orang yang mendapat rizki kurang itu Allah memerintahkan untuk membelanjakan harta Allah yang dikuasakan kepada umat manusia (Q. S. Al-Hadid 7). Kepada budak-budak yang akan memerdekakan diri dengan membayar tebusan kepada tuannya, Allah memerintahkan agar orang kaya memberikan harta Allah yang diberikan kepada mereka itu, kepada budak-budak agar segera dapat menjadi orang merdeka.0' (Q. S. An-Nur: 33). Infaq sunat sangat digembirakan. Allah berjanji akan memberikan balasan berlipatganda kepada orang yang mampu berinfaq di jalan Allah (Q. S. Al-Baqarah: 261).
13. Menolong orang lain hendaknya yang bersifat mendidik. Al-Muindziri dalam kitabnya Targhib wat-Tarhib juz I hal. 591 mengutip hadits riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi, at-Tirmidzi dan an-Nasai dari Anas bin Malik ra., yang menceritakan bahwa seorang laki-laki sahabat Anshar datang kepada Nabi saw. untuk minta sesuatu guna memenuhi keperluan hidupnya. Nabi saw. tidak segera memberi, tetapi bertanya apakah orang itu mempunyai sesuatu yang dapat dijual. Akhirnya orang itu menyerahkan kepada Nabi saw. cangkir alat minum, yang oleh beliau kemudian dilelangkan kepada para sahabat beliau. Cangkir laku dua dirham. Oleh Nabi saw. dua dirham itu diserahkan kepada orang yang menjualnya, dengan pesanan agar yang satu dirham digunakan membeli makanan bagi keluarganya, dan yang satu dirham digunakan untuk membeli kapak, sebagai alat bekerja mencari kayu untuk dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Dua minggu kemudian orang itupun datang kepada Nabi saw. dan melaporkan hasil kerjanya mendapatkan 10 dirham. Oleh Nabi saw.



diperintahkan agar uang digunakan untuk membeli makanan dan pakaian. Kemudian beliau menyampaikan pesan:

*“Orang miskin itu bukan orang yang mengitari jalan-jalan atau rumah-rumah untuk minta sedekah orang banyak, yang merasa cukup mendapatkan satu dua suap atau satu dua kurma; tetapi orang miskin itu adalah orang yang memperoleh kelapangan untuk memenuhi keperluan hidupnya, dan tidak diketahui keadaannya sehingga (tidak) ada yang memberi sedekah serta tidak meminta-minta kepada orang banyak.”*

## BAB V TINJAUAN ILMU EKONOMI TERHADAP PENANGANAN KAUM DHU’AFA

Di dalam ekonometri jika hendak mengukur pendapatan perkapita maka kita akan berhadapan dengan dua jenis variabel yaitu tingkat pendapatan nasional dikurangi indeks pertumbuhan penduduk. Dengan demikian pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh terhadap fluktuasi pendapatan perkapita suatu negara. Dengan kata lain penekanan pertumbuhan penduduk adalah satu di antara sejumlah alternatif yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, angka pertumbuhan penduduk Indonesia pertahun sebesar 2,34%, dan sekarang nampaknya sudah dapat diturunkan menjadi 1,9% pertahun.

Seandainya kita asumsikan pertumbuhan penduduk konstan 1,9% (karena mengharapkan lebih rendah dari itu kecil kemungkinannya, apalagi merealisasikan *konsep Zero Population Growth* yang disarankan dalam buku *The Limit to Growth* yang diterbitkan oleh Club Rome pada tahun 1972) maka pada tahun 2000 menurut proyeksi Prof. Soemitro penduduk Indonesia akan meningkat dari 81 juta menjadi 107 juta. Bisa kita bayangkan betapa pelik masalah penempatan kerja untuk generasi mendatang.

Masalah-masalah yang menyangkut problema generasi yang akan datang adalah mahalannya pendidikan yang berkaitan dengan mutu sumber daya manusia yang sangat menentukan kemajuan umat, di samping itu sumber daya alam yang kita gali secara tidak bertanggungjawab dengan tidak memikirkan kelestariannya adalah masalah lain yang mungkin juga merupakan suatu variable yang sangat menentukan.

Dengan kenyataan-kenyataan ini, dalam konteks sosial ekonomi bangsa Indonesia pada umumnya masih lemah, paling tidak terdapat 30 juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka masuk dalam kategori kaum dhu’afa.

Dalam strategi pembangunan kita mengenal dua konsep yang sangat populer yaitu *top down planning* dan *bottom planning*. Konsep yang pertama mendudukkan pemerintah (atau etika tertentu) yang merencanakan pembangunan, masyarakat yang kemudian melaksanakannya, sedangkan konsep yang kedua mendudukkan masyarakat sebagai subyek yang menyusun perencanaan karena mereka dianggap yang paling tahu apa kebutuhannya.

Untuk pengentasan kaum dhu’afa, mungkin kedua konsep tersebut terlalu sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan itu terutama akan sangat menonjol pada saat kita diperhadapkan pada penyusunan kebutuhan-kebutuhan riil dari mereka. Oleh karena itu kemudian disarankan agar lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kelompok penengah yang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami kebutuhan kaum dhu’afa dan mengetahui serta mampu

mengadakan sumber-sumber yang ada di pemerintah atau organisasi lainnya, untuk ini memang sangat diperlukan inovasi dan kreativitas. Dapat dinamakan konsep tersebut dengan konsep pembangunan dari tengah.

Sekarang ini makin terdengar istilah *Managerial Revolution*, suatu istilah yang menggambarkan betapa pentingnya posisi atau fungsi golongan manager profesional yang menjadi demikian dominan di dalam masyarakat. Di Jepang dan Amerika misalnya, kendatipun di sana banyak orang-orang kaya, ekonomi tidak dikuasai oleh mereka melainkan oleh kelompok manajer. Tetapi di Indonesia, isu-isu mengenai konglomerasi adalah indikator bahwa ekonomi kita dikuasai oleh mereka.

Salah satu thesis yang diajukan dalam manajemen yang dipopulerkan adalah penerapan prinsip amanah baik untuk yang menjalankan maupun yang menerima amanah karena dengan menerapkan prinsip itulah, maka sumber daya dan dana yang ada akan dapat kita kelola secara bertanggungjawab.

## BAB VI

### TINJAUAN ILMU SOSIAL TERHADAP PENANGANAN KAUM DHU'AFA

Perhatian terhadap golongan miskin semenjak zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Berbagai pihak telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini, baik yang berdasarkan keagamaan ataupun berdasarkan pandangan humanitarian semata.

Di negara Barat pemuka-pemuka gereja mengambil tanggungjawab terhadap orang-orang yang lemah, yatim/piatu, janda dan orang sakit. Praktek yang tidak resmi seperti ini, baru pada abad pertengahan dijadikan kegiatan yang terorganisir. Pada taraf berikutnya timbul konflik antara gereja dan negara dan pada saat ini pula muncul kegiatan humanitarian yang dipelopori oleh ibu-ibu golongan atas yang terkenal dengan julukan *Lady Beautiful*. Mereka terdiri dari isteri pejabat pemerintah dan orang-orang kaya yang mempunyai waktu luang dan perhatian yang cukup terhadap sesama manusia yang menderita.

Dalam kalangan Islam sendiri, memelihara anak yatim dan menyantuni orang miskin disampaikan dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Ma'un. Dan terlihat oleh kita, sudah banyak usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan kaum lemah/miskin yang dilaksanakan oleh kaum muslimin.

Dapat kita lihat berbagai usaha telah dilaksanakan baik oleh mereka yang berdasarkan pandangan keagamaan maupun yang bermotifkan rasa kemanusiaan, dan dapat kita lihat pula bahwa masalah kemiskinan, keterlantaran, yatim/piatu dan masalah social lainnya nampaknya semakin tidak berkurang, justru semakin meningkat, baik dilihat dari segi jumlah maupun kompleksitasnya.

Kritik yang sering dilontarkan terhadap golongan pertama dan kedua tersebut ialah bahwa pertolongan yang diberikan lebih menonjolkan kepentingan pihak yang memberikan pertolongan ketimbang dari kepentingan yang ditolong. Apapun hasilnya yang penting penolong merasa puas karena sudah berbuat sesuatu dengan harapan akan memperoleh pahala dari Tuhan. Kritik lain terhadap usaha yang bersifat filantropis dari golongan kemanusiaan ialah adanya sikap yang memandang rendah terhadap golongan yang lemah. Prinsip penolong seseorang agar dapat menolong dirinya sendiri yang merupakan unsure penting dalam kegiatan tersebut justru tidak kelihatan. Hal inilah yang menurut sejarah mendorong timbulnya pekerjaan sosial profesional di Barat.

Sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Apakah cara-cara yang dipergunakan untuk menanggulangi kaum dhu'afa selama ini sudah memuaskan? Dan apakah kita siap menghadapi tantangan masa depan yang masalahnya terlihat semakin kompleks?

### KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH SOSIAL

Kemiskinan adalah salah satu dari masalah social yang dapat dipandang sebagai sumber dari berbagai masalah sosial lainnya. Remaja putus sekolah, kenakalan remaja, pelacuran, gelandangan, kebodohan, kejahatan, dapat timbul dari kemiskinan. Oleh karena itu jika berbicara tentang kemiskinan sebagai masalah sosial meliputi analisis terhadap perilakunya, tepat terjadinya, dan juga lembaga-lembaga yang menanggulangi masalah tersebut.

Siapakah golongan miskin itu? Banfield menjawab pertanyaan ini dengan membedakan 4 tingkatan kemiskinan.

1. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya atau mencegah penderitaan karena kelaparan, kedinginan dan penyakit.
2. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kesejahteraan pokok (*essensial welfare*) tidak termasuk *comfort* dan *convenience*.
3. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk mencegah kegelisahan atau kesusahan yang akut dan berkepanjangan.
4. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan untuk mengatasi perasaan miskin jika dibandingkan dengan orang lain.

Taraf-taraf kemiskinan ini harus diterjemahkan ke dalam bentuk uang dengan memperhatikan:

1. Harus mengenal lebih dahulu bahwa ketiga kategori kemiskinan yang pertama adalah ketidakmampuan untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan standar hidup minimum.
2. Harus dibuat daftar dari standar minimum tersebut.
3. Memberi harga pada standar minimum dalam daftar tersebut.

Namun demikian, kemiskinan itu tidak hanya diukur dari kebutuhan jasmaniah semata. Aspek lain yang patut diperhitungkan ialah adanya perasaan miskin. Golongan ini akan makin banyak terdapat dengan meningkatnya kemakmuran. Bagi mereka yang tertinggal dalam menggapai kemakmuran itu, jangankan untuk memiliki saja dapat lebih mengganggu dan merusak jika dibandingkan dengan kekurangan makan.

Sehubungan dengan ini ada baiknya kita perhatikan ada yang dikemukakan Herman Miller bahwa "Kehilangan harapan adalah essensi dari kemiskinan". Dilihat dari segi ini Miller berpendapat bahwa kemiskinan yang sebenarnya dewasa ini adalah lebih besar jika dibandingkan dengan keadaan pada permulaan abad ini.

### SEBAB-SEBAB KEMISKINAN

Kaum dhu'afa termasuk ke dalam *vulnerable group* atau kelompok yang peka terhadap proses perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat. Pembangunan pada hakekatnya adalah menciptakan perubahan secara sengaja dalam berbagai bidang. Kaum dhu'afa yang tidak memiliki kekuasaan politik dan ekonomi banyak yang menderita akibat pembangunan sosial yang cepat. Mengapa harus terjadi hal yang seperti ini? Kita coba mengawalinya dengan mengemukakan sebab-sebab kemiskinan dari segi individual, kultural dan struktural.

Segi individual ialah mencari sebab-sebab yang terdapat pada diri seseorang. Sifat, perilaku dan sikap individual itu dipelajari, apakah ia seseorang yang dapat berfungsi atau tidak dalam masyarakat di mana ia hidup. Orang miskin seringkali dipandang sebagai orang yang malas, bodoh, tidak punya ketrampilan, kurang bertanggungjawab, tidak punya bobot, tidak punya motivasi dan lain-lainnya. Melalui penjelasan individual ini juga diusahakan memahami pola tertentu dari kehidupan keluarga yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan tingkah laku seorang anak, misalnya: keluarga yang dipimpin oleh seorang ibu karena tiadanya ayah, dapat memberi pengaruh terhadap kepribadian tertentu. Pengalaman yang tidak menyenangkan ini pada pikiran anak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebab kemiskinan dari segi individual ini banyak disukai, karena mudah untuk meletakkan kesalahan pada individu yang miskin, padahal sebenarnya kesalahan ada pada pihak lain.

Dari segi kultural ada pandangan bahwa kemiskinan menciptakan kulturenya sendiri. Anak-anak yang dibesarkan dalam kultur kemiskinan akan dipengaruhi dan akan menjalankan cara hidup yang demikian pula. Mereka menyerap nilai dasar dan sikap mental sub kultur secara psikologis. Meskipun ada kesempatan untuk berubah, mereka tidak siap dan tidak berusaha untuk memanfaatkan dan mendapatkan kesempatan itu. Di kota-kota besar, biasanya mereka tinggal di pemukiman padat dan kumuh dengan fasilitas serba minim, timbullah berbagai masalah, tidak saja bagi yang miskin tetapi juga bagi anggota masyarakat lainnya.

Dari segi kultural pada hakekatnya adalah memberi perhatian kepada relasi sosial dan struktur sosial. Sebagai contoh adanya pendapat yang mengatakan bahwa golongan miskin merupakan golongan yang penting keberadaannya karena mengemban berbagai fungsi yang berguna dalam masyarakat. Orang miskin diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan rendahan dengan upah yang murah. Orang miskin juga merupakan sumber tenaga murah bagi masyarakat dan merupakan pasar bagi barang yang kurang bermutu. Jenis pekerjaan ini, tidak memerlukan tenaga yang trampil dan bermotivasi tinggi. Jenis lapangan pekerjaan seperti ini tersedia dalam masyarakat. Jadi sebagian dari sistem ekonomi bergantung kepada tenaga-tenaga seperti ini dan hal ini merupakan sumber structural dari kemiskinan. Pendapat seperti pada kemiskinan structural, tidak berlaku bagi suatu bangsa dan negara seperti Indonesia. Negara kita mempunyai kewajiban konstitusional dan agama yang kita anut memerintahkan agar memperhatikan dan membantu kaum miskin/lemah dengan berbagai usaha, termasuk mendirikan lembaga-lembaga sosial.

Lembaga-lembaga sosial yang telah ada, perlu sekali untuk kita lihat kembali. Apakah berjalan secara efektif atau tidak? Apakah lembaga-lembaga itu masih tetap berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati sejak mula? Ataukah telah terjadi pengalihan tujuan? Sehingga lembaga-lembaga dan badan-badan tersebut telah disibukkan oleh kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang bukan merupakan fungsi utama.

Penyimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan antara tujuan yang harus dicapai oleh seseorang dengan alat atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu patut sekali turut diperhatikan perilaku kelompok-kelompok kecil yang menyimpang, seperti misalnya: mengapa anak-anak dari golongan miskin atau kelas bawahan dapat menjadi nakal atau berperilaku menyimpang lainnya. Mungkin hal ini disebabkan mereka memiliki jalan pintas untuk meraih sukses.

Dengan memisahkan pendekatan individual, cultural dan structural barangkali berguna untuk menemukan alternatif cara-cara yang akan dipergunakan dalam membantu kaum dhu'afa.

## PENDEKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, SALAH SATU STRATEGI PENANGANAN KAUM DHU' AFA

Dalam menghadapi permasalahan kaum dhu'afa dengan segala masalah yang ditimbulkannya, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) diartikan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen usaha kesejahteraan sosial (*Social Welfare Programs* dan *Social Services*) dan pendekatan professional pekerjaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial orang seorang, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagaimana yang dirumuskan oleh ahli-ahli PBB, mempunyai beberapa fungsi yaitu: fungsi penyembuhan (*remedial*), pencegahan (*preventive*), pengembangan (*developmental*) dan fungsi penunjang (*suppertive*) terhadap program dari sektor lain.

Tipe kegiatan penyembuhan ini dapat terlihat pada program panti asuhan, panti pendidikan anak nakal, terlantar, dan lain-lain. Kegiatan semacam ini sangat populer dalam masyarakat kita, mungkin karena gampang terlihat dan menggugah rasa belas kasihan. Hanya saja kegiatan yang bersifat represif ini senantiasa berada di belakang permasalahan, ada maslah dulu baru dicarikan pemecahannya.

Tipe kegiatan yang bersifat pencegahan, berupa kegiatan yang ditunjukkan agar tidak terjadi kondisi sosial yang lebih buruk umpamanya berupa bantuan dan jaminan sosial.

Tipe kegiatan penyembuhan dan pencegahan ini dahulu dikenal karena fungsi santunannya merawat orang-orang yang tidak dapat merawat dirinya sendiri. Cara seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena selain tidak akan menyelesaikan masalah, juga tidak sejalan dengan tujuan sosial dari pembangunan.

Tujuan social dari pembangunan ialah untuk memperbaiki kondisi hidup bagi semua orang tanpa pengercualian atas dasar perlakuan dan kesempatan yang sama. Potensi yang terdapat dalam diri manusia itu dikembangkan menjadi kemampuan yang bersifat aktual. Berdasarkan sejarah pertumbuhannya, konsep pengembangan ini akan sangat penting artinya dalam menghadapi kemiskinan. Konsep pengembangan ini muncul dari pengalaman berbagai negara yang jumlah kaum dhu'afanya cukup besar. Tujuan konsep pengembangan ini ialah bagaimana mengangkat golongan miskin dan lemah ini ke atas sesuai dengan standar yang secara sosial dapat diterima. Usaha ini tidak akan berhasil jika masyarakat secara keseluruhannya tidak terlibat dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Ini berarti bahwa kegiatan utamanya harus diarahkan kepada pemberian motivasi kepada golongan miskin maupun masyarakat mapan agar mau berpartisipasi dalam proyek-proyek swadaya. Kegiatan penting lainnya ialah menumbuhkan iklim percaya kepada diri sendiri, kesediaan bekerja sama, menimbulkan prakarsa dan sifat-sifat lainnya yang diperlukan dalam pembangunan.

Dilihat dari sasarannya pertolongan yang diberikan, kegiatan lembaga-lembaga dapat dibagi atas dua kategori, yaitu "pelayanan langsung" dan "pelayanan tidak langsung" atau disebut juga "Pelayanan Mikro" dan Pelayanan Makro".

Pelayanan langsung adalah kegiatan untuk menolong orang yang sedang mengalami masalah (kaum dhu'afa). Kegiatan ini meliputi semua pelayanan langsung yang berupa penyuluhan, terapi, pendidikan, adokasi, pengumpulan informasi, rujukan (referensi), dan aspek bimbingan organisasi masyarakat (C.O.).

Pelayanan tidak langsung adalah kegiatan yang memusatkan perhatian pada lembaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, yang memberi pertolongan kepada individu, keluarga dan kelompok. Termasuk di sini adalah kegiatan perencanaan, analisa kebijaksanaan, pengembangan program, administrasi dan evaluasi program. Lembaga yang memberikan pelayanan tidak langsung ini tidak akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang mempunyai masalah (kaum dhu'afa) akan tetapi lebih menfokuskan perhatian pada struktur kelembagaan yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada golongan miskin dan lemah itu.

Kedua kategori lembaga yang mempergunakan pendekatan ini, masing-masing dapat mengembangkan programnya lebih terinci sesuai dengan masalah yang akan menjadi pusat perhatiannya, berpedoman kepada penggolongan tingkatan kemiskinan dan sebab-sebab masalah secara individual, kultural dan struktural sebagaimana yang dikemukakan tadi.

### **TENAGA DAN DANA**

Konsep-konsep yang dikemukakan tadi, hanya akan berhasil apabila dilaksanakan secara professional. Oleh karena itu factor tenaga mau tidak mau menjadi pertimbangan yang sungguh-sungguh. Bagi Muhammadiyah masalah tenaga ini hanya tinggal menfungsikan para lulusan lembaga pendidikan (Muhammadiyah) yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Profesionalisme akan membutuhkan dana yang cukup banyak. Kenyataannya masih ada badan-badan social yang memanipulasi anak-anak/penghuni lembaga untuk memperoleh dana. Hal ini menimbulkan macam-macam reaksi dalam masyarakat. Mungkin cara-cara seperti ini tidak berlaku dalam badan-badan Muhammadiyah, namun hal ini minta pemikiran juga.

## **BAB VII**

### **MENCARI STRATEGI PENANGGULANGAN KAUM DHU' AFA YANG SESUAI DENGAN KONDISI MUHAMMADIYAH DI LAPANGAN**

1. Muhammadiyah sebagai organisasi yang berlandaskan Islam, sarat dengan idealisme dan cita-cita yang tinggi. Tetapi karena justru karena idealisme tersebut sering unit-unit kerja Muhammadiyah dalam menyusun rencana kerja masing-masing terdorong ataupun terpeleset ke arah penyusunan daftar keinginan yang bagus-bagus tetapi rencana kerja tersebut tidak mudah dapat dilaksanakan.
2. Alhamdulillah pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinan. Konon menurut laporan Badan Keuangan Internasional angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 60-an sampai tahun 1990 telah dapat dikurangi dari 30% menjadi 17% jumlah penduduk. Jika laporan itu benar, dewasa ini di Indonesia tinggal 17% penduduk miskin. Namun perlu diingat bahwa 17% dari 180 juta penduduk adalah 30 juta manusia. Jumlah ini sama besarnya dengan penduduk Kerajaan Saudi Arabia dilipatkan tiga kali. Lagi pula kaum muslimin Indonesia harus prihatin karena dari 30 juta orang miskin tersebut adalah orang Islam.
3. Di samping manfaat yang besar pembangunan juga tidak bebas dari dampak negatif yang tidak diinginkan. Pada ahli ekonomi mengingatkan bahwa kita jangan mudah terkecoh oleh angka pendapatan rata-rata perkapita. GNP rata-rata perkapita bangsa



Indonesia konon telah meningkat dari \$ 100 (tahun 1985) menjadi \$ 500 (tahun 1987). Tetapi hal itu bukan jaminan bahwa jumlah orang miskin berkurang. Peningkatan penghasilan rata-rata jika tidak disertai pemerataan hanya akan memperluas kesenjangan sosial. Jika suatu prabrik berdiri, perlu diperhatikan mana yang lebih banyak jumlahnya, orang yang mendapat lapangan kerja baru atau orang yang tergusur lapangan kerjanya.

4. Hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah dalam menangani kaum dhu'afa.
5. Kemiskinan adalah bibit dari berbagai macam penyakit sosial. Bahkan menurut suatu hadits adanya kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran. Secara social kemiskinan membawa kerawanan kesehatan, ketertinggalan pendidikan, kekalahan dalam persaingan mencari kerja dan beberapa kesulitan lainnya. Namun di samping kemiskinan masih banyak lagi bentuk kepapaan dan kesengsaraan lain. Di segala jenis masyarakat selalu terdapat kelompok orang-orang yang memerlukan pertolongan. Demikian pula orang-orang jompo dan para penyandang cacat, baik cacat mental atau fisik, adalah juga merupakan kelompok orang-orang yang memerlukan pertolongan. Orang-orang yang memerlukan pertolongan tersebut di atas serta orang-orang penyandang masalah social lainnya adalah kelompok orang-orang yang lemah dan kaum dhu'afa.
6. Strategi peningkatan gerakan penanganan kaum Dhu'afa.
  - a. **Melalui Program majelis PKU.** Memang Amal Usaha Muhammadiyah Majelis PKU pada Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, dan Pembinaan Kesejahteraan pada umumnya cukup banyak dalam arti mencapai jumlah ratusan. Tetapi jumlah tersebut sangat kecil baik jika dilihat dari besarnya masalah yang ada maupun jumlah Cabang Muhammadiyah. Apalah artinya sumbangan 125 rumah yatim jika dibanding dengan jumlah anak terlantar yang mencapai jutaan. Kita tentu bersyukur memiliki 12 Rumah Sakit dan lebih kurang 300 Rumah Bersalin/BKIA/BP dan Fasilitas Pendidikan Tenaga Kesehatan (AKPER, AKZI, SPK, Pend. Bidan, SMF, yang tiap tahun menghasilkan tidak kurang dari 600 tenaga Profesional dalam kesehatan). Tetapi di antara 2000 Cabang tersebut lebih kurang hanya 15% yang mempunyai amal usaha sosial dan kesehatan institusional, sedang yang lain kegiatan sosialnya terbatas pada hal-hal yang insidentil seperti pengumpuln sodaqoh, pembagian zakat, santunan jenazah, dan sebagainya. Program tersebut perlu ditingkatkan baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sehingga kemampuan menangani kaum dhu'afa juga akan meningkat. Pembentukan Majelis Kesehatan Muhammadiyah akan lebih memungkinkan peningkjatan pelayanan kesehatan baik kualitatif maupun kuantitatif.
  - b. **Melalui Majelis Ekonomi.** Peran utama dari Majelis Ekonomi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qaidh majelis, perlu dipertajam secara eksplisit bahwa penanggulangan kaum dhu'afa menjadi prioritas utama. Tentu saja strategi peningkatannya berbeda dengan Majelis PKU, yang lebih bersifat pilantropik (*charity*), sedang Majelis Ekonomi lebih mengarah kepada pemberian pancing ketimbang pemberian ikan.
  - c. **Melalui Program Pengembangan Masyarakat (CD).** Pada Muktamar ke-41 secara jelas telah diputuskan tentang adanya Program Pengembangan Masyarakat, yang pada pelaksanaannya dikerjakan oleh Majelis PKU belum secara intensif dan

merata. Sudah saatnya program pengembangan masyarakat secara tegas diarahkan dalam rangka penanggulangan kaum dhu'afa. Adanya proyek bantuan luar negeri maupun dalam negeri yang mengarah pada pengembangan masyarakat selama ini belum diakomodir secara baik, padahal peluang ke arah itu cukup besar, meskipun persyaratannya memerlukan penanganan yang professional oleh tenaga-tenaga yang terlatih.

7. Maka permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan bentuk-bentuk program yang sederhana realistis dan operasional yang dapat dilaksanakan di Cabang-cabang dengan menggunakan sumber dana dan tenaga setempat. Sedang dari pimpinan tingkat di atasnya hanya dapat diharapkan bimbingan dan pengawasan.

\*\*\*

## **KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-43 8-12 SHAFAR 1416/ 6-10 JULI 1995 DI BANDA ACEH**

---

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Muktamar Muhammadiyah ke-43 yang berlangsung pada tanggal 8 – 12 Shafar 1416 H bertepatan tanggal 6 – 10 Juli 1995 M di Banda Aceh, setelah mengikuti dengan seksama:

1. Amanat Presiden Republik Indonesia, H. Muhammad Soeharto, pada upacara peresmian Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Stadion Lampineung Banda Aceh;
2. Ceramah Menteri Dalam Negeri R.I., Yogi S. Memet;
3. Ceramah Panglima Angkatan Bersenjata R.I., Jenderal Faisal Tanjung;
4. Ceramah Menteri Tenaga Kerja R.I., Drs. Abdul Latief;
5. Ceramah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro;
6. Ceramah Menteri Negara Ristek/Ketua BPPT, Prof. Dr. Ing. H. J. Habibie;
7. Ceramah Menteri Penerangan R.I., H. Harmoko;
8. Ceramah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita;
9. Ceramah Menteri Keuangan R.I., Drs. Mar'ie Muhammad;
10. Ceramah Menteri Negara Urusan Pangan R.I., Prof. Dr. Ibrahim Hasan;
11. Ceramah Menteri Agama R.I., dr. H. Tarmizi Taher;
12. Ceramah Menteri Negara Agraria/Kepala BPN R.I., Ir. Soni Harsono, pada Sidang Tanwir pra Muktamar;
13. Ceramah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Khutbah Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. M. Amien Rais, M.A.;
15. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1990 – 1005 oleh H. M. Muchlas Abror;
16. Prasaran Materi Muktamar, yang disiapkan sebagai Rencana Program Muhammadiyah masa jabatan 1995 – 2000, masing-masing tentang:
  - a. “Pengantar Pengembangan Program Muhammadiyah” oleh Drs. H. Sutrisno Muhdam;
  - b. “Masalah Dunia Islam dan Masalah Domestik” oleh Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
  - c. Peran dan Antisipasi Muhammadiyah Menyongsong Abad XXI” oleh Dr. H. A. Syafi’i Ma’arif;
  - d. Religiositas Kebudayaan – Sumbangan Muhammadiyah dalam Pembangunan Bangsa” oleh Dr. M. Amin Abdullah;
  - e. “Kebudayaan, Masyarakat Industri Lanjut, dan Dakwah” oleh Dr. Kuntowidjojo;
  - f. “Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menjelang Abad XXI” oleh Dr. H. A. Watik Pratiknya;
  - g. “Pembinaan Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat” oleh Dr. H. Hadjid Harnawidagda;
  - h. “Dakwah Pengembangan Masyarakat” oleh Drs. H. A. Munir Mulkhan, S.U.;

- i. “Dakwah untuk Kelas Menengah” oleh H. Rusydi Hamka;
  - j. “Kader Muhammadiyah” oleh Drs. H. M. Sukriyanto A.R.;
  - k. “Pengembangan Manajemen Persyarikatan” oleh Drs. H. A. Rosyad Sholeh;
  - l. “Revitalisasi Ranting” oleh H. Fahmy Chatib, S.E.;
  - m. “Peningkatan dan Pengembangan Dana Muhammadiyah” oleh H. S. Prodjokusumo dan dr. H. Sugiat AS, S.K.M.;
17. Hasil Pemilihan Anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 1995–2000;
  18. Tanggapan, pendapat, pembahasan, dan usul para peserta Muktamar yang disampaikan baik dalam sidang-sidang Sub Komisi, Komisi, maupundalam sidang Pleno;
- Menimbang : Bahwa Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995–2000 dan pembicaraan materi Muktamar telah dilakukan sesuai dengan peraturan, tata-tertib, dan pedoman pemilihan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 8 dan 16 Anggaran Dasar Muhammadiyah;  
 2. Pasal-pasal 7, 15, 19, dan 28 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
 3. Tata-Tertib Muktamar Muhammadiyah ke-43;  
 4. Pedoman dan Tata-Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995–2000;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-43.**

#### **I. PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 1995–2000.**

- A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995 – 2000 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 41 orang calon yang diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan jumlah suara, sebagai berikut:
 

1. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.	(1245)
2. Drs. H. Sutrisno Muhsam	(1048)
3. Dr. H. A. Syafi'i Ma'arif	(1047)
4. Dr. H. A. Watik Pratiknya	(886)
5. Drs. H. A. Rosyad Sholeh	(874)
6. H. Yahya A. Muhaimin, Ph.D.	(866)
7. H. Ramli Thaha, S.H.	(852)
8. Prof. Drs. H. Asymuni Abdurrahman	(802)
9. H. M. Muchlas Abror	(730)
10. Drs. H. Lukman Harun	(660)
11. H. Anhar Burhanuddin, M.A.	(628)
12. H. Rusydi Hamka	(624)
13. Drs. H. M. Sukriyanto A.R.	(589)
- B. Menetapkan Dr. H. M. Amien Rais, M.A. sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995 – 2000.

## **II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 1990 - 1995.**

Menerima laporan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1990-1995 dengan beberapa catatan sebagai berikut:

### **A. Laporan Keuangan**

1. Pada Muktamar Muhammadiyah yang akan datang, laporan hasil pemeriksaan keuangan hendaknya dilaporkan secara lebih rinci.
2. Penghimpunan "Dana Abadi" yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat dari para anggota Persyarikatan, hendaknya menyampaikan tembusan suratnya kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
3. Dalam upaya meningkatkan penghimpunan "Dana Abadi", Pimpinan Pusat agar bekerjasama dengan majalah Suara Muhammadiyah dan Harian Republika.

### **B. Wakaf dan Kehartabendaan**

1. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya meningkatkan kerjasamanya dengan BPN dan Departemen Agama dalam mensertifikatkan tanah-tanah (hak milik dan wakaf) Muhammadiyah.
2. Perlu peningkatan inventarisasi harta kekayaan yang dimiliki Muhammadiyah seluruh Indonesia.

### **C. Ekonomi**

Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya mengambil perhatian yang lebih serius terhadap BPR Muhammadiyah seperti BPR Matahari Artha-daya, sehingga terdapat hubungan organisasi antara BPR tersebut dengan Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah.

### **D. Keyakinan Hidup Islami Muhammadiyah**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya segera menyelesaikan penyusunan dan penerbitan "Keyakinan Hidup Islami Muhammadiyah".

### **E. Bimbingan Haji**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya mengambil prakarsa menyelenggarakan bimbingan haji warga Muhammadiyah.

### **F. Rangkap Jabatan**

Untuk terlaksananya tugas-tugas Pimpinan Persyarikatan dengan sebaik-baiknya, dalam kaitannya dengan rangkap jabatan di dalam Muhammadiyah, dipandang perlu menghapus ART Pasal 15 ayat (g) yang berbunyi: "... kecuali dengan izin Pimpinan Pusat."

### **G. Umum**

1. Sesuai dengan bunyi ART Pasal 19 ayat (6), hendaknya laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah dikirimkan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.
2. Sistematika laporan hendaknya dibuat secara metrik yang meliputi perencanaan, kegiatan, dan evaluasi.
3. Agar dalam laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Muktamar yang akan datang dicantumkan data organisasi yang meliputi:
  - jumlah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,

- jumlah Pimpinan Daerah Muhammadiyah,
- jumlah Pimpinan Cabang Muhammadiyah,
- jumlah Pimpinan Ranting Muhammadiyah, serta data amal usaha Muhammadiyah seluruh Indonesia.

4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar lebih arif dan bijaksana tetapi tegas melaksanakan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

### **III. PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 1995 – 2000**

1. Menerima rencana Program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000 menjadi Program Muhammadiyah Tahun 1995 – 2000" dengan perbaikan dan penyempurnaan seperti terlampir.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun kembali dan menyempurnakan Program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000 dengan memperhatikan pendapat, saran, dan usul para peserta Muktamar..

### **IV. REKOMENDASI MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-43**

#### **A. AGAMA**

1. Menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengatur pembinaan kerukunan umat beragama disertai langkah-langkah pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan stabilitas dan integritas nasional.
2. Mengajak semua kaum muslimin untuk selalu mengintensifkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam berdasarkan sumbernya yang murni yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan.
3. Mengajak semua organisasi Islam untuk mempererat ukhuwwah Islamiyah dengan mengembangkan kehidupan yang penuh tasamuh dan ta'awun dalam rangka 'izzul Islam wal muslimin.
4. Mendorong segenap cendekiawan muslim untuk menyatukan sikap dan pandangan dalam merumuskan konsep-konsep Islam bagi pemecahan masalah-masalah kemanusiaan sesuai dengan pesan-pesan Al-Qur'an dan As-Sunnah menghadapi tantangan abad ke-21 yang bersifat kompleks.
5. Mengimbau kepada Pemerintah untuk menata kembali organisasi dan sistem penyelenggaraan haji untuk lebih memberi kemudahan dan kelancaran bagi para calon jamaah haji serta menindak oknum-oknum yang menyalah-gunakan wewenang atau kesempatan yang merugikan kepentingan jamaah haji Indonesia.
6. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji.
7. Mengingat keterbatasan kuota dan semakin meningkatnya minat menunaikan ibadah haji, Muhammadiyah mengimbau kepada orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi para calon yang sama sekali belum menunaikannya, dengan ajakan menyalurkan kelebihan rezeki tersebut bagi kepentingan amal saleh social yang bernilai bagi kemaslahatan umat.
8. Mengimbau kepada umat Islam untuk tidak mudah terpancing dan melakukan tindakan-tindakan yang mengesankan sikap keislaman yang keras, ekstrim, dan emosional atau isu-isu keagamaan yang bermuatan politik dan isu-isu politik yang bermuatan keagamaan.



## **B. PENDIDIKAN**

1. Muhammadiyah sangat menghargai dan mengharapkan pelaksanaan yang semakin baik mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan mengharapkan penambahan jam pelajaran agama serta gurunya di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
2. Muhammadiyah mengimbau agar Pemerintah selain mengizinkan pemakaian busana muslimah di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, juga memberikan rasa aman kepada para pemakaiannya, karena pemakaian busana muslimah merupakan perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama bagi umat Islam.
3. Mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menggalakkan dan memberikan subsidi bagi usaha-usaha penerbitan buku dan bantuan memadai bagi penyediaan perpustakaan terutama di daerah-daerah yang tertinggal.
4. Dalam rangka mengoptimalkan daya kompetitif bangsa, Muhammadiyah mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan upaya mengoptimalkan lembaga pendidikan yang diselenggarakannya dan mengajak segenap umat Islam untuk menyelenggarakan SMP terbuka di masjid-masjid.
5. Agar pemerintah mempertimbangkan kembali penyelenggaraan sekolah-sekolah elite yang eksklusif dan dapat menimbulkan kesenjangan serta kecemburuan social di masyarakat. Namun Muhammadiyah mendukung sekolah unggulan yang tidak mengarah ke eksklusivisme dan membuka peluang atau kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan di dalamnya dikembangkan juga pembinaan keimanan dan ketaqwaan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
6. Dalam rangka mengembangkan fungsi pendidikan di masyarakat dan meningkatkan ketahanan moral masyarakat, Muhammadiyah mengharapkan agar televisi baik TVRI maupun swasta memperbesar porsi pelajaran acara-acara yang membawa pesan-pesan agama.
7. Muhammadiyah mengharapkan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa, agar libur panjang bulan Juni, Juli dapat diintegrasikan di bulan Ramadhan.

## **C. SOSIAL BUDAYA**

1. Sendi-sendi moral bangsa harus senantiasa tegak, berhubung keberhasilan pembangunan nasional banyak tergantung pada pembangunan moral yang menjadi landasan seluruh proses pembangunan. Karenanya, Muhammadiyah mengimbau semua pihak kekuatan bangsa untuk senantiasa memelihara, mengindahkan, dan mengeja-wantahkan nilai-nilai moral dan akhlak dalam kehidupan social. Politik, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.
2. Dalam rangka penggalakan pariwisata hendaknya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh masalah moral dan jati diri bangsa agar tidak terkontaminasi oleh unsure-unsur budaya asing yang negatif dan destruktif. Oleh sebab itu dalam pengembangan pariwisata di samping pertimbangan ekonomi perlu diimbangi dengan pertimbangan nilai-nilai agama dan moral bangsa. Karena sekali jati diri bangsa tercemar, proses penyembuhannya akan memakan waktu yang lama.

3. Mengusulkan atau mengimbau kepada pemerintah c.q. Departemen Penerangan R.I. agar mengontrol, meninjau ulang, bahkan menghapus program-program acara tayangan televisi baik TVRI maupun televisi swasta, yang menampilkan dan/atau membawa muatan-muatan kekerasan/sadisme, eksploitasi seks, hidup bebas, dan acara-acara sejenis yang bertentangan dan tidak selaras dengan nilai-nilai agama dan falsafah Pancasila.
4. Muhammadiyah mengharapkan pemerintah untuk mewaspadai dan melarang jaringan-jaringan asing yang merusak moral bangsa.

#### **D. KELUARGA SEJAHTERA**

1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah tentang program Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:
  - a. Bahwa Program KB menurut Muhammadiyah adalah pengaturan jarak kelahiran, bukan pembatasan jumlah kelahiran (*Birth Control*).
  - b. Bahwa norma Program KB adalah program keluarga Sakinah Sejahtera.
  - c. Tetap mengharamkan kontrasepsi mantap (kontap) dengan cara vasektomi, tubektomi, Menstrual Regulation (MR) serta pengguguran.
2. Menyerukan kepada pemerintah untuk mengontrol penjualan, pendistribusian, dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, agar tidak disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan moral dan ajaran Islam.

#### **E. EKONOMI**

1. Muhammadiyah sangat prihatin terhadap kecenderungan demoralisasi di segenap lini yang telah menyebabkan ketidakmampuan banyak pemimpin dan sebagian anggota masyarakat untuk membedakan antara nilai-nilai kebaikan (alhasanah) dan nilai-nilai keburukan (assayyiah). Pada gilirannya demoralisasi ini telah melahirkan kolusi, korupsi, eksploitasi manusia atas manusia lain, kezaliman sosial ekonomi dan ketidakberdayaan lapisan kaum Dhu'afa untuk membebaskan dirinya dari himpitan kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Muhammadiyah berpendapat bahwa segenap pihak terutama pemerintah sesegera mungkin menegakkan accountabilitas publik dan transparansi publik dalam rangka mewujudkan moralitas publik dan moralitas bangsa.
3. Mengimbau kepada para pengusaha Indonesia untuk mendukung dan dapat melaksanakan imbauan pemerintah tentang pembagian saham kepada koperasi (sebesar 2,5%) sebagai salah satu cara pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
4. Menyerukan kepada pemerintah untuk lebih menciptakan peluang dan mengembangkan program keterkaitan antara pengusaha-pengusaha besar, menengah dan kecil termasuk koperasi.
5. Mendukung upaya pemerintah dan DPR yang sedang menggodok Rencana Undang-Undang Anti Monopoli dan Oligopoli, sehingga aset ekonomi tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang.
6. Menyerukan kepada umat Islam untuk meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara meningkatkan kemampuan ekonomi umat.
7. Bahwa penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh lembaga-lembaga ekonomi modern dan pemanfaatan proyek-proyek pembangunan hendaknya sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

8. Dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan hendaknya pemerintah lebih mempertimbangkan dan melindungi kepentingan rakyat kecil.
9. Mengimbuu pemerintah agar dapat mengambil langkah-langkah yang lebih kongkret dalam memecahkan kesenjangan sosial ekonomi.
10. Mendukung kebijakan dan usaha-usaha Menteri Tenaga Kerja RI untuk meningkatkan pelaksanaan Upah Kerja Minimum (UKM) dan perlindungan bagi para pekerja khususnya pekerja wanita.
11. Mendesak kepada PP Muhammadiyah agar segera mengadakan kerjasama dengan Depnaker dan departemen/lembaga yang terkait untuk menangani masalah-masalah ketagakerjaan.
12. Agar pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan kebebasan bagi para pekerja dalam menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan cuti hamil bagi pekerja wanita, dan lain-lainnya.
13. Pemerintah hendaknya lebih menertibkan penyelenggaraan pengiriman TKI ke luar negeri dan memberi perlindungan kepada TKI khususnya wanita, menindak oknum atau pihak-pihak yang merugikan TKI dan kepentingan bangsa, serta memprioritaskan pengiriman TKI yang memiliki profesi yang berkualitas/tenaga ahli.
14. Agar pemerintah menghindarkan dan menghentikan penggalian dana yang mengandung unsure judi serta melarang atau menghentikan kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mempunyai atau mengandung unsur judi.

#### **F. HUKUM DAN POLITIK**

1. Menegaskan kembali pendirian Muhammadiyah sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang, bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisasi dengan dan tidak merupakan afiliasi atau kaitan apapun dengan salah satu kekuatan social politik.
2. Muhammadiyah ikut menyukseskan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR-RI tahun 1998 dan mengharapkan agar Pemilu 1997 berjalan dengan "Luber" dan "Jurdil" sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas demokrasi Pancasila.
3. Menyerukan kepada keluarga besar Muhammadiyah khususnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hak asasinya sebagai warga negara.
4. Muhammadiyah mengimbuu agar seluruh kekuatan social politik di Indonesia menomor satukan kesatuan, persatuan, ketahanan dan kepentingan nasional.
5. Sejalan dengan iklim keterbukaan yang sudah mulai tercipta, diharapkan kehidupan nasional berjalan menuju ke arah pengembangan demokrasi sebagaimana dicita-citakan oleh sistem kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.
6. Muhammadiyah menyambut baik i'tikad Baik bapak Presiden Republik Indonesia yang menugaskan LIPI untuk meneliti sitem dan pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu Muhammadiyah mengharapkan agar LIPI dapat segera menyelesaikan tugasnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

7. Mendesak kepada PP Muhammadiyah agar mengoptimalkan fungsi Lembaga Keadiliah Hukum Muhammadiyah untuk lebih memberikan manfaat bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya.
8. Mengharapkan kepada PP Muhammadiyah agar membentuk Lembaga Keadiliah Hukum Muhammadiyah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia.
9. Mengharapkan kepada Pemerintah cq. Departemen Agama RI agar memperhatikan Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam penyempurnaan Hukum Nasional.
10. Muhammadiyah mendukung usaha Pemerintah dalam gagasan disiplin nasional dengan mengharapkan agar para pejabat dan pemuka masyarakat dapat memberi contoh dalam pelaksanaannya.
11. Berkenaan dengan usia 50 tahun Indonesia Merdeka, Muhammadiyah memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tanda kesyukuran atas karunia kemerdekaan itu, Muhammadiyah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan pembangunan dalam segala bidang sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur dalam naungan ridha Allah.

#### **G. LUAR NEGERI**

1. Menyerukan kepada negeri-negeri muslim untuk berstu dan terlibat secara aktif dalam setiap penyelesaian krisis yang terjadi di antara sesama negeri muslim.
2. Mengharapkan agar Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendamaikan konflik antara Mesir dan Sudan.
3. Mengutuk tindakan-tindakan menysahkan etnis dan tindakan-tindakan biadab lainnya yang dilakukan Serbia atas kaum Muslim di Bosnia Herzegovina, dan Rusia atas Chechnya.
4. Muhammadiyah mengharapkan agar PBB menindak tegas kepada Serbia dan Rusia.
5. Mengutuk pemerintah Zionis Israel atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina, dan menyerukan agar tindakan tersebut dihentikan. Mengimbau kepada PBB untuk segera melakukan upaya baru dalam penyelesaian terhadap masalah pendudukan Israel dan menciptakan perdamaian di Asia Barat.
6. Menyerukan kepada umat Islam se-dunia untuk:
  - a. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas dalam rangka 'izzul Islam wal muslimin.
  - b. Mendukung Cyprus Utara guna mendapatkan hak-hak dan kedaulatan-nya.
  - c. Meningkatkan kualitas dalam segala bidang kehidupan sehingga mampu mandiri dari pengaruh-pengaruh kekuatan-kekuatan dan kebudayaan non Islam yang dapat memperlemah kekuatan dunia Islam.
  - d. Mempersiapkan diri dan memantapkan keyakinan, sikap mental, pemikiran, dan mengembangkan kemampuan penguasaan idalam memasuki dunia baru abad ke-21.

7. Mengharapkan agar OKI, Mukhtar Islam dan Rabithah Alam Islami serta Lembaga Islam Internasional lainnya bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah dan membangun dunia Islam.
8. Muhammadiyah mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang tetap tidak membuka hubungan diplomatic dengan Israel.
9. Muhammadiyah mengharapkan kepada Pemerintah agar menjadi pelopor koordinasi mass media dan informasi di kalangan dunia Islam.
10. Muhammadiyah menghargai usaha-usaha yang dilakukan Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok dan Pemimpin negeri muslim terbesar yang menunjukkan sikap lebih lugas dalam menentang kewenangan-kewenangan Serbia di Bosnia, Rusia dan Chechnya, Israel di Palestina.

## **V. USUL-USUL**

Mukhtar menerima dan menyetujui usul-usul sebagai berikut:

### **A. ORGANISASI**

1. Mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk mengikut sertakan Ketua Ortom dalam Sidang Pleno PP (bila diperlukan).
2. a. Mengusulkan kepada pP Muhammadiyah untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi Majelis.  
b. Mengembangkan Badan Pendidikan Kader menjadi Majelis.  
c. Menggabungkan kembali Majelis-Majelis:
  - Majelis Dikdasmen dan Majelis Kebudayaan.
  - Majelis Pembina Kesehatan dan Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial.
3. Pimpinan Persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengusahakan kantor tetap yang representatif dilengkapi dengan masjid/ mushalla.
4. Tentang AD/ ART.
  - a. Perlu diadakan perubahan AD/ ART.
  - b. Pasal-pasal berikut perlu ditata dalam perubahan:
    - 1) AD Pasal 18 ayat 2  
19 ayat 2 : Musyawarah tiap 5 tahun  
20 ayat 2 : sekali
    - 2) Rakerwil/ Rakerda/ Rakercab sekali setahun
  - c. Rangkap jabatan sebagaimana tersebut pasal 15 ayat (g) hendaknya diatur oleh peraturan persyarikatan yang tidak bertentangan dengan AD/ ART, dan pengesahannya dilakukan oleh Sidang Tanwir.
  - d. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun penjelasan AD & ART serta Qa'idah yang berlaku.
  - e. Anggaran Dasar Pasal 9 ayat 4 perlu kejelasan dan masuk pada ART Pasal 8 ayat (8).
5. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menyempurnakan Qaidah Ortom dan Qaidah Majelis/ Badan/ Lembaga.
6. Memantapkan pelaksanaan qaidah dan peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta pengawasan terhadap semua amal usaha dan badan usaha Muhammadiyah, untuk menghindari penyalahgunaan.
7. Anggota Tanwir Wakil Wilayah masing-masing 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari anggota Pimpinan Wilayah terpilih.

8. Pergantian Pimpinan Persyarikatan tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting agar dilaksanakan paling lambat satu tahun sesudah Muktamar dan penyelenggaraannya dilaksanakan sesudah pergantian Pimpinan Persyarikatan di tingkat atasnya.

**B. KEPEMIMPINAN**

1. Dalam pemilihan Pimpinan Muhammadiyah tidak dibudayakan adanya kampanye terhadap dirinya untuk dipilih menjadi Pimpinan (berdasar Sunnah Rasul).
2. Agar setiap pergantian di semua jenjang supaya diikuti dengan menyelenggarakan penyegaran atau penataran bagi anggota pimpinan, untuk menyamakan komitmen dan visi dalam mengemban amanah kepemimpinan.
3. PP Muhammadiyah hendaknya segera menyelesaikan kasus kepemimpinan di tubuh Tapak Suci Putera Muhammadiyah dengan cara menyelenggarakan Muktamar Tapak Suci yang langsung diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah.

**C. KADERISASI**

Agar Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing menfungsikan BKP-AMM sebagai pembina Angkatan Muda Muhammadiyah.

**D. DANA DAN KEHARTABENDAAN**

1. Agar PP Muhammadiyah beserta Pimpinan Persyarikatan di bawahnya menertibkan dan menyelesaikan masalah pemilikan dan penguasaan tanah milik persyarikatan sampai mendapat sertifikat.
2. Penggalan dana persyarikatan supaya ditingkatkan melalui berbagai usaha seperti:
  - a. Iuran
  - b. Donatur
  - c. Kotak/kaleng
  - d. Gerakan ribuan
  - e. Mendirikan BUMM
3. Bila Dana Abadi belum terkumpul secara memadai, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995 – 2000 mengupayakan agar amal usaha/badan usaha yang telah mampu, menjadi bapak angkat bagi amal usaha/badan usaha yang masih memprihatinkan.
4. Meningkatkan kualitas RAPBM berikut pengawasan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

**E. KEAGAMAAN**

1. Menghadapi era globalisasi dan tuntunan kehidupan abad ke-21 yang semakin kompleks, PP Muhammadiyah perlu menyusun Tafsir Al-Quran Tematik yang merespon dan berkaitan dengan masalah actual. Dan mengharapkan agar PP Muhammadiyah dapat mendirikan Pusat Informasi Dakwah.
2. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah agar memberi tuntunan/menyusun pedoman tentang kewajiban zakat, infak, sadaqah, bagi setiap warga Muhammadiyah.
3. Penyelenggaraan haji di lingkungan Muhammadiyah supaya:
  - a. Ada koordinasi antara Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.



- b. PP Muhammadiyah menyusun buku tuntunan manasik haji sesuai HPT.
4. Mengusulkan kepada PP Muhammadiyah agar menerbitkan kaidah tentang penggunaan jilbab bagi siswa dan karyawan amal usaha Muhammadiyah.

**F. PENERBITAN**

1. PP Muhammadiyah hendaknya meningkatkan kualitas majalah “Suara Muhammadiyah” dan “Berita Resmi Muhammadiyah”, serta menerbitkan Jurnal Ilmiah Keislaman dan keputusan-keputusan Majelis Tarjih yang mudah dicerna oleh warga Muhammadiyah.
2. Agar Majelis Dikdasmen selektif terhadap penerbitan buku-buku bacaan yang berbau syirik.
3. Untuk meningkatkan kualitas pimpinan persyarikatan dari pusat sampai daerah, supaya diadakan perpustakaan yang berbobot dan representatif.
4. Setiap penerbitan Muhammadiyah harus seizing/sepengetahuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Majelis Pustaka.

**G. MASALAH LIBURAN**

1. Hari Jum'at hendaknya ditetapkan sebagai hari libur bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Adapun pelaksanaannya di daerah diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah sesuai kondisi daerah dan untuk kemaslahatan umat.
2. Bulan Ramadhan hendaknya ditetapkan sebagai hari libur sekolah-sekolah Muhammadiyah, tanpa mengurangi hari efektif belajar sesuai dengan kurikulum.

**H. DAKWAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI.**

1. Agar lembaga keuangan Muhammadiyah yang sudah dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPMSDM) disebarluaskan ke seluruh Indonesia dikoordinasikan dengan Majelis terkait.
2. Agar mengembangkan bapak asuh untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak yang berbakat yang tidak mampu sampai ke tingkat perguruan tinggi.
3. Memantapkan kelembagaan baitul maal dan perluasannya sampai ke tingkat daerah.
4. Mengimbau Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memantapkan koordinasi dan mengatur manajemen pengelolaan antar lembaga keuangan masyarakat (LKM) dengan baitul maal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan operasionalnya. Baitul maal dikembangkan sampai ke Cabang/Ranting.
5. Menerbitkan tuntunan manajemen unit-unit usaha di bidang da'wah, social, ekonomi dan kesehatan.

**VI. PELAMAR MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44**

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang melamar ketempatan Muktamar Muhammadiyah ke-44 adalah:

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan)
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (Semarang)

## VII. LAIN-LAIN

Untuk menghindari tumpang tindih antara satu keputusan dengan keputusan lainnya, Muktamar mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 seperlunya, baik redaksi maupun sistematikanya, sepanjang tidak menghilangkan esensinya.

\* \* \*

## PROGRAM MUHAMMADIYAH 1995 - 2000

*Bismillahirrahmanirrahim*

### PENDAHULUAN

Alhamdulillah, dengan ridha dan karunia Allah Tuhan Semesta Alam, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar beraqidah Islamiyah dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dapat melangsungkan gerakannya untuk mencapai tujuan terbentuknya masyarakat utama yang diridhai Allah Subhanahu wata'ala. Beberapa keberhasilan telah dicapai Muhammadiyah sejak kelahirannya pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah / 18 November 1912 Miladiyah yang dirintis oleh pendirinya K. H. Ahmad Dahlan *allahuyyarham* yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin, kader, dan generasi penerusnya sampai saat ini. Perjalanan panjang Muhammadiyah ini tidak lain untuk kejayaan umat dan bangsa sebagai perwujudan beribadah dan menunaikan tugas kekhalifahan sebagaimana pesan Islam bagi kehidupan semesta. Namun, selain keberhasilan dan kemajuan, diakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus terus diperbaiki, diperbaharui, dan diusahakan secara berkesinambungan, sehingga keberadaan dan peran Muhammadiyah semakin besar manfaatnya bagi kehidupan umat dan bangsa, serta menjadi rahmat bagi semesta alam.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dengan Amal Usahanya yang tersebar di seluruh Nusantara akan segera meninggalkan abad ke-20 dan segera memasuki abad ke-21. Melalui Muktamar ke-43 tahun 1995 di Banda Aceh, Muhammadiyah memantapkan niat yang ikhlas dan kuat untuk melangsungkan gerakannya dalam memasuki abad baru yang penuh tantangan bagi kelangsungan hidup umat manusia sedunia itu. Dengan kehadiran abad ke-21, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang diberi predikat oleh masyarakat sebagai dituntut untuk mengantisipasi dan menyusun agenda permasalahan yang akan dihadapi. Sebagaimana diasumsikan oleh para ahli, berbagai permasalahan akan muncul jauh lebih kompleks dan berbeda dibandingkan pada abad sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Pada abad baru itu muncul kecenderungan-kecenderungan baru, yang saling berkaitan dan mempengaruhi segenap dimensi kehidupan. Pada abad baru itu, globalisasi sebagai suatu proses perubahan dan perkembangan dalam tata hubungan dan kehidupan umat manusia yang bersifat mendunia, akan mengalami bentuknya yang semakin nyata dan mempengaruhi corak kehidupan masa depan di berbagai belahan dunia baik di tingkat internasional, regional, nasional, maupun di tingkat lokal.

Muhammadiyah sebagai bagian dari kekuatan umat Islam dan bangsa Indonesia dituntut memahami watak permasalahan abad ke-21 itu, untuk kemudian melakukan antisipasi dan mengelola permasalahan, tantangan, dan kecenderungan baru dalam era baru itu berlandaskan strategi gerakannya. Kemampuan Muhammadiyah dalam mengantisipasi dan mengelola perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan baru kehidupan abad ke-21 itu akan besar pengaruhnya baik bagi kelangsungan gerakan Muhammadiyah sendiri sebagai Gerakan Islam, maupun secara lebih luas dalam memberi saham berharga bagi masa depan umat dan bangsa serta kemaslahatan dunia. Gerakan ke arah pencapaian tujuan dimaksud dilaksanakan secara strategis, sistematis, dan terencana melalui Program Muhammadiyah yang bersifat Jangka Panjang dan Program Lima Tahunan sebagaimana keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-43.

#### A. MASALAH GLOBAL

1. Peradaban umat manusia pada abad ke-21 menghadapi tantangan berat. Pada abad ini globalisasi menunjukkan bentuknya yang paling nyata dan bersifat kompleks. Globalisasi merupakan suatu proses interaksi yang bersifat mendunia dalam kehidupan umat manusia yang muncul secara simultan dan berpengaruh kuat dalam kehidupan ekonomi, politik, social budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan beragama, moralitas, dan sebagainya. Wilayah kehidupan seperti bola-dunia globe) yang menyebabkan setiap orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara relatif bebas dengan melewati batas-batas social dan geografis. Proses global ini merupakan matarantai dari arus besar modernisasi dan industrialisasi yang berlangsung lama dan berlaku di setiap bangsa dalam peradaban dunia modern yang bersifat kompleks sebagai akibat dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada akhir abad ke-20.
2. Globalisasi selain membawa arus besar kemajuan, juga membawa bangsa-bangsa di dunia terintegrasi dalam sebuah arus besar global yang semakin kompetitif dalam seluruh bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan politik, kemampuan hankam, ketahanan budaya, dan sebagainya. Terjadi percepatan dan adopsi kemajuan secara cepat, meluas, dan kumulatif, yang disertai tingkat persaingan yang tinggi, sehingga timbul konflik kepentingan yang semakin keras dan kompleks. Globalisasi sebagai proses social yang kompleks dalam kehidupan umat manusia sejagat, menunjukkan gejala perubahan sebagai berikut:
  - a. Di bidang politik terjadi proses perubahan besar-besaran di berbagai kawasan yang menyebabkan konflik kepentingan yang tinggi dan semakin meluasnya tuntutan akan demokratisasi, hak-hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan social, dan sebagainya di tingkat internasional, regional, nasional, dan local.
  - b. Di bidang ekonomi terjadi globalisasi ekonomi sebagai mata rantai dari transnasionalisasi yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia yang semakin memperkuat dominasi sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan berbagai problem kehidupan umat manusia terutama bagi negara-negara berkembang.
  - c. Di bidang sosial dan budaya terjadi proses interaksi dan ekspansi kebudayaan secara meluas melalui media massa terutama dari bangsa-bangsa yang maju kepada bangsa-bangsa yang sedang berkembang yang ditandai dengan semakin berkembangnya pengaruh budaya yang materialistik (pemujaan materi), sekularistik (pemisahan dunia dan supremasi agama), dan hedonistik (pemujaan kesenangan inderawi) yang melahirkan berbagai bentuk kriminalitas, sadisme,

dan kririr moral yang meluas. Budaya demikian telah mengabaikan nilai-nilai agama dan melahirkan berbagai kecemasan hidup manusia.

- d. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi revolusi perkembangan iptek yang melahirkan kemajuan yang sangat pesat dalam seluruh bidang kehidupan sehingga melahirkan kecenderungan menjadikan iptek sebagai ideologi baru dengan berbagai implikasi social dan moral dalam kehidupan umat manusia sedunia.
3. Globalisasi yang menandai arus besar modernisasi dan industrialisasi tahap lanjut yang lebih kompleks selain membawa kemajuan yang luar biasa juga melahirkan suatu paradoks atau ironi dalam kehidupan umat manusia sejagat. Proses global ini menjungkirbalikkan nilai-nilai yang selama ini mapan, yang pada gilirannya banyak menimbulkan keresahan psikologis dan krisis identitas di banyak kalangan masyarakat, lebih-lebih di lingkungan generasi muda. Terjadi proses kebebasan dan pluralitas (keanekaragaman) dalam tata pergaulan manusia yang demikian kuat dan meluas sehingga dapat menceraabut nilai-nilai moral dan spiritual yang serius yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya dalam bangunan peradaban di masa depan. Dalam proses global ini berkembang pula faham humanisme-sekuler yang mendewakan kekuatan manusia, rasionalitas, individualitas, dan relativitas dengan menafikan suprmasi agama sehingga pada akhirnya telah melahirkan krisis kemanusiaan dalam peradaban umat manusia sejagat. Manusia modern-industrial menjadi subordinasi dalam tekno-struktur, sehingga manusia menjadi kehilangan jatidirinya sebagai makhluk Tuhan yang mulia, merdeka, dan memiliki fitrah hati nurani. Karenanya globalisasi pada sisi kehidupan yang lain menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan akan kelangsungan hidup umat manusia di masa depan. Proses global ini tampaknya semakin memperkeras konflik kepentingan, baik kepentingan ideology, politik, ras, ekonomi, social, maupun kebudayaan, disertai ancaman akan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dan sistem kebudayaan umat manusia dalam semesta kehidupan universal.
4. Dalam kehidupan modern-industrial dengan proses globalisasi yang bersifat mendunia dan multi-aspek ini, Muhammadiyah sebagai bagian dari umat Islam dan kekuatan bangsa Indonesia dituntut untuk melakukan antisipasi atas perubahan-perubahan yang cepat itu (*anticipation of change*) sekaligus mengelola perubahan-perubahan (*management of change*) itu ke arah yang diinginkan dalam strategi gerakannya. Muhammadiyah dituntut untuk memiliki idealisme dalam membangun sosok manusia modern dan tatanan peradaban modern yang islami sebagaimana cita-cita mewujudkan masyarakat umata yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala.

## B. MASALAH DUNIA ISLAM

1. Umat Islam di dunia dewasa ini sekitar separempat dari penduduk dunia dan diperkirakan akan terus bertambah jumlahnya di masa-masa mendatang. Jumlah umat Islam yang relatif besar itu tersebar di 47 negara lebih, sebagian besar tinggal di Asia dan Afrika, sisanya di Eropa, Amerika, dan belahan bumi lainnya. Umat Islam Indonesia menempati urutan pertama dari tujuh negara Dunia Islam (Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Turki, Iran, dan Mesir) yang menampung lebih dari separo jumlah umat Islam dari negara-negara lainnya. Sebagai golongan mayoritas maka persoalan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia hampir dapat

diidentifikasi sebagai masalah umat Islam pula dan akan berpengaruh pula terhadap perkembangan dunia Islam pada umumnya. Umat Islam sebagai bagian dari komunitas dunia baik di tingkat internasional, regional, dan nasional, dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung berada pada suatu situasi yang tercipta oleh globalisasi. Dalam perkembangan global ini dunia Islam masuk dalam proses interaksi secara intensif, baik internal maupun eksternal. Karenanya umat Islam sedunia dituntut mempunyai ketahanan yang cukup kuat untuk menangkai akibat yang tidak dikehendaki dari proses global ini sekaligus mampu mengembangkan tata pergaulan antar kelompok, antar etnik, dan antar bangsa dalam suatu tatanan dunia yang kokoh dan menuju ke arah kemajuan peradaban tanpa terpecah iman dan kepribadiannya.

2. Setelah era perang dingin dan jatuhnya Uni Soviet dari panggung internasional serta terjadinya perubahan-perubahan di berbagai kawasan, secara factual muncul kompetisi yang tajam dan perbedaan kepentingan antara barat dan dunia Islam, yang sebenarnya tidak diharapkan menjurus ke arah perang dingin bentuk baru. Karena itu dunia Islam dituntut melakukan konsolidasi internal pada tingkat internasional, regional, nasional, bahkan local, sekaligus menciptakan usaha dan strategi yang lebih canggih untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih tinggi di berbagai bidang kehidupan sehingga mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain.

Kenyataan masih menunjukkan bahwa dunia Islam belum menjadi satu kekuatan yang menyatu secara kokoh di hadapan kekuatan-kekuatan lain dalam pergaulan internasional. Kerawanan ini disebabkan oleh persepsi yang masih berbeda-beda di antara berbagai negara Islam yang masih berbeda-beda. Politik luar negeri sebagian dunia Islam masih menggantungkan diri pada beberapa negara Barat, sebagian ingin menegakkan kemandirian, dan sebagian lagi masih mencari bentuk baru karena pernah terjatuh dalam pangkuan Uni Soviet. Politik masing-masing negara juga berbeda-beda dalam menciptakan dan menegakkan stabilitas politik nasional. Selain itu, secara umum kemampuan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan beberapa bidang kehidupan lainnya diakui masih di bawah standar dari keunggulan kemajuan bangsa-bangsa dan masyarakat dunia lainnya.

3. Secara factual di kalangan dunia Islam mulai muncul perkembangan baru ke arah yang lebih baik. Secara pelan namun pasti, berbagai negara muslim mulai bangkit memperlihatkan kemampuan domestiknya yang mandiri dan mulai sulit didikte oleh kehendak Barat. Secara luas muncul kesadaran intelektual yang mendalam di berbagai negara-negara muslim. Banyak negeri-negeri muslim yang ekonominya makin kuat, baik karena modal minyaknya maupun karena pertumbuhan ekonominya yang baik. Kesadaran kerjasama antar dunia Islam semakin baik dibandingkan masa lalu. Dengan demikian dibalik gejala kerawanan dan ketertinggalan, terdapat gejala positif yang menjanjikan bagi masa depan dunia Islam. Karenanya, dunia Islam dituntut terus menerus untuk membangun dirinya di tengah kekuatan-kekuatan dunia internasional di era globalisasi saat ini.
4. Ketika globalisasi semakin merambah dalam kehidupan setiap negara, termasuk di Indonesia, secara spesifik umat Islam di negeri ini masih dihadapkan pada persoalan pokok baik yang bersifat internal di dalam tubuh umat Islam maupun yang terkait dengan kehidupan nasional pada umumnya. Masalah yang dihadapi umat Islam tersebut antara lain:

- a. Masih tertinggalnya umat Islam terutama dalam bidang ekonomi di tengah dominasi kekuatan ekonomi dan politik non-Islami.
- b. Posisi dan peran umat Islam yang masih belum maksimal dan strategis dalam konstelasi kehidupan politik nasional dalam kepentingan kehidupan bangsa dan negara yang demokratis dan berkeadilan social dalam negara berkedaulatan rakyat.
- c. Adanya gerakan “pemurtadan” dengan memanfaatkan kondisi kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam.
- d. Tuntutan meningkatkan partisipasi aktif umat Islam di dalam pembangunan dalam kepentingan mempercepat proses pembangunan yang berkeadilan dan berakar kerakyatan sebagaimana yang digariskan oleh GBHN yang bertumpu pada cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
- e. Tuntutan mengaktualisasikan pembangunan yang berwawasan keindonesiaan dan kerakyatan yang memiliki landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wata’ala.
- f. Tuntutan mengupayakan tumbuh suburnya iklim berfikir keagamaan sebagai prasyarat untuk teraktualisasikannya nilai-nilai dan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Tuntutan menghidup-suburkan suasana kehidupan religius yang mengutamakan kebersamaan/kesetiakawanan social dan tegaknya sendi-sendi kehidupan moral dalam segenap lingkungan masyarakat.
- h. Tuntutan menciptakan iklim beragama yang damai, terhindar dari perpecahan dan konflik, serta terbebas dari tindakan-tindakan ekstrem yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan umat Islam khususnya dan bangsa pada umumnya.
- i. Tuntutan meningkatkan posisi umat Islam dalam persaingan memasuki lapangan kerja, termasuk di dalamnya memajukan pendidikan dan kemampuan profesional umat Islam.
- j. Tuntutan mengaktifkan lembaga Islam yang sudah ada dan melakukan diversifikasi kelembagaan untuk mewadahi berbagai aspirasi dan kepentingan umat Islam yang semakin beraneka ragam dengan semakin memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang dinamis.

### C. MASALAH NASIONAL

1. Bangsa Indonesia selain telah mencapai berbagai kemajuan dalam proses pembangunan yang dilaksanakannya sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru pada tahap Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dewasa ini masih dihadapkan pada masalah-masalah nasional. Masalah yang pertama adalah gelombang keterbukaan atau demokratisasi di dalam negeri yang akan terus berkembang dan menimbulkan berbagai konsekuensi. Demokratisasi merupakan proses kunci bagi usaha penegakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat yang dalam aktualisasinya selain menuntut kesamaan persepsi dalam tataran kehidupan kebangsaan juga melahirkan berbagai ragam kepentingan antar kelompok dan kekuatan bangsa. Tuntutan akan demokratisasi bersamaan dengan tuntutan-tuntutan lainnya yang dipandang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni hak-hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan social, kehidupan beragama, dan sebagainya.



2. Masalah nasional selanjutnya adalah masalah ekonomi yang terkait dengan tingkat pertumbuhan, pemerataan, lingkungan hidup, stabilitas politik nasional, dan aspek-aspek lainnya yang saling kait-mengait. Sebuah negara yang income per kapitanya masih rendah atau menengah, tidak akan kuat menahan goncangan politik baik di tingkat nasional lebih-lebih internasional. Selain itu, kehidupan tingkat pertumbuhan ekonomi masih dapat dipertahankan secara konstan atau mungkin meningkat, jika tidak disertai dengan pemerataan yang serius dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan rakyat secara meluas, maka akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ketahanan bangsa. Akan lebih pelik jika kedua masalah tersebut diperburuk oleh masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan seperti masalah pengusuran, perburuhan, dan sebagainya, sehingga menimbulkan akumulasi masalah social secara saling berkaitan. Masalah lain yang bersifat mikro adalah masalah liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi sebagaimana telah diputuskan dalam konferensi APEC merupakan kebijakan yang tidak terelakkan karena mulai tahun 2003 mendatang Indonesia harus memasuki era AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang dilanjutkan pada tahun 2020 dalam skema liberalisasi perdagangan yang lebih luas di Asia Pasifik. Pengaruh liberalisasi ekonomi akan berdampak luas bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan pendidikan, politik, dan budaya. Setiap kebijakan ekonomi nasional akan berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas.
3. Masalah domestik lain yang pada masa akan datang diduga masih merupakan agenda nasional adalah masalah "*rule of law*" yang berkaitan dengan kehidupan politik dan ekonomi. Kepastian hukum diharapkan dapat semakin diciptakan dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Selain itu "*rule of law*" juga diharapkan semakin dikembangkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, memecahkan masalah kesenjangan social ekonomi, dan perlindungan hak-hak rakyat dan pencari keadilan. Sesuai dengan asas negara hukum diharapkan bahwa jaminan kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan dapat tercipta dengan baik.
4. Masalah lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah berkaitan dengan tantangan membangun kualitas dan martabat manusia Indonesia seutuhnya dalam memasuki situasi global yang semakin penuh persaingan. Di tengah tuntutan pengembangan kualitas sumberdaya manusia, diharapkan bahwa keunggulan kualitas manusia Indonesia tidak semata-mata diukur dari kekuatan fisik-ekonomi, wawasan pemikiran dan kemampuan teknis, tetapi juga bertumpu pada kekuatan iman dan taqwa serta kepribadian atau akhlak. Bersamaan dengan itu, di tengah arus globalisasi yang semakin menyebar, terjadi pula perubahan nilai dan perilaku serta masuknya pengaruh budaya luar yang negatif, sehingga lambat laun akan memperlemah ketahanan bangsa. Jika pengaruh negatif itu terus berlangsung tanpa kendali maka masyarakat Indonesia akan mengalami krisis moral dan spiritual yang serius.
5. Secara spesifik terdapat beberapa agenda operasional dalam kehidupan nasional, yang memerlukan pelaksanaan dan pembahasan terus menerus antara lain:
  - a. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dituntut pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk usaha mengendalikan penyimpangan yang terjadi, sehingga makin mendekati pada tercapainya cita-cita nasional.

- b. Dalam proses pembangunan dituntut konsistensi pelaksanaannya terutama yang secara langsung dapat melibatkan dan dinikmati rakyat banyak dalam konteks pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang tahap kedua dituntut untuk lebih konsisten dalam mengembangkan wawasan kemanusiaan dan kerakyatan serta menghindari terjadinya eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem.
  - c. Dalam bidang ekonomi tuntutan akan pemerataan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, makin meningkat. Pembangunan yang lebih berorientasi untuk mengangkat martabat golongan lemah harus lebih diprioritaskan, agar proses dan hasil pembangunan benar-benar memihak pada semua warga negara, sehingga keadilan ekonomi seperti dimaksud pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi kenyataan.
  - d. Dalam kehidupan politik terdapat beberapa aspek yang perlu memperoleh penekanan secara lebih serius dan sistemik antara lain: **(1)** Memberikan kesempatan yang leluasa bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara di dalam negara berkedaulatan rakyat, **(2)** Memberikan peran yang proporsional bagi pemerintah sebagai aparat pelayan masyarakat dan penjaga kesinambungan pembangunan, untuk mengembangkan kreativitas dan dinamika masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri, **(3)** Mengembangkan budaya politik partisipatif, egaliter/ demokratik dan terbuka, **(4)** Mendorong infra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk dapat berperan aktif sebagai kekuatan yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat dan sekaligus yang mampu mendidik kesadaran dan kepekaan politik rakyat dan sekaligus dapat melakukan kontrol efektif terhadap proses kekuasaan.
6. Masalah nasional dalam aspek social budaya adalah masalah integritas kepribadian nasional yang masih tergolong lemah dalam menegakkan sendi-sendi moral (akhlak) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti ditunjukkan oleh perilaku korupsi, pola hidup mewah, mentalitas menerabas (pragmatis), masalah disiplin nasional, dan sebagainya. Masalah social budaya lainnya menyangkut kepribadian nasional dalam kaitan pengaruh-pengaruh negatif budaya asing yang dibawa oleh proses globalisasi, industri pariwisata, dan lain-lain. Demikian halnya dengan tuntutan menciptakan suasana damai dan adanya solidaritas social dalam kehidupan kolektif. Sedangkan dalam bidang pendidikan diharapkan tercipta keseimbangan dalam membina sumberdaya manusia Indonesia selain memiliki kehandalan fisik, intelektual, dan keahlian/ ketrampilan/profesionalitas, juga mempunyai keimanan, ketaqwaan, dan kepribadian yang luhur sesuai dengan idealisasi manusia Indonesia seutuhnya.
7. Dalam menghadapi masalah-masalah nasional itu, umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya dituntut untuk memposisikan diri dan memainkan peran yang optimal dan strategis sehingga mampu menjadi penyangga utama kehidupan bangsa. Umat Islam, khususnya Muhammadiyah, dituntut keberaniannya untuk memposisikan dan memerankan diri dalam proses perubahan social yang terjadi di Indonesia.

- a. Dalam kehidupan politik, Muhammadiyah dituntut berposisi dan berperan secara tepat di antara tiga sikap, yakni sikap masa bodoh dengan perubahan (a-politik), sikap yang terlalu menjaga kepentingan status-quo, dan sikap yang berlebihan dalam posisi dan peran yang tepat, yakni menjalankan *high politics*, dalam wujud memberikan kepedulian agar perubahan yang terjadi tetap dibimbing oleh akhlaqul karimah, membawa ke arah tujuan yang luhur, dan mengantarkan kepada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Muhammadiyah dituntut secara sungguh-sungguh memelihara kemandirian dan kebebasan serta tidak dicampuri pihak-pihak luar yang merusak independensi Persyarikatan sebagaimana sikap dasar khittah Muhammadiyah. Dalam menghadapi tuntutan demokratisasi di tanah air, Muhammadiyah sesuai dengan khittahnya dituntut berperan aktif dalam upaya terus menegakkan semangat dan implementasi demokrasi di Indonesia bersama-sama dengan ABRI dan kekuatan-kekuatan orde baru lainnya dalam suatu kemitraan yang harmonis. Dengan cara seperti itulah, maka di masa mendatang umat Islam, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, diharapkan terus memperoleh peran politik dan kesempatan yang lebih efektif dan konstruktif dalam proses pembangunan nasional dan penciptaan perdamaian dunia.
- b. Dalam aspek ekonomi. Umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya dituntut untuk ikut aktif memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan social, dan terciptanya keadilan ekonomi bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Muhammadiyah bersama kekuatan umat Islam lainnya perlu memelihara ketahanan dari kemungkinan dampak negatif liberalisasi ekonomi dunia dalam proses globalisasi dan era perdagangan APEC. Hal yang lebih aktif lagi, umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah dituntut untuk tampil sebagai pelaku kekuatan ekonomi mandiri, sehingga di masa depan mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi mandiri, sehingga di masa depan mampu bersaing dengan kekuatan lain dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik.
- c. Dalam kehidupan social budaya, umat Islam sebagai mayoritas dan Muhammadiyah pada khususnya dituntut untuk menampilkan budaya tandingan yang konstruktif, yang menjadi contoh (uswah hasanah) dalam bersikap dan berperilaku serta tegaknya nilai-nilai luhur dalam bangunan masyarakat berbudaya sesuai dengan dengan bilai-nilai Islam dan kepribadian bangsa yang luhur.

#### D. PERMASALAHAN MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah telah menunjukkan prestasi dan peranan yang cukup besar dalam pembaharuan kehidupan umat Islam khususnya maupun dalam pembinaan kehidupan masyarakat Indonesia sehingga Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan Islam modern dan pembaharuan yang terbesar di dunia. Keberhasilan Muhammadiyah antara lain dalam pembaharuan pendidikan Islam dengan mengembalikan para sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah dengan mengembangkan ijtihad, sikap dan pemikiran yang apresiatif terhadap kemajuan modernisasi pendidikan, modernisasi gerakan Islam melalui pengembangan manajemen dan organisasi modern, dan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan masyarakat melalui gerakan amal usahanya di

bidang pendidikan, kesejahteraan umat, pelayanan sosial, membangun sarana dan prasarana fisik, dan upaya-upaya dakwah lainnya, baik yang bersifat *bi-lisanil-qaul* maupun *bi-lisani hal*.

Prestasi dan peran yang demikian besar itu menunjukkan bahwa arah dan misi gerakan Muhammadiyah adalah relevan dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam sebagai perwujudan dari pemahaman dan pengamalan Islam di era kehidupan modern. Sebagai Gerakan Islam dan Gerakan Dahwah Muhammadiyah memiliki misi dan arah yang benar dan peluang yang cukup besar dalam menjawab tantangan dan permasalahan umat, masyarakat, dan bangsa di tengah kehidupan dunia modern dewasa ini bahkan untuk masa-masa mendatang, dengan terus memperbaharui langkah gerakannya sesuai dengan pemahaman dari pengamalan Islam yang diyakininya.

Sejak Muktamar ke-41 tahun 1985 di Surakarta, perkembangan Muhammadiyah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang lebih berarti yang dapat dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut pada periode-periode mendatang. Di antara kemajuan-kemajuan yang berarti yang dapat dikategorikan sebagai perkembangan yang cukup positif antara lain:

1. Dalam perjuangan cita-cita ditandai dengan semakin meningkatnya semangat dan tekad dari warga dan pimpinan Muhammadiyah di hampir seluruh tingkatan untuk membawa Muhammadiyah ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan lebih berkualitas disertai langkah-langkah kongkret guna mewujudkannya.
2. Dalam pemikiran ditandai dengan semakin berkembangnya ide-ide, konsep-konsep, dan forum-forum kajian, dalam kuantitas dan kualitas yang jauh lebih meningkat, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan Muhammadiyah selain sebagai gerakan amal, juga gerakan pemikiran dan kebudayaan, sebagai perwujudan dari peran dan keberadaannya sebagai Gerakan Islam.
3. Dalam Gerakan Amal Usaha ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) Amal Usaha Persyarikatan dengan kecenderungan adanya upaya-upaya serius untuk mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya.
4. Dalam bidang organisasi ditandai dengan semakin meningkatnya upaya-upaya konsolidasi, selain makin meningkatnya pelaksanaan program Persyarikatan yang diwujudkan oleh Majelis/Badan/Lembaga dan organisasi otonomnya.
5. Dari segi kepemimpinan, terutama di tingkat Majelis, keikutsertaan kaum intelektual dalam jumlah yang besar telah pula menambah semaraknya aktivitas pemikiran dalam segala kegiatan Muhammadiyah.
6. Dalam pengembangan masyarakat selain yang menjadi bidang garap Amal Usaha Muhammadiyah, ditandai dengan perintisan dan pengembangan program peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah di pedesaan dan daerah suku terasing masyarakat transmigrasi, dan sebagainya.
7. Makin meningkatnya aktivitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu basis bagi pengadaan sumberdaya manusia maupun bagi pengembangan pemikiran Islam sesuai hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
8. Kemajuan-kemajuan lainnya seperti bidang sarana dan prasarana fisik sebagai faktor penunjang gerakan Muhammadiyah.

Perkembangan yang positif tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan jika Muhammadiyah benar-benar memahami kekuatan dirinya dan mengelola serta

mengembangkan kekuatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan langkah gerakannya di masa depan. Kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang positif yang dimiliki Muhammadiyah dan dapat dikembangkan lebih optimal tersebut antara lain:

1. Umat Islam sebagai golongan mayoritas yang memiliki komitmen untuk menegakkan kehidupan yang sesuai dengan agama Islam.
2. Faham dan pengamalan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan akal fikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan (aqidah, ibadah, akhlaq, muamalat duniawiyah) yang merupakan kekuatan utama Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
3. Muqaddimah Anggaran Dasar, kepribadian, Khittah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan Sejarah Pergerakan Muhammadiyah merupakan prinsip perjuangan yang mengontrol dan memberikan ciri khas/identitas pergerakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
4. Anggota Muhammadiyah yang tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air dengan jumlah, latar belakang sosial, pendidikan, profesi, dan jiwa serta semangat dakwah yang relatif dapat diandalkan serta kerelaan beramal dan berkorban merupakan sumber daya utama bagi terlaksananya usaha-usaha dan terwujudnya tujuan Muhammadiyah.
5. Tenaga-tenaga muda Muhammadiyah yang memiliki integritas dan wawasan serta profesi di berbagai bidang merupakan potensi penggerak Muhammadiyah.
6. Pengalaman berorganisasi selama tiga perempat abad lebih yang merupakan modal berharga dalam menggerakkan dan mengamalkan Islam melalui wadah yang terorganisasikan berdasar prinsip-prinsip manajemen modern guna melangsungkan usaha Muhammadiyah di tengah tuntutan perkembangan zaman yang makin modern.
7. Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah berupa lembaga pendidikan (Tamnan Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah lebih 12.000 buah dan Perguruan Tinggi 67 buah), Rumah Sakit dan Balai Kesehatan, Panti Asuhan, dan lain-lain merupakan potensi kongkret Muhammadiyah yang dapat dikembangkan lebih lanjut baik kuantitas maupun kualitas.
8. Hubungan yang baik dengan dan simpati dari berbagai pihak terhadap Muhammadiyah merupakan kekuatan sosial yang sangat mendukung dan dibutuhkan bagi keberhasilan usaha-usaha Muhammadiyah.
9. Fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki Muhammadiyah yang telatif memadai sebagai faktor pendukung yang mempermudah gerakan Muhammadiyah, meskipun masih perlu peningkatan baik kuantitas maupun kualitas pengelolaannya. Namun selain kemajuan dan perkembangan positif yang dicapai dan peluang positif yang dapat dikembangkan itu, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh Muhammadiyah antara lain:
  - 1) Belum dikembangkannya secara optimal dan terprogram potensi dan usaha-usaha untuk menyusun konsep-konsep dan aplikasi Ad-Dinul Islami dalam berbagai aspeknya, yang dapat memperlemah hakekat Muhammadiyah sebagai gerakan pemikiran.
  - 2) Belum memasyarakatnya prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah secara konsisten dan dinamis, sehingga banyak dijumpai pergerakan pemahaman

tentang Muhammadiyah yang mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan ber-Muhammadiyah.

- 3) Berbagai pemikiran yang berkembang tampak masih belum terintegrasi sebagai pemikiran Muhammadiyah, sehingga jika proses integrasi ini tidak tercipta akan menimbulkan polarisasi pemikiran di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah.
- 4) Berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah, seperti sumberdaya para intelektual dan praktisi, potensi kader dan angkatan muda Muhammadiyah dan potensi-potensi keahlian dari pimpinan dan warga Muhammadiyah, belum dikembangkan secara optimal dan terpadu.
- 5) Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal sumber daya kader Muhammadiyah yang sebenarnya potensial, sebagai aset penggerak Muhammadiyah di masa depan.
- 6) Berbagai potensi dana yang dimiliki Muhammadiyah terutama pada unit-unit Amal Usaha agar dikelola secara profesional sehingga menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Persyarikatan.
- 7) Pengembangan kualitas Amal Usaha Muhammadiyah masih kalah cepat dibandingkan perkembangan kuantitas, di samping dalam batas tertentu perkembangan Amal Usaha tersebut sering kurang terkendali.
- 8) Belum dikembangkannya manajemen yang bersifat gerakan yang mampu memadukan nilai/norma, misi dan cita-cita Muhammadiyah ke dalam aplikasi manajemen modern dengan ciri-cirinya antara lain efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan sebagainya baik secara operasional maupun secara strategis.
- 9) Berkembangnya konflik-konflik internal dan interes-interes pribadi dalam kehidupan ber-Muhammadiyah dapat menjadi faktor penghambat bagi kelangsungan gerak Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya.
- 10) Perbedaan visi di antara para pimpinan dalam menghadapi berbagai masalah besar, sering menghambat pengambilan keputusan yang memerlukan kecepatan.
- 11) Mulai munculnya gejala kemerosotan akhlaq dan pelunturan komitmen kepemimpinan di sementara kalangan Pimpinan Persyarikatan.
- 12) Belum dikembangkannya secara terprogram dan optimal hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan-kepentingan gerak Muhammadiyah yang bersifat strategis.
- 13) Belum meratanya penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana fisik organisasi di seluruh tingkatan pimpinan Persyarikatan, selain masih dijumpainya praktek-praktek yang kurang mengoptimalkan fungsi dan fasilitas, sarana, dan prasarana tersebut di sementara tingkatan Persyarikatan untuk mendukung kepentingan-kepentingan yang memiliki nilai strategis di masa datang.

#### **E. PENGEMBANGAN PEMIKIRAN**

Pada abad ke-21 masyarakat Muslim Indonesia akan benar-benar memasuki kehidupan era industrial. Ketika era globalisasi ilmu dan budaya memasuki kesadaran penuh bangsa Indonesia, maka batas-batas konvensional antar bangsa, negara, budaya akan semakin kabur dan tidak lagi sejelas seperti yang masih kita rasakan sekarang ini.



Saat itu, mentalitas dan cara berpikir keagamaan era agraris berhadapan dan berdialog langsung dengan mentalitas dan cara berpikir keagamaan era industrial. Perubahan peta wilayah perkotaan dan industrialisasi akan mengubah pola tatanan ekonomi, kehidupan sosial dan mentalitas sosial-keagamaan pedesaan era agraris. Mega-mega proyek industri tersebut sedikit banyak akan berakibat pada rancang bangun pemikiran keagamaan era agraris, etos keilmuan, nilai-nilai ekonomi yang dianut dan kehidupan sosial-kemasyarakatan secara lebih luas. Karena itu, menghadapi perkembangan baru yang bersifat kompleks itu, diperlukan pengembangan pemikiran Muhammadiyah sebagai acuan konsepsional bagi pengembangan gerakan Muhammadiyah. Pengembangan pemikiran Muhammadiyah itu meliputi beberapa aspek berikut.

**a. Pemikiran keagamaan**

Kehidupan modern-industrial di abad ke-21 membawa pengaruh terhadap corak kehidupan keagamaan. Isu spiritualitas keagamaan digemari oleh generasi muda yang sudah mulai terkena eksekusi perubahan sosial yang tercermin dalam budaya hedonistik-materialistik. Dalam merespon problema modernitas, banyak corak pemikiran keagamaan kontemporer yang muncul ke permukaan seperti paham modernisme, fundamentalisme, mahdiisme, tradisionalisme, dan lain-lain. Masing-masing pemikiran saling mencermati dan saling melakukan kritik. Respon keagamaan yang bersifat pluralistik-majemuk terhadap modernitas tersebut perlu dicermati oleh Muhammadiyah. Karena itu, aspek pemikiran keagamaan perlu lebih serius ditekuni oleh warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah tidak boleh lepas tangan dari problema modernitas dalam hubungannya dengan kehidupan spiritualitas keagamaan yang demikian.

**b. Ilmu dan teknologi**

Dalam kehidupan modern-industrial mungkin sekali muncul slogan berakhirnya era pergesekan ideologi (*the end of ideology*), tetapi tidak mungkin mengibarkan slogan *the end of science* (berakhirnya era perkembangan ilmu pengetahuan). Ilmu pengetahuan akan terus semakin berkembang, seolah-olah tanpa mengenal batas akhir. Normativitas al-Qur'an sendiri secara eksplisit menyatakan demikian. Maka Muhammadiyah dituntut untuk lebih mengembangkan aktivitas dalam bidang pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi sebagai program unggulan. Selain itu, perlu dikembangkan etos keilmuan di kalangan warga Persyarikatan, sehingga memberi akses bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan Islami.

**c. Pengembangan Basis Ekonomi**

Di kalangan warga Persyarikatan perlu dikembangkan pandangan hidup keagamaan yang menumbuhkan semangat *enterpreunership* (kewiraswastaan). Gerakan sosial keagamaan yang berjalan tanpa dibarengi dan diperkokoh oleh basis kekuatan ekonomi, tampaknya akan mengalami ketimpangan. Jika pada masa-masa awal basis-basis kekuatan ekonomi warga persyarikatan sebahagian terpusat pada industri kecil (kerajinan batik), maka sekarang jiwa kewiraswastaan itu telah bergeser ke wilayah pengelolaan lembaga pendidikan. Masalahnya sering terletak pada pengelolaan sumber ekonomi yang belum maksimal. Selain itu, perlu dikembangkan diversifikasi usaha persyarikatan dalam mendorong warganya untuk terjun dalam bidang ekonomi, dan mengembangkan usaha-usaha bisnis melalui badan usaha milik Persyarikatan.

**d. Gerakan Sosial Kemasyarakatan**

Keberhasilan pembangunan di Tanah Air ini dalam segala sektor kehidupan ternyata



memunculkan persoalan dan isu-isu sosial baru. Isu-isu baru seperti keadilan, hak asasi manusia, hak-hak pekerja dan mustadh'afin, konglomerasi, oligopoli, hak-hak konsumen, isu-isu kewanitaan, kesadaran hukum, kesadaran lingkungan, disiplin nasional, pemerintahan yang bersih, pengentasan kemiskinan, merupakan agenda ijtihad sosial-keagamaan bagi Muhammadiyah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah perlu peka dan responsif terhadap berbagai isu-isu yang relatif baru tersebut. Maka diperlukan ijtihad baru dalam aspek sosial kemasyarakatan yang bersifat inkonvensional itu.

**e. PTM sebagai Basis Gerakan Keilmuan/Pemikiran**

Kendatipun pada awalnya memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang sehingga diberikan predikat sebagai gerakan modernis, dalam perkembangan selanjutnya karena kegiatannya lebih terpusat pada amal-amal nyata, maka garapan Muhammadiyah di bidang pemikiran Islam belum begitu menonjol. Muhammadiyah sampai saat ini belum memiliki laboratorium khusus untuk keperluan strategis itu. Kini dengan berkembangnya PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah), sekalipun kondisinya belum mapan, Muhammadiyah memiliki peluang untuk menjadikan beberapa PTM sebagai dapur pemikiran dan pusat kajian bagi pengembangan pemikiran Islam yang menjadi misi gerakan intelektual Muhammadiyah menghadapi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan modern-industrial abad ke-21. Program ini dilaksanakan dalam jangka panjang untuk melahirkan wacana intelektualisme Islam dengan kualitas standar universal sesuai dengan pesan al-Qur'an sebagai rahmat bagi alam semesta, yang memiliki nilai teoritis tinggi sekaligus mempunyai nilai praksis dalam memecahkan persoalan-persoalan bagi kehidupan masyarakat modern-industrial abad ke-21.

\* \* \*

## **RINCIAN PROGRAM**

Program Muhammadiyah periode 1995–2000 merupakan kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya yang merupakan bagian pelaksanaan Kebijakan Program Jangka Panjang.

Program Muhammadiyah periode 1995–2000 hasil keputusan Muktamar ke-43 di Banda Aceh pada hakekatnya merupakan garis-garis besar program umum sebagai pernyataan kehendak warga Muhammadiyah yang menjadi haluan gerak persyarikatan Muhammadiyah seluruh tingkatan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Program Muhammadiyah periode 1995–2000 terdiri dari berbagai bidang. Dalam pelaksanaan program tersebut ditempuh prinsip kemaslahatan dan keseimbangan gerak berbagai bidang sehingga keseluruhan program persyarikatan dapat berjalan. Di samping itu, agar tujuan berbagai program tersebut dapat terwujud, perlu mempertimbangkan berbagai strategi dalam mencapainya dengan cara yang fleksibel atau luwes.

Untuk melaksanakan program periode 1995–2000 ditetapkan tujuan, prioritas dan jenis program sebagai berikut.

**Tujuan Program:**

Peningkatan konsolidasi gerakan dan peningkatan kualitas gerakan dakwah dalam era industrialisasi dan globalisasi dengan memperluas sasaran dan sarana dakwah.

### **Arah Program:**

Program Muhammadiyah periode 1995-2000 diarahkan pada empat hal sebagai berikut:

1. Pengembangan pemikiran dan wawasan.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
3. Peningkatan kualitas dan pengembangan amal usaha sebagai sarana dakwah.
4. Perluasan sasaran dakwah.

### **Jenis Program:**

Dengan merujuk pada berbagai pokok pikiran yang disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43, Program Muhammadiyah periode 1995-2000 disusun menurut empat bidang utama sebagai berikut.

1. Pengembangan manajemen Muhammadiyah.
2. Pendidikan, perkaderan, dan pengembangan sumberdaya manusia.
3. Dakwah pengembangan masyarakat, pembinaan kesejahteraan sosial & ekonomi.
4. Peningkatan dana Muhammadiyah.

## **I. PENGEMBANGAN MANAJEMEN MUHAMMADIYAH**

### **Latar Belakang**

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah s.w.t. Dalam melaksanakan misinya, Muhammadiyah tidak berada dalam suasana kehampaan, melainkan berada dalam suatu lingkungan tertentu.

Sebagai suatu gerakan, Muhammadiyah berjuang untuk mempengaruhi lingkungan yang mengitarinya ke arah cita-cita dan tujuannya. Tetapi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa faktor lingkungan itu juga memberikan pengaruh bagi penyelenggaraan misi Muhammadiyah. Di sini akan terjadi proses saling mempengaruhi antara ide dan misi dakwah Muhammadiyah dengan lingkungan nyata yang dihadapi Muhammadiyah.

Faktor lingkungan yang dihadapi Muhammadiyah terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal meliputi antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan internal antara lain, berupa kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan pimpinan, interaksi antar anggota pimpinan, antara pimpinan dengan anggota, antara anggota dengan sesamanya, antara pimpinan persyarikatan dengan pimpinan amal usaha, kelemahan Sumber Daya Manusia serta keterbatasan sumber dana, dan sebagainya.

Salah satu sifat yang melekat pada faktor lingkungan adalah sifat dinamis, yaitu selalu mengalami perubahan. Proses perubahan itu akan berlangsung dengan amat cepatnya, terutama menjelang abad XXI, antara lain sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perjuangan Muhammadiyah akan senantiasa akurat dan efektif apabila dalam merumuskan kebijaksanaan dan strategi selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan faktor lingkungan yang multidimensional dan bersifat dinamis itu. Di samping itu, organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah akan dapat selalu eksis dan tahan uji apabila organisasi dan manajemen Muhammadiyah bersifat adaptatif, kenyal dan mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri sesuai dengan pengaruh lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan itu.

Di dalam upaya melakukan perubahan dan pengembangan organisasi dan manajemen persyarikatan, pendekatan yang tepat adalah pendekatan “proaktif”, tidak “reaktif”. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengembangkan suatu program perubahan yang direncanakan. Dengan demikian, rancangan perubahan disusun berdasarkan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada faktor lingkungan eksternal dan internal.

### **Konsep Dasar Pengembangan**

#### **1. Perencanaan**

Suatu mekanisme kerja yang perlu dikembangkan dalam Muhammadiyah adalah penyusunan rencana kerja sebelum suatu program dilaksanakan. Di dalam kerangka itu – dengan mempertimbangkan situasi lingkungan yang beragam yang dihadapi oleh PDM/ Daerah – penyusunan rencana kegiatan dalam rangka penjabaran hasil muktamar didesentralisasikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

#### **2. Pengorganisasian**

Perampingan unit kerja horisontal, baik dalam bentuk majelis, badan maupun lembaga sangat perlu dilakukan, dengan memperhatikan pengalaman periode 1990-1995. Dalam konteks unit kerja vertikal, prioritas perlu diberikan kepada fungsionalisasi serta dinamisasi cabang dan ranting. Di samping itu fungsionalisasi dan dinamisasi organisasi otonom perlu mendapat perhatian, terutama dalam kaitannya dengan gugus kerja vertikal intern ortom.

#### **3. Penggerakan**

Pengembangan jaringan informasi, baik ke dalam maupun ke luar perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Pengembangan ini menyangkut dua hal penting, yaitu pengembangan teknologi informasi serta pemanfaatan hubungan interpersonal dalam ujud pertemuan intern dan antar pimpinan persyarikatan dengan seluruh badan pembantunya.

#### **4. Pengendalian**

Memfungsikan pengawasan melekat pada setiap pimpinan persyarikatan maupun amal usaha perlu memperoleh perhatian penting, di samping pengembangan sistem pengendalian itu sendiri.

#### **5. Sekretariat**

Dua hal memerlukan perhatian utama, yaitu, pertama, mengefektifkan tim sekretariat yang dipimpin sekretaris eksekutif, dan kedua, memfungsikan kantor sebagai tempat kegiatan sekaligus “markas gerakan” dan “pusat kegiatan”.

### **Rincian Program**

1. Merumuskan Sistem Perencanaan Muhammadiyah, sekurang-kurangnya meliputi enam hal berikut:
  - a. Penelaahan program persyarikatan yang diputuskan Muktamar Muhammadiyah ke-43.
  - b. Penetapan tujuan, sasaran, dan target.
  - c. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.
  - d. Perumusan alternatif kegiatan sekaligus skala prioritas.
  - e. Penjabaran program kerja yang meliputi rincian tujuan, langkah-langkah pelaksanaan, jadwal kegiatan, tempat, dan hubungan antar kegiatan.
  - f. Penganggaran

2. Merumuskan Sistem Anggaran Muhammadiyah yang baku dengan muatan yang disesuaikan dengan program.
3. Menentukan rencana proyek unggulan di semua peringkat organisasi.
4. Menyusun struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a. Badan pembantu yang melaksanakan tugas pokok diberi nama “majelis”.
  - b. Badan pembantu yang melaksanakan tugas penunjang diberi nama “badan” atau “lembaga”.
  - c. Dalam pembentukan badan pembantu pimpinan persyarikatan dipertimbangkan hasil guna dan daya gunanya.
  - d. Meningkatkan peran dan fungsi ortom serta mempertegas kedudukannya dalam menunjang kegiatan persyarikatan.
  - e. Memperhatikan asas teritorial.
  - f. Memperjelas hubungan organisatoris antara persyarikatan dengan badan pembantunya dan antara persyarikatan dan amal usaha.
5. Memfungsikan dan mendinamisasikan seluruh jajaran organisasi, terutama cabang dan ranting.
6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen di tingkat pusat maupun wilayah, baik berdiri sendiri atau pun menyatu dengan sekretariat.
7. Meningkatkan kualitas media cetak yang telah dimiliki persyarikatan, serta mengupayakan pengembangan media cetak baru serta media elektronik sebagai alat informasi dan komunikasi organisasi.
8. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan persyarikatan dengan seluruh badan pembantunya.
9. Mengefektifkan pelaksanaan sistem pengendalian persyarikatan Muhammadiyah.
10. Proporsionalisasi dan optimalisasi sekretaris eksekutif.
11. Menyusun format Data Base Muhammadiyah yang menjadi standar bagi semua jajaran persyarikatan.
12. Menyelenggarakan berbagai pelatihan yang menopang pelaksanaan fungsi tim sekretariat maupun sekretaris eksekutif Muhammadiyah di semua peringkat.

## **II. PENDIDIKAN, PERKADERAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

### **Latar Belakang**

Lembaga amal usaha pendidikan, merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan penyiapan sumberdaya manusia. Arah dan substansi gerakan dakwah Muhammadiyah di masa depan, tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keharusan rerwujudnya sumberdaya manusia yang mampu menyelaraskan diri, mengantisipasi dan mengelola dinamika perubahan masyarakat yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Melihat demikian luasnya ruang dakwah – meliputi seluruh aspek kehidupan – dan demikian luasnya tantangan dinamika perubahan masyarakat di masa depan, maka prioritas gerakan perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan (keterkaitan antara modal, pengalaman, dan sumberdaya yang tersedia) dengan keterbatasan dan pilihan yang strategis sasaran yang akan dicapai.

Atas dasar asumsi di atas, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar perlu mengkonsentrasikan diri dalam tiga gerakan:

1. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pemikiran
2. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pengembangan Masyarakat, dan
3. Muhammadiyah sebagai Gerakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).  
Inti dari poin ke-3 (pengembangan SDM), tidak lain adalah pendidikan.

Fungsi lembaga amal usaha pendidikan dalam Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari tujuan perkaderan. Sedangkan pendidikan merupakan inti dari upaya peningkatan kualitas SDM. Secara demikian, sesungguhnya pendidikan dan perkaderan tidak boleh lepas dari strategi perencanaan, pendayagunaan dan evaluasi sumberdaya manusia dalam persyarikatan. Permasalahannya adalah, masing-masing program – pendidikan dan perkaderan dan peningkatan SDM – masih menunjukkan ketidakterkaitan satu sama lain. Bahkan yang terjadi adalah pemisahan fungsi praksis dari masing-masing program tersebut.

Kasus yang bisa kita lihat secara nyata adalah di lembaga pendidikan Muhammadiyah di semua level, masih memerlukan penyelenggaraan program perkaderan. Bahkan kurikulum dan metoda yang digunakan sama persis sebagaimana program perkaderan yang diselenggarakan bagi angkatan muda atau warga persyarikatan yang tidak mengalami pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Program perkaderan semacam ini menjadi lebih nampak tidak efisien jika “sibghah”, baik dari pendidikan maupun perkaderan itu tidak atau kurang menghasilkan kualitas sumberdaya persyarikatan yang memadai.

Kenyataan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah pembenahan dari tingkat folosofi, perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan evaluasi sumberdaya manusia persyarikatan yang dalam bahasa istilah kita kenal dengan kader.

Di antara langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain dengan menegaskan spesifikasi perkaderan di lembaga pendidikan dan perkaderan di organisasi otonom (Ortom). Dilihat dari latar belakang historis perkaderan melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah dimaksudkan untuk menyiapkan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin kader-kader gerakan. Artinya, kader yang tanpa keterkaitan dengan struktur organisasi Muhammadiyah sekalipun, namun tetap mau dan mampu menjalankan fungsi sebagai kader gerakan dakwah.

Sedangkan Ortom, dilihat dari mekanisme permusyawaratan, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab kepengurusannya lebih mencerminkan penyiapan kader pimpinan. Sejauh ini belum ada upaya terencana untuk secara relatif menempatkan fungsi organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah sebagai lahan perkaderan pimpinan. Filosofi Ortom sebagai perkaderan pimpinan Muhammadiyah, tidak menutup kemungkinan adanya rekrutmen di luar Ortom, atas dasar alasan strategis, kualitas intelektual, ideologis dan akses serta peran fungsionalnya.

## **Konsep Dasar Pengembangan**

### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Dalam aspek konseptual-filosofik, merumuskan (kembali) ide dasar dan filosofi pendidikan Muhammadiyah, agar pendidikan Muhammadiyah mampu mengantisipasi berbagai perubahan masyarakat dan perkembangan peradaban.
- b. Dalam aspek kebijakan pengembangan dan pengelolaan, melakukan reorientasi wawasan dan kebijakan perencanaan dan pengelolaan amal usaha meliputi:

perubahan orientasi dari status menuju ke kompetensi, kuantitatif menuju kualitatif, kekinian menuju ke depan, input menuju output, kepemimpinan individu menuju sistem, ketergantungan menuju kemandirian, materi/fisik menuju nilai.

Di samping itu perencanaan dan pengelolaan pendidikan Muhammadiyah perlu dikembangkan dengan wawasan keunggulan dengan memacu kreativitas di segala bidang, seperti ilmu pengetahuan, kewirausahaan dan seni, sehingga dapat meningkatkan daya saing umat dan bangsa dalam percaturan nasional maupun internasional.

## 2. Bidang Perkaderan

- a. Peningkatan serta pembinaan ideologi dan kepemimpinan, dengan pengertian meningkatkan upaya penanaman nilai, pengembangan cara berpikir, dan peningkatan kemampuan dalam dua aspek tersebut.
- b. Penataan kelembagaan dalam kaitannya dengan upaya perkaderan, meliputi perluasan peran BPK, baik dalam hubungannya dengan persyarikatan maupun yang berkaitan dengan amal usaha pendidikan.

## 3. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia

- a. Mengembangkan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas SDM dengan menempatkan manusia tidak semata-mata sebagai faktor produksi, melainkan sebagai pribadi yang utuh, yang memiliki keunggulan: iman dan taqwa, moral dan akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, jiwa kewirasastaan, dan keterampilan teknis.  
Dalam pengembangan SDM yang demikian, aspek kepribadian tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pengembangan kualitas manusia profesional yang terampil secara teknis.
- b. Mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, khususnya amal usaha pendidikan, sehingga dapat berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

## Rincian Program

### 1. Bidang Pendidikan

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah (PDMM) dilakukan dengan empat tema pokok, yaitu pengembangan kualitas, pengembangan keunggulan, pengembangan kekhasan program, dan pengembangan kelembagaan yang mandiri. Empat tema pokok ini diimplementasikan dalam proses belajar-mengajar, yaitu dengan mengarahkan proses belajar-mengajar agar secara terpadu merupakan aktivitas alih pengetahuan, alih metoda, dan alih nilai.
- b. Menata kembali kurikulum PDMM pada semua jenjang dan jenis sekolah Muhammadiyah yang meliputi pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai kekhasan sekolah Muhammadiyah, spesifikasi tiap wilayah sesuai kebutuhan dan kondisi setempat, pendidikan budaya dan seni yang bernafaskan Islam.
- c. Menyusun "Peta Nasional Pendidikan Muhammadiyah" yang memuat spesifikasi tiap wilayah/daerah, agar didapatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Merespons secara positif pengembangan "sekolah unggulan", dengan tetap mengembangkan kekhasan pendidikan Muhammadiyah, terutama dalam pengembangan kurikulum dan proses belajar-mengajar, sehingga misi

- pendidikan Muhammadiyah tetap terlaksana.
- e. Dalam pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), penyelenggaraan pendidikan diorientasikan pada peningkatan kompetensi lulusan yang plastis dan antisipatif terhadap tuntutan dan kebutuhan masa depan, yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi menghadapi perubahan, kompetensi kecendekiaan, dan kompetensi iman dan taqwa.
  - f. Mengarahkan program PTM untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masa depan.
  - g. Qaidah pendidikan dasar dan menengah serta qaidah PTM perlu disempurnakan, sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
  - h. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan qaidah pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi perlu ditingkatkan.
  - i. Meningkatkan dan memantapkan kerjasama antara Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti.
  - j. Mengupayakan bea siswa Muhammadiyah bagi para siswa dan atau mahasiswa yang berprestasi.
  - k. Melalui amal usaha pendidikan meningkatkan kualitas kader-kader ulama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
  - l. Mengembangkan berbagai lembaga pendidikan khusus seperti pesantren dan madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, serta taman kanak-kanak Al-Qur'an. Penanganan pondok pesantren dan madrasah menjadi tanggungjawab dan wewenang dari majelis Dikdasmen.

## **2. Bidang Perkaderan**

- a. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Pendidikan Kader (NPK) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkaderan dan pendayagunaan kader dalam lembaga-lembaga amal usaha maupun dalam persyarikatan.
- b. Memperluas peran BPK dalam kaitannya dengan lembaga amal usaha pendidikan, khususnya sekolah/pesantren kader, dari tingkat perencanaan hingga evaluasi agar efisiensi, efektivitas dan keterpaduan antara lembaga amal usaha pendidikan dengan mekanisme perkaderan persyarikatan dapat sejalan.
- c. Meningkatkan kedudukan struktural Badan Pendidikan Kader (BPK) menjadi Majelis.
- d. Melakukan upaya perkaderan formal yang utuh dan terpadu antar berbagai ortom sebagai pilot proyek model perkaderan Muhammadiyah.
- e. Mengembangkan perkaderan fungsional (misalnya muballigh, jurnalis, penulis, dan sebagainya) di lembaga amal usaha pendidikan, terutama PTM.
- f. Memanfaatkan apresiasi seni dan budaya yang sesuai dengan syariat Islam serta wahana olah raga dalam upaya mengembangkan jangkauan wilayah perkaderan di kalangan pemuda/remaja.
- g. Merumuskan kurikulum perkaderan Muhammadiyah berdasarkan skala usia dan jenjang pendidikan.
- h. Menyenggarakan kajian dan pengembangan wawasan anggota pimpinan persyarikatan yang berkaitan dengan masalah-masalah serta tantangan yang dihadapi oleh kader Muhammadiyah baik yang bersifat eksternal maupun internal.
- i. Membina hubungan integral antar berbagai potensi dalam persyarikatan, khususnya yang tergabung dalam ortom, dan demikian juga potensi yang ada di luar persyarikatan. Program ini diharapkan mampu menjadi kekuatan moral



untuk menumbuhkan sikap dan wawasan integratif dalam persyarikatan maupun lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah.

- j. Mengusahakan terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana perkaderan yang representatif guna mendukung kelancaran perkaderan. Secara khusus membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kader (Pusdiklat) di tingkat pusat maupun wilayah.
- k. Meningkatkan fungsi dan peranan AMM sebagai wahana pendidikan kader.
- l. Meningkatkan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai wahana pendidikan kader. Pelaksanaan perkaderan formal IRM (di sekolah-sekolah Muhammadiyah) dan IMM (di PTM) secara terencana dan teratur menjadi tanggungjawab pimpinan sekolah dan atau pimpinan PTM.
- m. Menggairahkan putera-puteri warga Muhammadiyah agar mau berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Muhammadiyah.
- n. Rekrutmen pimpinan amal usaha Muhammadiyah hendaknya mengharuskan adanya persyaratan riwayat perkaderan formal.

### 3. Bidang Peningkatan SDM

- a. Merintis dan menyelenggarakan program pelatihan, pendidikan vokasional dan pendidikan non-formal lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan penguasaan manajemen, teknologi dan keterampilan tertentu warga persyarikatan. Upaya peningkatan kualitas SDM ini perlu memperhatikan kompetensi iman dan taqwa (imtaq), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akhlaq al-karimah, amal ilmiah dan ilmu amaliah, serta istiqamah dalam memperjuangkan dakwah Islam.
- b. Menjadikan PTM - yang merupakan lembaga amal usaha pendidikan Muhammadiyah yang strategis - sebagai pilot proyek peningkatan SDM.
- c. Mendirikan Pusat Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia, terutama di PTM yang mampu.

## III. DAKWAH, PENGEMBANGAN MASYARAKAT, PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL & EKONOMI

### Latar Belakang

Masyarakat industri abad ke-21 terutama setelah Indonesia memasuki mekanisme pasar (perdagangan) bebas di samping membawa kemajuan juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan budaya yang luas akibat ketidaksiapan mental dan fisik. Tidak seluruh gerak pembangunan dan peradaban berada dalam panduan cita-cita Islam karena pemikiran Islam kurang menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, peradaban dan Iptek modern.

Beberapa persoalan dakwah yang perlu diperhatikan adalah: (1) tumbuhnya kawasan perumahan dan industri baru; (2) berkembangnya perilaku dan tata sosial-budaya yang belum ditemukan rujukannya dalam pemikiran fiqh klasik; (3) munculnya kelompok sosial strategis baru (klas menengah, generasi muda terdidik, profesional muda, pengusaha, politisi, birokrat, dan intelektual); (4) anak keburu gede & keburu pinter; (5) perburuha yang meluas; (6) meluasnya penyimpangan sosial dan keagamaan (sempalan).

Memahami berbagai persoalan strategis di atas perlu memanfaatkan cara-cara kerja (metodologis) Iptek modern. Hasil analisisnya perlu dijadikan dasar perumusan kebijakan gerakan dakwah yang melibatkan seluruh kelompok strategis dengan memanfaatkan jasa Iptek, tradisi, sumber daya amal, manusia dan persyarikatan bagi

kepentingan kemanusiaan (kesejahteraan) yang universal.

Untuk maksud di atas perlu dikembangkan pemikiran Islam yang dapat merumuskan bagaimana hidup modern dan maju dengan rasa keimanan (religiositas) yang tinggi. Pemikiran Islam perlu memperluas kajian lebih dari sekedar hukum formil syari'at (fiqh) tetapi hakikat dan pesan moral di dalamnya. Tujuannya untuk mengungkap nilai moral (akhlak) sosial-ekonomi, budaya, politik dan Iptek sebagai bagian besar ajaran Islam sekaligus sebagai pengkayaan spiritual peradaban modern. Demikian pula soal kajian mengenai perilaku manusia modern, perburuhan serta ekologi. Pengajian dan khutbah-khutbah jum'at yang melibatkan puluhan juta umat setiap minggu dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberi bimbingan ekonomi, sosial, budaya, politik dan Iptek. Hal ini memerlukan wawasan keagamaan dan dakwah yang menempatkan budaya dan Iptek sebagai media pengembangan, pemeliharaan dan pemantapan iman (religiositas) serta sebagai jalan mendekati Tuhan.

### **Konsep Dasar Pengembangan**

Dakwah Pengembangan Masyarakat & Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi umat adalah pengembangan strategi dakwah sebagai pengendali perubahan seluruh sektor dan aspek kehidupan. Karena itu, dakwah adalah tahapan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan Iptek sesuai kondisi riil masyarakat dalam bentuk pelayanan bimbingan hidup modern dan penyelesaian persoalan yang timbul. Dengan demikian dakwah persyarikatan dapat ditempatkan sebagai pengendali perubahan kehidupan sehingga semakin manusiawi, sejahtera, dinamis dan berkembang sebagai ekspresi iman, islam dan ihsan dalam peradaban duniawi yang terus berubah dan berkembang.

Dakwah Pengembangan Masyarakat & Pembinaan Kesejahteraan Sosial Ekonomi diarahkan pada sembilan hal berikut ini.

1. Berkembangnya sumberdaya insani menuju terbentuknya sumberdaya manusia yang memiliki sosok sebagai abdi dan khalifah yang menguasai Iptek dan Imtaq sebagai suatu kesatuan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media dakwah, baik media cetak maupun media elektronik.
3. Terbentuknya sistem manajemen dakwah yang mampu menjawab kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan manajemen.
4. Terbentuknya jamaah-jamaah yang mampu menampung aspirasi dan tuntutan profesi serta kebutuhan masyarakat sehingga dakwah persyarikatan mampu menampung tuntutan masyarakat pada abad XXI.
5. tertibnya status hukum dan dapat dioptimalisasikan pemanfaatan aset (harta benda) persyarikatan, serta menambah jumlah serta kualitasnya sesuai dengan perkembangan tata lingkungan.
6. Terhimpun serta terbentuknya jamaah wiraswastawan menuju terciptanya potensi konkrit dalam bidang ekonomi dan tumbuhnya etika Islam dalam berwiraswasta.
7. Terbentuknya unit-unit usaha di bidang ekonomi milik Muhammadiyah baik dalam bentuk milik persyarikatan penuh, atau dimiliki persyarikatan bersama-sama jamaah.
8. Terbentuknya "jamaah pengajian pembangunan" yang dapat dijadikan ikhwan dalam hubungan kemitraan dengan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
9. Optimalisasi dan perluasan amal usaha (kegiatan) di dalam sub-sub sektor pembangunan menuju revitalisasi ranting.

## **Rincian Program**

### **1. Bidang Dakwah**

#### **a. Pengembangan media dakwah**

- 1) Pemanfaatan maksimal seluruh media komunikasi modern seperti teve, komputer, rasio, telepon, buku, majalah, dan koran.
- 2) Pengalihan tradisi dan budaya masyarakat untuk diarahkan sesuai ajaran Islam.
- 3) Komputerisasi jaringan dakwah dan pendataan di setiap PDM.
- 4) Pengembangan jaringan dakwah secara terlembaga setiap PDM.
- 5) Pelibatan penyuluh pembangunan, kesehatan, pertanian & perkebunan, industri dalam kegiatan khutbah dan pengajian.
- 6) Pelatihan pemanfaatan media komunikasi modern bagi muballigh di tingkat daerah, wilayah, dan nasional masing-masing 50-100 muballigh setiap tahun.
- 7) Pelatihan komputerisasi dan pengembangan jaringan dakwah tingkat daerah, wilayah, dan nasional dua kali selama periode 1995-2000.

#### **b. Pengembangan kemampuan professional muballigh**

- 1) Pelatihan penelitian dan perencanaan dakwah daerah, wilayah, dan nasional bagi muballigh dan pimpinan persyarikatan dan amal usaha setiap tahun.
- 2) Pelatihan kemampuan menyusun peta dakwah daerah, wilayah, dan nasional setiap tahun.
- 3) Pelatihan keterampilan menulis: artikel, cerpen, buku, novel, drama & skenario film serta penyutradaraan bagi muballigh dan pimpinan persyarikatan di wilayah dan nasional minimal satu kali selama periode 1995-2000.
- 4) Pelatihan jurnalistik dakwah bagi muballigh dan pimpinan persyarikatan tingkat wilayah dan nasional minimal satu kali selama periode 1995-2000.
- 5) Pelatihan pemanfaatan komputer, teve, radiop, dan telepon bagi kegiatan dakwah tingkat wilayah dan nasional.
- 6) Pelatihan kemampuan mengelola seminar dan diskusi bagi muballigh dan pimpinan persyarikatan tingkat wilayah dan nasional minimal satu kali selama periode 1995-2000.
- 7) Pengembangan lembaga konsultasi pelayanan krisis sosial di tiap daerah dan wilayah.
- 8) Peningkatan mutu intelektual dan pendidikan muballigh melalui sekolah terbuka dengan memanfaatkan jaringan Masjid dan Pengajian bekerjasama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah minimal bagi muballigh daerah dan wilayah.
- 9) Peningkatan mutu kehidupan ekonomi muballigh dan pimpinan persyarikatan.
- 10) Pengembangan jaringan informasi dakwah di setiap daerah, wilayah, dan nasional dalam peningkatan konsolidasi dan mobilisasi kegiatan muballigh.

#### **c. Pengembangan materi dan fungsi khutbah dan pengajian**

- 1) Peningkatan fungsi khutbah & pengajian sebagai media pendidikan luar sekolah dalam kerangka wajar 9 tahun.

- 2) Pengembangan materi khutbah dan pengajian sebagai usaha meningkatkan kemampuan baca-tulis Al-Qur'an dan latin bagi jamaah.
  - 3) Sistematisasi materi khutbah dan pengajian dengan kurikulum dan silabi terprogram untuk setiap cabang.
  - 4) Penerbitan buku paket khutbah dan pengajian sesuai kurikulum dan silabi terprogram masing-masing sebanyak 50.000 ex. (2.c).
  - 5) Memperbanyak kajian hakikat syari'ah dan akhlak sosial, ekonomi, politik dan budaya serta Iptek melalui pelatihan profesi muballigh dan pimpinan persyarikatan tingkat daerah, wilayah, dan nasional.
- d. Pengembangan peran jama'ah masjid dan pengajian**
- 1) Pengorganisasian jama'ah masjid dan pengajian sebagai kelompok ekonomi dan belajar setiap masjid dan pengajian di tiap cabang dengan proyek percontohan cabang di kedudukan pimpinan daerah.
  - 2) Pengembangan kelompok bimbingan belajar bagi jamaah masjid dan pengajian usia muda guna mempertinggi daya kompetitif pendidikan dan kaderisasi muballigh bekerja sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dengan proyek percontohan di kedudukan pimpinan daerah.
  - 3) Bimbingan perwakafan dan sertifikasi wakaf dan hak milik setiap masjid, mushalla dan surau serta langgar.
- e. Pengembangan kekayaan spiritual**
- 1) Pengembangan pusat pelayanan dakwah krisis sosial di setiap daerah.
  - 2) Pengembangan wisata dakwah dalam meningkatkan budaya jamaah dan silaturahmi tokoh ulama bagi setiap daerah sekaligus sebagai bimbingan keagamaan dan pelatihan muballigh.
  - 3) Pengembangan jama'ah bimbingan ritual keimanan (religiositas) kelompok strategis seperti shalatul lail / tahajjud di kota-kota besar.
  - 4) Bimbingan hidup dengan mental dan akhlak yang bersih, jujur dan ikhlas, semangat berkorban dan tolong-menolong.
- 2. Bidang Kesejahteraan Sosial & Ekonomi**
- a. Bimbingan peningkatan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, pengolahan limbah beserta pemasarannya bagi jama'ah pengajian dan masjid dengan persontohan di setiap daerah.
  - b. Kursus-kursus keterampilan sesuai lapangan kerja bekerjasama dengan instansi terkait, perusahaan manufaktur dan jasa di setiap kota besar.
  - c. Pengembangan pendidikan, perlindungan dan penyediaan pramuwisma dan TKI di tiap wilayah.
  - d. Pembentukan pusat pelayanan pemasaran dan modal usaha di setiap daerah dan wilayah.
  - e. Pendirian BUMM pertanian, perikanan, jasa dan manufaktur bekerjasama dengan amal usaha, tahap pertama di tingkat nasional.
  - f. Pengembangan forum komunikasi pengusaha di tiap daerah dan wilayah.
  - g. Menyusun sistem ekonomi dan manajemen sesuai visi dakwah.
  - h. Jaminan asuransi kecelakaan dan kesehatan muballigh dan pimpinan persyarikatan di setiap daerah dan wilayah.
  - i. Jaminan transportasi kerja muballigh daerah dan wilayah.
  - j. Pencangkakan kerja muballigh dalam amal usaha pendidikan dan kesehatan.
  - k. Perlindungan masyarakat lapisan bawah dan pekerja kasar seperti buruh akibat

- perluasan kawasan industri melalui pengembangan hidup jama'ah terutama di lingkungan buruh.
- l. Penyuluhan dan pelatihan sistem inventarisasi/ administrasi wakaf harta benda Muhammadiyah untuk optimalisasi pemanfaatan demi tercapainya tujuan persyarikatan, khususnya dalam bidang ekonomi/ sosial.
  - m. Melaksanakan inventarisasi pengusaha Muhammadiyah di Cabang, Daerah, dan Wilayah serta mengadakan pelatihan dan memberi dukungan moral kepada pengusaha Muhammadiyah untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan.
  - n. Membentuk balai kesejahteraan sosial (BAKESOS) pada sekarang-kurangnya satu daerah di setiap wilayah, sebagai proyek percontohan penggalakan kepedulian ummat dalam rangkaian usaha revitalisasi cabang dan ranting.
  - o. Pemasyarakatan program pembinaan kesehatan ummat (BINKESMAT) melalui penyuluhan hidup sehat.
  - p. Meningkatkan jumlah dan mutu amal usaha kesehatan.
  - q. Membentuk pusat-pusat informasi dan konsultasi keluarga sakinah dan masalah kependudukan serta keluarga sejahtera pada umumnya.
  - r. Meratakan pembentukan Majelis Wakaf hingga terbentuk di semua daerah dan meningkatkan kemampuan kerja dengan melibatkan tenaga profesional, baik langsung sebagai anggota pimpinan maupun sebagai konsultan/ dewan pakar.
  - s. Memperbanyak buku tuntunan serta penyelenggaraan lokakarya-lokakarya untuk meningkatkan profesionalisme pengelola amal usaha sosial.
  - t. Menyiapkan kader-kader Muhammadiyah pada daerah-daerah yang berpotensi untuk diterjunkan sebagai tenaga sukarela, baik atas nama pribadi atau pun resmi mewakili Muhammadiyah, dalam program-program swadaya masyarakat, program LKMD, IDT, KUD dan sebagainya.

#### IV. PENINGKATAN DANA MUHAMMADIYAH

##### Latar Belakang

Untuk merealisasikan maksud dan tujuannya (AD ps. 3) melaksanakan usaha-usahnya (AD psl 4), Muhammadiyah memerlukan dana yang besar, antara lain untuk:

1. Pengembangan dan pembinaan organisasi seperti biaya operasional, biaya pembinaan wilayah, pembangunan kantor dengan peralatannya (meubelair, alat-alat kantor, komputer, telepon dan sebagainya), jaringan komunikasi (antar propinsi, daerah, cabang dan ranting), peningkatan sarana transportasi.
2. Pengembangan dan pembinaan SDM dengan meningkatkan kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan maupun pada bidang-bidang yang lain, juga untuk menyekolahkan, mengkursuskan kader-kader potensial dan berbakat. Untuk itu diperlukan adanya prasarana dan sarana perkaderan dan pelatihan seperti pembangunan pusat-pusat latihan, pengembangan organisasi BPK, penerbitan berbagai buku jurnal, dan lain-lain.
3. Memberi bantuan bagi daerah-daerah dan lembaga-lembaga yang lemah seperti daerah-daerah di Maluku, NTT, NTB, Irian Jaya, dan sebagainya. Di daerah-daerah tersebut perlu dibangun sekolah, madrasah, rumah sakit, dan lain-lain. Demikian pula untuk membangun sekolah-sekolah dan madrasah yang belum berkembang.
4. Untuk pembinaan anggota. Seperti penerbitan buku-buku bimbingan keagamaan (pedoman shalat, zakat, puasa, haji, korban, ibadah yaumiyah, tuntunan akidah, tuntunan akhlak, tuntunan keluarga sakinah, tuntunan pemeliharaan janazah,

tuntunan silaturahmi dsb.), buku-buku bimbingan kesejahteraan, pedoman bertani lahan kecil, pedoman berternak, manajemen usaha keluarga dsb.

### **Konsep Dasar Pengembangan**

1. Intensifikasi iuran anggota, dengan selalu memberikan bimbingan cara penarikan, pengelolaan/pengadministrasian dan pendataan.
2. Intensifikasi iuran amal usaha yang mampu, dengan jalan pembuatan tuntunan, juklak, pengadministrasian serta pemanfaatan.
3. Intensifikasi zakat, infak, shadaqah, dengan jalan pembuatan berbagai prosur, leaflet, booklet, pedoman pengorganisasian, pembinaan, sosialisasi, manajemen dan sebagainya.
4. Pembentukan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dalam berbagai bidang seperti: pengadaan barang-barang keperluan rumah sakit, keperluan sekolah, keperluan percetakan, jasa wisata dan lain-lain.

### **Rincian Program**

1. Menfungsikan Lembaga Baitul Mal Muhammadiyah dalam penggalan, pengelolaan dan pengembangan dana di bawah koordinasi bendahara persyarikatan.
2. Mewajibkan kepada pimpinan amal usaha dan pimpinan badan usaha milik Muhammadiyah untuk menghimpun zakat dan infaq amal usaha serta badan usaha, infaq karyawan, infaq guru, infaq murid, infaq mahasiswa, dan sebagainya.
3. Menyusun sistem penggalan, pengelolaan dan pengembangan dana persyarikatan.
4. Pemberian bimbingan dengan berbagai kegiatan, tuntis, juklak dan sebagainya.
5. Pengembangan etos kerja, pelatihan kewirausahaan, manajemen, latihan praktis.
6. Pembentukan jaringan informasi dan jaringan kerja bisnis.
7. Pembentukan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).
8. Melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam rangka melakukan pengembangan BUMM.

\* \* \*

## **KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44 6 - 9 R. AKHIR 1421 / 8 - 11 JULI 2000 DI JAKARTA**

---

Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, pada tanggal 6-9 Rabi'ul Akhir 1421 H atau tanggal 8-11 Juli 2000 M, setelah mengikuti dan mencermati dengan seksama:

1. Pidato iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H.A. Syafii Maarif, pada upacara Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-44, di Stadion Utama Senayan Jakarta.
2. Sambutan Presiden Republik Indonesia, K. H. Abdurrahman Wahid pada upacara Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-44.
3. Pengajian Akbar oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
4. Visi dan Langkah Muhammadiyah ke depan yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
5. Laporan-laporan:
  - a. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995-2000 yang disampaikan oleh Dr. H. A. Watik Pratiknya.
  - b. Laporan Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1995-2000 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1995-2000, Drs. H. Sugeng Pamudji, M.Si, Akt.
6. Beberapa Rancangan dan Prasaran yang telah disiapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai bahan materi Muktamar ke-44 yang terdiri dari:
  - a. Rancangan Program Muhammadiyah Periode 2000-2005
  - b. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah
  - c. Prasaran Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah
7. Hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000-2005
8. Tanggapan, pendapat, pembahasan, dan saran-usul para Peserta Muktamar yang disampaikan baik dalam Sidang-sidang Komisi maupun Sidang Pleno;

### **MEMUTUSKAN**

#### **I. PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 2000--2005.**

- A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000-2005 sebanyak 13 (tiga belas) orang dari hasil pemilihan 39 (tiga puluh sembilan) calon yang diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan jumlah suara, sebagai berikut:

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | Prof. Dr. H.Ahmad Syafii Ma'arif        | (1282) |
| 2. | Dr. H. M. Din Syamsuddin                | (1048) |
| 3. | Prof. Drs. H. Abdul Malik Fadjar, M.Sc. | (1041) |
| 4. | Drs. H. A.Rosyad Sholeh                 | (1034) |
| 5. | Dr. H.Yahya A.Muhaimin                  | (941)  |
| 6. | Prof. Dr.H. M.Amin Abdullah             | (940)  |
| 7. | Prof. H. Ismail Sunny, SH., MCL.        | (921)  |
| 8. | Prof. Dr. H. Mohammad Dawam Rahardjo    | (910)  |



9. Dr. H.Ahmad Watik Pratiknya (803)
  10. H. M. Muchlas Abror (788)
  11. Prof. Drs. H.Asjmuni Abdurrahman (769)
  12. Drs. H. Haedar Nashir, M.Si (748)
  13. Drs. H. M. Sukriyanto AR, M.Hum (706)
- B. Menetapkan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000-2005

## **II. LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 1995-2000**

Menerima laporan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 1995-2000 dengan beberapa catatan seperti tersebut dalam lampiran 1.

## **III. PROGRAM MUHAMMADIYAH TAHUN 2000-2005**

Menerima Rancangan Program Muhammadiyah tahun 2000-2005 menjadi Program Muhammadiyah tahun 2000-2005 dengan perbaikan dan penyempurnaan seperti tersebut dalam lampiran II.

## **IV. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH**

Mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah menjadi Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru untuk menggantikan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang lama (keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985) dengan perbaikan dan penyempurnaan seperti tersebut dalam lampiran III.

## **V. PEDOMAN KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH**

Menerima prasaran/konsep Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah menjadi dan untuk Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah dengan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana seperti tersebut dalam lampiran IV.

## **VI. REKOMENDASI MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44**

Muktamar Muhammadiyah ke-44 menyampaikan pokok-pokok pikiran dan mengeluarkan rekomendasi seperti tersebut dalam lampiran V.

Jakarta, 09 Rabi' ul Akhir 1421 H  
11 Juli 2000 M

Pimpinan Sidang

Prof. Dr.H.Ahmad Syafii Maarif

## Lampiran I

## TENTANG LAPORAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KEPADA MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-44

**A. Tentang Laporan**

1. Komisi A mengusulkan kembali agar format laporan disusun lebih sistematis rinci dalam bentuk matrik. Hal ini sesuai keputusan Muktamar ke-43 di Banda Aceh.
2. Laporan hasil pemeriksaan keuangan hendaknya disertakan menjadi satu dengan Laporan Pimpinan Pusat.
3. Agar dapat dipelajari secara cermat, seyogyanya laporan PP Muhammadiyah disampaikan lebih awal, paling tidak sebulan sebelum Muktamar dimulai.

**B. Usul/Saran****1. Bidang Organisasi**

- 1.1. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan masyarakat (diberlakukannya Otonomi Daerah) perlu dilakukan pendelegasian sebagian wewenang PP kepada Wilayah atau Daerah. Fungsi PP mengarah *stering* sedang eselon dibawahnya *rowing*.
- 1.2. Tentang rangkap jabatan, pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan dilarang merangkap jabatan dengan BUMM.
- 1.3. Muhammadiyah perlu mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung misi Muhammadiyah, misalnya kelompok profesi: petani, nelayan, wartawan, guru dll.
- 1.4. Untuk menghindari duplikasi dalam Amal Usaha Muhammadiyah, PP perlu menertibkan yayasan yang tumbuh dalam Persyarikatan.

**2. Pengembangan kaderisasi**

- 2.1. Untuk mendapatkan kader di bidang ulama, perlu diupayakan agar setiap wilayah memiliki pendidikan pondok pesantren unggulan, sebagai program lanjutan.
- 2.2. Agar supaya potensi SDM Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka tokoh-tokoh/sesepuh yang tidak langsung berkiprah secara struktural perlu diwadahi dalam satu wadah tertentu seperti badan penasehat/badan pertimbangan.

**3. Pendidikan**

- 3.1. Dalam bidang pendidikan serta pengembangan ilmu dan teknologi, Muhammadiyah telah mempunyai banyak perguruan tinggi yang mencakup hampir semua disiplin ilmu dan teknologi. Dengan mobilisasi, Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan dapat menghasilkan kader-kader yang berpendidikan tinggi serta karya-karya ilmu dan teknologi yang signifikan, islami, untuk menjawab tantangan masa depan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Mobilisasi perguruan tinggi ini dapat menjadi sumber bertanya bagi Persyarikatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu PTM dapat menjadi pusat pembelajaran masyarakat (*centre of learning society*)

yang dapat dijadikan wahana untuk penerapan belajar seumur hidup (*life long education*) yang diajarkan oleh Islam. Untuk itu Muhammadiyah harus mengubah paradigma pendidikannya dari paradigma lama ke paradigma baru. Diharapkan para pakar pendidikan Muhammadiyah mampu merumuskan paradigma dimaksud.

- 3.2. Untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan seni para pelajar Muhammadiyah perlu diprogramkan secara terpadu dan periodik kegiatan porseni perguruan Muhammadiyah.

#### 4. Ekonomi

- 4.1. Dalam bidang ekonomi Muhammadiyah harus segera melangkah menjadi gerakan ekonomi di samping sebagai gerakan amal dan ilmu. Usaha perintisan gerakan KATAM oleh Majelis Ekonomi harus mendapat dukungan yang serius dari seluruh anggota. Gerakan ekonomi ini harus terus ditingkatkan sehingga Muhammadiyah mempunyai usaha--usaha ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan hidup persyarikatan dan anggotanya. Kekuatan ekonomi harus mampu menjadi tulang punggung tegaknya persyarikatan.
- 4.2. Baitul Maal Muhammadiyah perlu dikembangkan tidak hanya pada tingkat pusat tapi juga pada tingkat wilayah/ daerah.

#### 5. Pemikiran/Keagamaan.

- 5.1. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid kini terlihat geraknya telah menjadi rutinitas, tidak banyak pemikiran-pemikiran kreatif baru yang dihasilkan. Di era Millenium ketiga kita menghadapi keadaan dunia yang sangat berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Kita menghadapi dunia terbuka tanpa batas negara, perkembangan iptek yang berubah dengan cepat, dan di Indonesia kita menghadapi perubahan-perubahan karena gerakan reformasi untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid harus mampu keluar dari pola rutinitas dan siap menyusun konsep-konsep dan memberikan kontribusi yang berarti dalam menghadapi tantangan tersebut.
- 5.2. Di samping upaya untuk menyelesaikan masalah internal, Muhammadiyah perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran dan karya-karya besar untuk menghadapi masalah eksternal, sehingga Muhammadiyah tidak menjadi organisasi yang hanya berpandangan ke dalam (*inward looking*), mampu berkomunikasi dan memberikan sumbangan untuk menyelesaikan masalah nasional, regional, dan global. Bidang-bidang yang perlu ditingkatkan pengembangannya oleh persyarikatan antara lain adalah pemikiran-pemikiran baru dalam Islam, Iptek, Ekonomi dan Politik.

#### 6. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah telah mempunyai Rumah Sakit yang cukup banyak. RS tersebut dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi seluruh anggota Persyarikatan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. RS Muhammadiyah harus mampu memposisikan dirinya sebagai Rumah Sakit percontohan dalam bidang Pelayanan Kesehatan yang Islami.

#### 7. Hikmah

Dalam bidang politik, Muhammadiyah tetap pada posisi mengambil jarak sama jauh dengan semua PARPOL. Dalam posisi tersebut Muhammadiyah perlu secara

aktif melakukan kajian-kajian politik dan mengembangkan sumber daya politik sehingga Muhammadiyah dapat menjadi sumber pimpinan politik. Untuk itu Muhammadiyah perlu menjadikan politik sebagai salah satu dari usahanya, dalam bentuk pembinaan sumber daya politik. Dalam hal ini Lembaga Hikmah harus mampu menanganinya.

**8. Manajemen dan Kepemimpinan**

Dalam hal kepemimpinan Muhammadiyah harus konsisten dengan paradigma kepemimpinan yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu dalam rekrutmen kepemimpinan di semua eselon harus berpegang pada prinsip yang dimaksud dengan tetap memperhatikan *track record* masing-masing calon pimpinan secara seksama.

**9. Dana dan Kehartabendaan.**

- 9.1. Agar PP Muhammadiyah memperbaharui kerjasama dengan BPN dalam rangka menertibkan dan menyelesaikan masalah pemilikan dan penguasaan tanah milik Persyarikatan sampai mendapat sertifikat melalui Proyek Badan Pertanahan Nasional (Ajudikasi).
- 9.2. Penghimpunan dan pemanfaatan Dana Abadi dan dana lainnya seperti dana kemanusiaan, hendaknya dikelola secara profesional dan transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi.
- 9.3. Temuan-temuan pemeriksaan keuangan oleh LPPK segera ditindak-lanjuti agar supaya ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Persyarikatan dapat ditegakkan sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin.
- 9.4. Untuk menunjang program Persyarikatan, sebaiknya semua tingkat Persyarikatan menyusun RAPB masing-masing.

**10. Lain-lain.**

- 10.1. Di samping agar frekuensi kunjungan PP ke Wilayah dan Daerah ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
- 10.2. Perlu dilakukan audit kepemimpinan yang dilakukan pada setiap Sidang Tanwir. Tanwir dapat dijadikan sebagai forum evaluasi kinerja PP.

## PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE 2000-2005

### Bagian Pertama PENDAHULUAN

#### A. Dasar Pemikiran

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang bersumber pada Al--Quran dan Sunnah Nabi dengan maksud dan tujuan melaksanakan da'wah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya yang disyari'atkan sejak Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai kepada akhir zaman Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Muhammadiyah sejak berdirinya senantiasa berjuang untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah-duniawiyah melalui berbagai usaha pembaruan yang terorganisasi untuk kemajuan hidup umat dan bangsa di seluruh Tanah Air Indonesia dan dunia kemanusiaan di muka bumi ini.

Usaha-usaha Muhammadiyah sebagai wujud pelaksanaan gerakan da'wah dalam bidang-bidang kehidupan yang digelutinya merupakan perpaduan antara visi, misi, dan strategi dari Gerakan Islam yang secara operasional dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan Persyarikatan. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program Persyarikatan itu senantiasa mengalami perubahan dan penyempurnaan terus-menerus sejalan dengan perkembangan dinamika internal dan eksternal Muhammadiyah dari waktu ke waktu.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam menyadari bahwa dalam melaksanakan dan mewujudkan Islam melalui berbagai usaha, program, dan kegiatan yang bermacam-macam itu senantiasa berhadapan dengan permasalahan-permasalahan, tuntutan-tuntutan, dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dengan segenap kesungguhan dan daya yang optimal. Optimalisasi itu diwujudkan dalam komitmen, pemikiran, dan langkah-langkah yang diambil oleh Muhammadiyah di tengah perkembangan zaman yang terus berkembang dengan cepat dan semakin kompleks di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Karenanya dalam menyusun program Persyarikatan yang merupakan strategi kunci gerakan Muhammadiyah senantiasa menghitung berbagai faktor kondisional dan hal-hal operasional sehingga mampu menghadapi dan memberikan jawaban secara strategis, kongkrit, dan tepat-sasaran sesuai dengan tuntutan, misi, dan visi gerakan yang diemban.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan tersebut maka Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta merumuskan dan memutuskan Program Muhammadiyah periode 2000-2005 dalam berbagai aspeknya sebagai berikut.

#### B. Sistematika

Sistematika program Muhammadiyah periode 2000-2005 adalah sebagai berikut:

- Bagian Pertama : Pendahuluan
- Bagian Kedua : Kondisi dan Permasalahan Umum
- Bagian Ketiga : Visi, Misi, Usaha, dan Pokok Kebijakan Program Muhammadiyah
- Bagian Keempat : Program Muhammadiyah Periode 2000-2005

Bagian Kelima : Pedoman Pelaksanaan  
 Bagian Keenam : Penutup

## Bagian Kedua

### KONDISI DAN PERMASALAHAN UMUM

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam senantiasa berada dalam kancah dinamika kehidupan umat dan bangsa baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Dalam menghadapi dinamika kehidupan di berbagai tingkatan itu Muhammadiyah senantiasa berhadapan dengan permasalahan, tantangan, peluang, dukungan, dan hambatan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga tetap mampu melaksanakan gerakannya menuju pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sementara di lingkungan sendiri, Muhammadiyah dihadapkan pada dinamika dan permasalahan internal yang akan berpengaruh dalam menentukan perjalanan gerakannya.

Muhammadiyah baik dalam menentukan arah gerakannya maupun dalam merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi dan programnya perlu memperhitungkan faktor-faktor yang bersifat kondisional itu. Kondisi dan masalah yang perlu diantisipasi baik di tingkat global maupun nasional, juga yang berkaitan khusus dengan umat Islam dan Muhammadiyah, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### A. Kondisi dan Masalah Global

1. Perkembangan dunia ditandai oleh arus globalisasi yang makin meluas dalam memasuki abad ke-21 yang juga disebut era Milenium Ketiga. Fenomena global itu ditandai oleh interkoneksi antar wilayah (internasional, regional, nasional, dan lokal) dan antarsektor kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan lain-lain) yang serba menyeluruh, menyatu, melintasi, dan mendunia dalam tatanan dunia yang cenderung menjadi tunggal dan membentuk *global-system* (sistem global) dan *world-society* (masyarakat dunia).
2. Kehidupan umat manusia di era sistem global benar-benar memasuki zaman baru baik dalam alam pikiran maupun sikap hidup yang dikerangka oleh perubahan-perubahan mendasar dari pola kehidupan lama yang serba dibatasi oleh sekat-sekat geografis, primordialisme, dan sistem *nation-states* (negara-bangsa) menuju paradigma baru yang bersifat transnasional, transkultural, dan multikultural.
3. Globalisasi dalam kehidupan ekonomi akan makin memperkuat dan memperluas ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional, multikorporasi, dan transnasionalisme menuju terbentuknya *global market* (pasar dunia) yang semakin terbuka dan berada dalam jalur dunia pasar bebas yang menuntut daya kompetisi yang tinggi, yang membawa pula muatan kepentingan dan ekspansi kapitalisme global yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan nasional dan lokal.
4. Dalam kehidupan politik, globalisasi membawa perubahan dan pergeseran percaturan politik dari sekadar *international relations* (hubungan internasional) yang selama ini berlaku secara konvensional dalam pola *state-centric model* menuju *trans-national model* yang lebih memusatkan dan memperluas peranan pada interaksi antar organisasi--organisasi transnasional.
5. Dalam kehidupan kebudayaan di era global itu akan makin kuat kecenderungan sikap hidup yang kian terbuka, bebas, kompetitif, dan serba melintasi disertai

dengan penetrasi kebudayaan dan mekarnya gaya hidup global, yang membuka peluang bagi tumbuhnya konflik antar-peradaban (*clash of civilizations*), yang menyertai dan bahkan melampaui konflik ideologi, ekonomi, dan politik.

6. Kehidupan di era global itu makin memperkuat dan memperluas industrialisasi, revolusi komunikasi dan informasi, dan modernisasi yang mengarah pada modernisme dan meluasnya postmodernisme yang dapat memperluas sekularisasi, sekularisme, materialisme, hedonisme, dan bahkan ateisme yang sistematis dalam kehidupan umat manusia.
7. Dalam era baru Milenium Ketiga itu juga muncul optimisme yang membuka ruang yang leluasa bagi kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi media massa, dan bangkitnya spiritualisme yang memberi peluang bagi fungsi profetik (kerisalahan) agama dan umat beragama menuju tatanan dunia yang berketuhanan dan berkeadaban.
8. Di era baru yang serba mendunia itu tumbuh pula kecemasan dan pesimisme berkenaan dengan gejala degradasi (kehancuran) kemanusiaan dan nilai-nilai luhur kehidupan akibat desakan materialisme, hedonisme, sekularisme dan kebudayaan inderawi sehingga umat manusia kehilangan keseimbangan dan jangkar kehidupan yang hakiki.

#### **B. Kondisi dan Masalah Nasional**

1. Gerakan Reformasi di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. Dr. H. M. Amien Rais (waktu itu Ketua PP Muhammadiyah), mahasiswa, dan segenap kekuatan rakyat yang telah mengakhiri rezim Orde Baru dengan berhentinya Soeharto pada 21 Mei 1998 dari kursi kepresidenan; merupakan babak baru dalam sejarah Indonesia untuk memulai langkah demokratisasi dan pembaruan total di segala bidang kehidupan, tegaknya hak-hak asasi manusia, supremasi hukum, dan lahirnya *civil society* (masyarakat madani) yang mengimbangi kekuatan negara (*state*) yang selama ini berkuasa menuju tatanan Indonesia Baru yang dicita-citakan.
2. Terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 8 Juni 1999 yang telah terbentuk dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Oktober 1999, yang diawali dan diikuti oleh reposisi berbagai institusi politik dan kenegaraan di berbagai tingkatan, merupakan harapan baru sekaligus tantangan yang berat untuk mewujudkan reformasi yang total dalam kehidupan bangsa dan negara baik di tingkat struktural (sistem politik), kultural (kebudayaan politik), dan individual (perilaku politik) yang terkait dengan tingkatan-tingkatan kehidupan lainnya yang menuntut pembuktian-pembuktian langsung secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era pemerintahan baru itu benar-benar dituntut keteladanan elit dari puncak sampai bawah, pemerintahan dan birokrasi yang bersih, dan pengelolaan negara yang jujur, benar, demokratis, mementingkan rakyat, sehingga pemerintah baru tidak terjebak kembali pada kehidupan otoritarianisme dengan konsentrasi kekuasaan dalam diri Presiden sebagaimana pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.
3. Bersamaan dengan reformasi yang makin meluas itu tumbuh ledakan partisipasi politik yang luar biasa yang tidak jarang diwarnai oleh *radikalisme* (sikap serba keras) dan *anarkhisme* (liar, memaksakan kehendak) politik, sehingga kehidupan berdemokrasi masih merupakan harapan daripada kenyataan, yang memerlukan



- pematangan dan pendewasaan politik melalui pendidikan politik yang terbuka dan sistematis.
4. Praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta eksploitasi dan perusakan sumberdaya alam, penyelewengan-penyelewengan pembangunan, dan kerusakan-kerusakan dalam perikehidupan nasional selama Orde Baru yang demikian meluas dan dampak negatifnya (kerugian) dirasakan oleh seluruh rakyat sampai saat ini merupakan bentuk dari penyakit iman, moral, alam pikiran, dan mental yang melekat dalam kelemahan/kerusakan sistem yang untuk penyembuhannya menuntut langkah-langkah simultan (menyeluruh) di berbagai tingkatan dan sektor kehidupan yang tidak boleh terulang lagi pada masa pemerintahan baru di era reformasi.
  5. Perubahan sosial-budaya yang menyertai mobilitas sosial di seluruh struktur kehidupan masyarakat Indonesia yang terkait pula dengan interaksi kebudayaan luar yang makin *ekspansif* (meluas, merajalela), telah melahirkan pergeseraan-pergeseraan orientasi nilai dan norma serta sikap hidup masyarakat dan secara meluas ikut melahirkan penyakit-penyakit sosial (patologi sosial) seperti kriminalitas, pornografi, penyalahgunaan miras (minuman keras) dan narkoba (narkotik dan obat-obat berbahaya), demoralisasi (kerusakan akhlaq).
  6. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, pengangguran, kualitas hidup, dan masalah-masalah perekonomian lainnya baik di tingkat makro maupun mikro yang memerlukan rehabilitasi atau perbaikan cukup lama sehingga berpengaruh dalam kondisi keseluruhan kehidupan bangsa dan negara. Krisis ekonomi tersebut terasa makin berat dengan kondisi utang luar negeri Indonesia yang sangat besar dan mempengaruhi tingkat kemandirian bangsa dan negara ini dari pengaruh negara-negara donor dalam mengambil kebijakan nasional.
  7. Kondisi kehidupan nasional yang dilanda dan diancam perpecahan, disintegrasi nasional, dan kerusakan-kerusakan yang muncul di sejumlah daerah yang menuntut penyelesaian, pemecahan, dan pengaturan yang tuntas sehingga pemulihan hubungan dan kondisi kehidupan nasional yang harmoni, dinamis, dan berkeadaban dalam suasana Bhineka Tunggal Ika.
  8. Masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagaimana ditunjukkan oleh Human Development Index (HDI) Indonesia yang berada di posisi nomor 105 dalam standar UNDP (PBB) pada tahun 1999, yang memerlukan percepatan pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan untuk meningkatkan kualitas keunggulan bangsa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
  9. Kondisi bangsa dan negara Indonesia yang makin memperoleh tantangan dalam pergaulan bangsa-bangsa di tingkat dunia yang makin menuntut ketahanan dan keamanan nasional serta keunggulan mutu hidup di berbagai bidang sesuai dengan jiwa Proklamasi 1945 yang harus dijunjung tinggi selaku bangsa yang merdeka dan bermartabat.
  10. Kondisi kaum perempuan di hampir semua struktur dan sektor kehidupan yang masih tertinggal padahal golongan sosial ini menempati sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga makin kuat tuntutan-tuntutan baru untuk pemberdayaan kaum perempuan secara lebih berkeadilan dan bermartabat.

**C. Kondisi dan Masalah Umat Islam**

1. Umat Islam yang tersebar di 47 negara dengan jumlah sekitar seperempat penduduk dunia mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai antara lain oleh tumbuhnya negara-negara muslim yang kuat secara ekonomi, diperhitungkan secara politik, memiliki kekuatan kaum intelektual, dan sebagian masuk ke tahap pengembangan ilmu- pengetahuan dan teknologi (iptek) yang menggembirakan, yang didukung oleh kerjasama antar negara muslim yang semakin lebih baik. Di masa datang diharapkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas secara signifikan di tubuh kaum muslimin di seluruh dunia.
2. Kendati terdapat kemajuan-kemajuan yang berarti di kalangan umat Islam di berbagai penjuru dunia, diakui bahwa masih terdapat masalah-masalah yang harus terus dipecahkan yaitu kerjasama antar negara muslim menuju kesatuan ekonomi-politik yang kuat, peningkatan sumberdaya manusia yang unggul, membangun kemampuan iptek yang handal, ketimpangan antar negara muslim yang kaya dan miskin, melepaskan ketergantungan dari dunia Barat yang menyebabkan kehilangan kemandirian, dan menyiapkan diri dalam menghadapi era baru globalisasi serta industrialisasi dan modernisasi tahap lanjutan yang semakin dahsyat.
3. Khusus mengenai perkembangan umat Islam di Indonesia diakui bahwa terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti terutama di tingkat individual seperti dalam hal pendidikan, kesejahteraan sosial-ekonomi, mobilitas sosial dan politik, dan kerukunan hidup dalam beragama. Namun diakui pula bahwa secara keseluruhan di tingkat kehidupan kolektif yang menggambarkan umat Islam masih belum setara antara kuantitas dan kualitas seperti mutu sumberdaya manusia yang masih rendah, jumlah penduduk muslim yang rentan secara ekonomi (miskin), kehidupan politik yang belum menuju pada kesatuan (entitas) politik yang kuat, dan praktik keagamaan yang masih jauh dari keharusan ajaran Islam, sehingga umat Islam belum menjadi kekuatan penentu dalam kehidupan bangsa dan negara.
4. Dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks dan adanya kesadaran akan pentingnya ukhuwah Islamiyah yang lebih kokoh, maka diperlukan penciptaan budaya integratif (ukhuwah yang bersifat kultural baik antar maupun intern umat beragama) khususnya pada seluruh komponen umat Islam yang dilandasi oleh kesamaan aqidah dan jamaah sebagai *ummatan wahidah* dalam mengemban fungsi kerisalahan dan kekhalifahan di muka bumi ini.

**D. Kondisi dan Masalah Muhammadiyah**

1. Muhammadiyah dalam memasuki abad ke-21 memiliki peluang untuk terus berkembang karena memiliki sejumlah faktor kemajuan, kekuatan, dan potensi sebagai berikut:
  - a. Fahaman agama (Islam) yang fundamental dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi serta mengembangkan ijtihad dan akal pikiran sebagai potensi dasar untuk membangun kehidupan yang bersifat *habl min Allah* dan *habl min an-Nas* di bumi ini menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  - b. Etos kerja dan semangat untuk maju dari orang-orang Muhammadiyah yang relatif tinggi sebagai potensi untuk membangun prestasi amal usaha yang unggul yang memerlukan dukungan pemikiran, kepekaan sosial, fasilitas,

- dan jaringan kerjasama yang kuat baik di dalam maupun di luar Persyarikatan.
- c. Gerakan yang tersistem melalui organisasi yang relatif stabil dan mapan (Muhammadiyah sebagai jam'iyah) merupakan kekuatan strategis untuk membentuk kehidupan yang objektif yang mengatasi individu-individu sehingga dapat melahirkan kekuatan umat Islam dan gerakan yang terorganisasi secara rapih.
  - d. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang cukup pesat dan menggembirakan sebagai modal utama untuk pengembangan amal usaha lebih lanjut yang lebih unggul baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) sebagai bentuk penghidmatan Muhammadiyah kepada umat dan bangsa.
  - e. Perkembangan sumberdaya intelektual dan profesional di kalangan Muhammadiyah yang relatif lebih baik sebagai kekuatan untuk menggerakkan, mengelola amal usaha, dan berpartisipasi secara aktif dalam reformasi pembangunan bangsa dan negara.
  - f. Fasilitas prasarana dan sarana fisik yang relatif tersedia sebagai pendukung gerakan Muhammadiyah yang harus terus dikembangkan dan dikelola secara efektif.
  - g. Kerjasama, kepercayaan, dan simpati berbagai pihak terhadap Muhammadiyah sebagai kekuatan/potensi yang dapat dihimpun dan dimanfaatkan untuk memperluas amal usaha dan gerakan ke berbagai tingkat dan sektor kehidupan masyarakat.
2. Di luar kemajuan, kekuatan, dan potensi sebagai potensi positif Muhammadiyah juga menyadari adanya kelemahan dan masalah yang menjadi tantangan untuk dipecahkan, yaitu sebagai berikut:
- a. Di sementara kalangan Muhammadiyah terdapat indikasi pengamalan agama yang kurang sejalan dengan faham Al-Quran dan Sunnah Nabi, melemahnya ruh jihad dalam berda'wah dan berorganisasi, dan belum menyatunya potensi antara komitmen dan profesionalitas dalam menggerakkan amal usaha, serta gerakan jama'ah dan da'wah jama'ah yang belum berjalan sebagaimana mestinya yang dapat memperlemah aktualisasi misi Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam.
  - b. Belum meratanya tingkat kualitas amal usaha, kegiatan tabligh, sumberdaya kader dan pimpinan, dan daya dukung fasilitas dalam tubuh Muhammadiyah di berbagai tingkatan yang menyebabkan organisasi belum berkembang secara efektif, efisien, dan sinergi dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat.
  - c. Pluralitas latarbelakang elit pimpinan yang belum sepenuhnya melalui proses pengalaman bersama dalam menggerakkan Muhammadiyah yang mengakibatkan kesenjangan visi dan misi antar pimpinan yang pada akhirnya memperlemah gerakan Muhammadiyah.
  - d. Kurang berkembangnya peran-peran Muhammadiyah dalam menghadapi isu-isu dan dinamika baru yang bersifat non--konvensional baik dalam lapangan media massa, politik, ekonomi, dan sosial-budaya sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan tampak kurang bergerak secara dinamik.

- e. Keterbatasan media Muhammadiyah terutama melalui media massa baik media cetak maupun elektronik sehingga misi Muhammadiyah tidak dapat meluas ke berbagai segmen sosial masyarakat.
- f. Kecenderungan Muhammadiyah yang kurang tanggap dalam menyikapi perkembangan sosial-politik secara strategis sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan kurang mengambil inisiatif selaku pelopor dalam perubahan, kecuali melalui sebagian tokohnya.
- g. Masih belum terpadu dan sistematis pembinaan kader dalam Muhammadiyah baik untuk pembentukan kader pimpinan, kader ulama, dan kader amal usaha sehingga proses rekrutmen dan transformasi kader tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk mensukseskan dan melangsungkan misi Muhammadiyah.
- h. Ketertinggalan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi yang menyebabkan tawar-menawar yang rendah dan kehadiran Muhammadiyah belum dirasakan secara langsung untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
- i. Ketertinggalan Muhammadiyah dalam pergumulan wacana pemikiran Islam dan isu-isu aktual sehingga tidak memberikan arahan dan alternatif bagi pembaruan umat, meskipun disadari bahwa Muhammadiyah memiliki kader atau sumberdaya intelektual yang cukup besar.
- j. Muhammadiyah sebagaimana pada umumnya organisasi sosial kemasyarakatan selama Orde Baru merasakan adanya hegemoni kekuasaan negara sehingga dalam batas tertentu memperlemah kemandirian sebagai Gerakan Islam dalam melakukan peran-peran amar ma'ruf dan nahi munkar yang dilakukannya.

### Bagian Ketiga

## VISI, MISI, USAHA, DAN POKOK KEBIJAKAN PROGRAM MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang berasas Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah; memiliki maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai maka Muhammadiyah dituntut untuk mengoperasionalisasikan idealisme gerakannya sebagai Gerakan Islam itu ke dalam visi, misi, usaha, dan secara lebih konkret lagi ke dalam kebijakan program sehingga terjadi persambungan antara idealita dan realita.

### A. Visi Muhammadiyah

Muhammadiyah dengan komitmen gerakan dan kepribadiannya memiliki visi dalam kehidupan ini. Visi Muhammadiyah itu ialah sebagai berikut: "Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan Da'wah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil' alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan di dunia ini.

## **B. Misi Muhammadiyah**

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar memiliki misi yang mulia dalam kehidupan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang dibawa oleh para Rasul Allah yang disyari'atkan sejak Nabi Nuh a.s. hingga Nabi Muhammad s.a.w.
2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan--persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan Sunnah Rasul.
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

## **C. Usaha Muhammadiyah**

Muhammadiyah dalam mewujudkan visi dan misi gerakannya menempuh langkah-langkah usaha sebagai berikut :

- (1) Menyebarluaskan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh.
- (2) Mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
- (3) Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlaq.
- (4) Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam.
- (5) Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf.
- (6) Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam.
- (7) Membina dan menggerakkan angkatan muda, sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- (8) Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
- (9) Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- (10) Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- (11) Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.
- (12) Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.
- (13) Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera.
- (14) Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah.
- (15) Menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat.
- (16) Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa dan peran-serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (17) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.

## **D. Pokok Kebijakan Program Muhammadiyah**

### **1. Landasan**

Program Muhammadiyah disusun berlandaskan pada:

- a. Al-Quran dan As-Sunnah
- b. Prinsip-Prinsip Gerakan Muhammadiyah
  - 1) Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
  - 2) Kepribadian Muhammadiyah
  - 3) Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah
  - 4) Khittah Perjuangan Muhammadiyah
  - 5) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
- d. Peraturan-Peraturan Organisasi.

### **2. Tujuan**

Terciptanya kualitas dan keunggulan sumberdaya manusia, amal usaha, dan gerakan Muhammadiyah disertai dengan peningkatan peranan Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat Islam dan reformasi kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan tujuan program tersebut maka dirumuskan sasaran dan prioritas program Muhammadiyah periode 2000-2005 sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia ditekankan dan diarahkan pada terciptanya keunggulan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupan di berbagai bidang dengan mengandalkan integritas kepribadian (akhlaq), ketaatan pada ajaran agama (Islam), penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemampuan keahlian di atas rata-rata yang lain.
- b. Pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah ditekankan dan diarahkan pada peningkatan kualitas di berbagai segi sehingga memiliki keunggulan daripada yang lain dan mampu berkhidmat pada kepentingan umat/masyarakat luas.
- c. Pengembangan Gerakan Muhammadiyah ditekankan dan diarahkan pada peningkatan kualitas media dan metode yang didukung oleh kemampuan visi dan kelengkapan sarana serta prasarana .
- d. Peningkatan peran Muhammadiyah secara aktif dan memiliki visi yang luas dalam percaturan dinamika kehidupan nasional dan reformasi bangsa sehingga Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis yang diperhitungkan dan ikut menentukan perkembangan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana peran yang dimainkannya secara istiqamah selama ini.

### **3. Prinsip Kebijakan**

#### **a. Prinsip Da'wah**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip perwujudan dan pelaksanaan misi Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam bidang kegiatan yang diprioritaskan.

#### **b. Prinsip Istiqamah**

Program Muhammadiyah yang berkaitan dengan keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam haruslah tetap teguh (istiqamah) merujuk pada prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijtihad sesuai faham agama dalam Muhammadiyah.



**c. Prinsip Kemaslahatan**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip mengutamakan kepentingan kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi umat dan bangsa sebagaimana misi gerakan Muhammadiyah.

**d. Prinsip Strategis**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

**e. Prinsip Kontinuitas**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip kesinambungan dengan program-program sebelumnya dalam matarantai pencapaian tujuan Muhammadiyah.

**f. Prinsip Sistemik**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip keterpaduan baik dalam kebijakan Persyarikatan maupun dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

**g. Prinsip Fleksibilitas**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip memberi kemungkinan pada pengembangan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kepentingan setempat.

**h. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas**

Program Muhammadiyah didasarkan pada prinsip memperhitungkan asas-asas efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kemampuan, ketersediaan dana dan personil, dan menghindari kejumuhan (tumpang tindih) dan pemborosan dalam pelaksanaannya.

**i. Prinsip Tabsyir dan Taisir**

Program Muhammadiyah didasarkan atas prinsip menggembirakan (*tabsyir*) dan memudahkan (*taisir*) sehingga pelaksanaan program diliputi oleh suasana penuh keikhlasan dan kegembiraan dari segenap anggota pimpinan dan warga Perasyarikatan.

## Bagian Keempat

## PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE 2000-2005

**A. PROGRAM KONSOLIDASI GERAKAN****1. Pelembagaan Visi dan Misi Gerakan**

- a. Melembagakan (institusionalisasi) visi dan misi Muhammadiyah sebagai perwujudan penerapan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam seluruh proses dan sistem penyelenggaraan, pengelolaan organisasi dan amal usaha Persyarikatan di berbagai tingkatan (struktur) melalui perencanaan-perencanaan strategis.
- b. Memasyarakatkan visi dan misi Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkatan (Pimpinan Persyarikatan, Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah) melalui berbagai media dan kegiatan yang terpadu dengan konsolidasi organisasi dan kaderisasi dalam Muhammadiyah.

- c. Menanamkan dan melaksanakan visi dan misi Muhammadiyah melalui pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan program-program/paket-paket dan metode yang sistematis dan berkualitas di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
  - d. Meningkatkan keteladanan para pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha di berbagai tingkatan sebagai wujud integritas dalam mengembangkan dan mengamalkan visi dan misi Muhammadiyah di lingkungan masing-masing.
  - e. Menerapkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang diamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memimpinkan pelaksanaannya.
- 2. Konsolidasi Organisasi**
- a. Meningkatkan dan menggerakkan fungsi dan keberadaan Pimpinan Ranting Muhammadiyah sebagai basis dan ujung tombak gerakan di tingkat umat di bawah koordinasi kepemimpinan Cabang, Daerah, dan Wilayah secara terpadu dan dinamis guna menyongsong tantangan-tantangan baru dalam kehidupan nasional dan global.
  - b. Meningkatkan kemandirian dan inisiatif Pimpinan Muhammadiyah di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting dalam menghadapi era otonomi pemerintah daerah sehingga Muhammadiyah di tempat masing-masing dapat mengambil peranan positif dan aktif dalam percaturan reformasi dan pembangunan daerah.
  - c. Memperkuat kinerja, efektivitas, dan efisiensi kepemimpinan dan pengelolaan organisasi di seluruh tingkatan Pimpinan Persyarikatan melalui berbagai pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan yang benar-benar dirasakan hasil dan manfaatnya untuk mendinamisasi gerakan Muhammadiyah antara lain dengan pembenahan posisi dan fungsi sekretariat yang profesional dan efektif dalam mendukung keberhasilan gerakan dan program Persyarikatan.
  - d. Mengembangkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom dan unit-unit dalam Persyarikatan dengan prinsip melibatkan personil yang benar-benar memiliki komitmen, idealisme, kesediaan untuk berkorban, waktu luang, wawasan, dan kemampuan secara lebih selektif.
  - e. Mengembangkan fungsi-fungsi manajemen organisasi secara makin efektif dan efisien seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi termasuk dalam koordinasi antar Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha disertai dengan penataan organisasi di berbagai lini yang benar-benar menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan yang dinamis dan produktif dalam mencapai tujuannya.
  - f. Meningkatkan kualitas anggota pimpinan Persyarikatan dalam pemahaman keislaman, wawasan pemikiran, keteladanan dan komitmen, dan kemampuan profesional di berbagai unit dan tingkatan melalui refreshing, up-grading, job-training, dialog dan forum, pengajian-pengajian, dan kegiatan sejenis yang pelaksanaannya dikoordinasikan di bawah tanggungjawab badan yang menangani perkaderan.

- g. Melaksanakan penyegaran (regenerasi) kepemimpinan di setiap tingkatan yang mampu memadukan komitmen pada visi dan misi, *akhlaq al karimah*, pengalaman berorganisasi di lingkungan Muhammadiyah, kaderisasi dan keteladanan diri, wawasan dan pemikiran, keahlian, ketulusan dan tanggungjawab serta kemauan berkorban (*jihad fi sabilillah*), dan faktor-faktor kepentingan organisasi guna membangun kepemimpinan yang stabil dan produktif dalam Muhammadiyah.
- h. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi dan pelayanan informasi di seluruh jajaran Persyarikatan sebagai bagian penting dalam pengelolaan organisasi dan mengembangkan gerakan Muhammadiyah.
- i. Meningkatkan fungsi-fungsi dan kelengkapan pengadaan data dan informasi mengenai berbagai aspek dan kepentingan Muhammadiyah melalui bank data yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun luar Persyarikatan.
- j. Meningkatkan pemberdayaan organisasi dan gerakan sehingga mampu membangun kemandirian dengan tetap menggalang kerjasama kesetaraan.

### 3. Organisasi Otonom Muhammadiyah

- a. Meningkatkan fungsi organisasi otonom Muhammadiyah sebagai wahana perkaderan, efektivitas dan efisiensi kegiatan Persyarikatan, dinamika dan pengembangan, serta pelaksana dan pelangsup amal usaha Muhammadiyah melalui berbagai saluran sehingga kehadiran dan keberadaannya benar-benar menjadi pilar gerakan Muhammadiyah.
- b. Memperkuat posisi dan peran Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan kewajiban bagi para Pimpinan Perguruan Muhammadiyah tersebut untuk membinanya sehingga menjadi media perkaderan Muhammadiyah yang efektif dan strategis.
- c. Memberikan prioritas dan peluang yang terbuka bagi kader-kader dari organisasi otonom untuk berkiprah dan meningkatkan posisi serta peran dalam berbagai struktur kepemimpinan Persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah sebagai faktor pengemban misi dan kelangsungan gerakan yang didukung oleh kemampuan-kemampuan objektif di berbagai bidang kehidupan.
- d. Meningkatkan dukungan dana dan fasilitas bagi organisasi otonom Muhammadiyah untuk mengembangkan aktivitasnya dalam melaksanakan misi Persyarikatan.
- e. Mendorong organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah untuk mengembangkan kemandirian sehingga mampu mengelola dan meningkatkan posisi dan perannya dalam kehidupan umat dan masyarakat yang semakin dinamik dan kompetitif.

### 4. Kerjasama Kelembagaan

- a. Pimpinan Persyarikatan dengan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha di berbagai tingkatan mengembangkan inisiatif dan meningkatkan peran aktif dalam membangun jaringan-kerja

(*net-working*) dan kerjasama di bidang pengembangan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat, dan program-program lainnya dengan pemerintah, LSM (lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga-lembaga pendidikan dan kemasyarakatan, dan berbagai pihak luar sesuai dengan kepentingan dan prinsip organisasi.

- b. Mengambil prakarsa untuk mengembangkan komunikasi dan kerjasama khusus dengan organisasi-organisasi Islam yang diarahkan pada penciptaan ukhuwah yang makin kokoh dan produktif dalam berbagai bentuk program bersama yang bersifat praksis (ide dan aksi) untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin serta kemaslahatan bangsa.
5. **Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri**
- a. Membuka hubungan kerjasama secara aktif dengan lembaga-lembaga dan pemerintah di Timur Tengah untuk pengembangan program-program sosial-ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan selain kerjasama dalam program yang selama ini dikembangkan.
  - b. Mengembangkan/meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan luar negeri untuk program-program pengembangan kualitas sumberdaya manusia seperti untuk studi di luar negeri (pendidikan), kesehatan, dan pengembangan masyarakat sesuai dengan prinsip Persyarikatan.
  - c. Mengembangkan dan memperluas kerjasama dan peningkatan keberadaan jamaah Muhammadiyah di luar negeri dalam berbagai bentuk program yang produktif.
6. **Dana Persyarikatan**
- a. Pimpinan Persyarikatan di setiap tingkatan meningkatkan usaha-usaha penggalan dana yang lebih produktif seperti melalui bermacam-macam Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan secara langsung, selain melalui usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan sehingga aliran dana makin besar untuk membiayai program dan gerakan Persyarikatan.
  - b. Pimpinan Persyarikatan lebih terpadu dan efektif dalam menggerakkan iuran anggota, pengumpulan dana zakat/inafaq/shadaqah, mobilisasi dana abadi, dan penarikan dana sejenis lainnya yang selama ini ditempuh untuk kepentingan pendanaan kegiatan-kegiatan Persyarikatan.
  - c. Pimpinan Persyarikatan di bawah koordinasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dituntut melakukan perencanaan yang matang pada lima tahun periode ini dalam menyusun usaha-usaha penggalan dan pemanfaatan dana secara terprogram sehingga dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan gerakan dan pelaksanaan program Persyarikatan.

## B. PROGRAM PERBIDANG

### 1. Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Pemikiran Islam

- a. Mengintensifkan pembinaan aqidah, ibadah, dan akhlaq di kalangan warga Muhammadiyah dan kaum muslimin sesuai dengan Tuntunan Tarjih melalui pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan takhasus, kursus-kursus, buku-buku paket, siaran-siaran media elektronik dan cetak, dan

- berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan tepat-sasaran.
- b. Majelis Tarjih menyusun buku-buku pedoman/paket tuntutan ibadah, do'a-do'a, dan aspek-aspek pembinaan ajaran Islam yang lainnya yang bersifat praktis dan mudah difahami oleh masyarakat awam sebagai media memperluas jangkauan pengamalan Islam dalam kehidupan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya.
  - c. Menyusun Tafsir Al-Quran dan konsep *ad Dienul Islam* yang komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi pemahaman anggota Muhammadiyah dan rujukan bagi masyarakat luas mengenai aspek-aspek ajaran Islam yang menyeluruh.
  - d. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih secara aktif dan sistematis melaksanakan pembahasan-pembahasan masalah-masalah keagamaan (*bahtsul masail*) dalam berbagai aspek terutama yang terkait dengan masalah-masalah aktual sebagai pedoman pemahaman dan pengamalan Islam bagi warga Muhammadiyah maupun kaum muslimin.
  - e. Dalam upaya meningkatkan peran Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid maka Pimpinan Persyarikatan di bawah tanggungjawab Majelis Tarjih dengan melibatkan berbagai Majelis, Badan, Lembaga, dan institusi-institusi yang terkait dituntut untuk memberikan masukan-masukan pemikiran dan pedoman-pedoman keagamaan dalam menyikapi dan menghadapi tuntutan-tuntutan perkembangan zaman.
  - f. Meningkatkan dialog-dialog dan pemasyarakatan pemikiran-pemikiran Islam klasik maupun kontemporer melalui berbagai media yang konvensional dan non-konvensional sehingga pemikiran Muhammadiyah mewarnai wacana-wacana pemikiran di khalayak publik baik di dunia akademik maupun di masyarakat luas.

## 2. Tabligh dan Penyiaran Islam

- a. Pemanfaatan saluran-saluran non-konvensional seperti televisi, radio, dan berbagai jenis media cetak dan elektronika secara profesional untuk memperluas jaringan dan jangkauan tabligh ke berbagai lapisan sosial di seluruh penjuru wilayah dengan dukungan para mubaligh yang berkualitas.
- b. Mengintensifkan tabligh-tabligh konvensional seperti ceramah, khutbah, dan pengajian yang bersifat kontak langsung dengan meningkatkan mutu metode, kualitas pesan, dan program sehingga lebih tepat-sasaran.
- c. Menggarap umat dan umat ijabah di lingkungan-lingkungan sosial yang dikategorisasikan sebagai komunitas abangan dan kaum marginal sebagai basis pembinaan prioritas.
- d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan da'i/mubaligh dalam berbagai jenis sesuai kepentingan jenis tabligh/penyiaran Islam dan sasaran yang dipilih dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bervariasi dan tepat-sasaran.
- e. Mengintensifkan pembinaan umat melalui paket-paket tabligh yang terprogram secara profesional seperti kursus-kursus keislaman dalam berbagai paket, kursus bahasa Arab, kursus TPA dan qira'at Al-Quran, dan sejenisnya yang dikelola dengan model permanen atau semi-permanen.

- f. Menyusun dan menyebarluaskan brosur-brosur, leaflet, buku paket, slide-film, dan bentuk-bentuk media tabligh lainnya, yang dapat menjangkau masyarakat luas secara aktif.
  - g. Membuat pilot proyek Gerakan Jamaah dan Da'wah Jamaah, serta Keluarga Sakinah di sejumlah Daerah yang dikoordinasikan dengan berbagai kalangan di lingkungan Persyarikatan.
  - h. Intensifikasi komputerisasi data mubaligh dan peta daerah dalam berbagai aspeknya untuk kepentingan pengembangan Muhammadiyah.
  - i. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tabligh dalam bentuk program-program khusus untuk pembinaan akhlaq di berbagai lapisan sosial masyarakat melalui paket-paket yang menarik dan tepat-sasaran.
- 3. Perkaderan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**
- a. Menyusun konsep perkaderan dan mengoperasionalisakannya secara simultan (menyeluruh) dan terpadu di lingkungan pendidikan, keluarga, dan organisasi otonom Muhammadiyah dalam satu kesatuan Sistem Perkaderan Muhammadiyah yang mampu menghasilkan sumberdaya kader yang berkualitas guna menyongsong perubahan-perubahan baru dalam kehidupan umat dan bangsa yang melibatkan kerjasama terutama antara Badan Pendidikan Kader, Majelis Pendidikan, Aisyiyah, Organisasi Otonom Muhammadiyah.
  - b. Memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam mengembangkan kualitas sumberdaya kader Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terlembaga
  - c. Menyelenggarakan Darul Arqam, Baitul Arqam, Up-Grading, Refreshing, Job-Training, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah), pengajian Muballigh, pengajian Ramadhan dan kegiatan-kegiatan perkaderan lainnya yang dilakukan secara terpadu di seluruh lingkungan Persyarikatan termasuk Amal Usaha sesuai dengan kepentingan dan sasaran yang dikehendaki.
  - d. Mengintensifkan dan memprioritaskan penempatan kader dan proses seleksi yang mempertimbangkan aspek kekaderan, komitmen, dan pengalaman aktivitas bermuhammadiyah yang dipadukan dengan kemampuan-kemampuan objektif dalam penempatan personil, pengelola, dan pimpinan di lingkungan kepemimpinan Persyarikatan, Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah dengan kepentingan kelangsungan misi Persyarikatan.
  - e. Mengintensifkan pendataan kader dan aspek-aspek yang terkait lainnya guna kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah di berbagai struktur di lingkungan Persyarikatan.
  - f. Menerbitkan publikasi dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah dalam berbagai aspek.
  - g. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan khusus seperti pendidikan non-formal untuk pengembangan SDM Persyarikatan.
  - h. Menyelenggarakan forum Ideopolitor (Ideologi, Organisasi, Politik, dan Organisasi) sebagai program refreshing (penyegaran) khusus anggota Pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkat struktur yang mengembangkan metode dialogis.



- i. Mengoptimalkan dukungan fasilitas, sarana, prasarana, dan dana untuk pengembangan kualitas kader dan sumberdaya manusia di lingkungan Muhammadiyah.
  - j. Mengintensifkan pembinaan siswa di Madrasah Mu'allimin, Mu'allimat, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah khusus Muhammadiyah sebagai wahana khusus pembentukan kader Persyarikatan.
  - k. Mengembangkan pembinaan kader melalui Hizbul Wathan Muhammadiyah yang disusun secara sistematis dan terprogram.
  - l. Mengembangkan pusat studi, pendidikan dan pelatihan Muhammadiyah yang dilaksanakan secara sistematis.
- 4. Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan**
- a. Mengkaji masalah-masalah dan isu-isu strategis yang aktual baik mengenai Muhammadiyah maupun masalah-masalah kemasyarakatan melalui seminar, sarasehan, diskusi-diskusi/kajian-kajian pakar, kajian-kajian buku, dan kajian-kajian terbatas lainnya yang bersifat prioritas dan produktif sebagai masukan bagi kepentingan Persyarikatan.
  - b. Melaksanakan penelitian-penelitian yang strategis dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan umat Islam sebagai bahan kebijakan dan perencanaan strategis.
  - c. Menyusun dan mengembangkan data base mengenai anggota dan pimpinan serta perkembangan amal usaha Persyarikatan secara menyeluruh.
  - d. Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian sebagai bahan informasi baik di kalangan intern maupun ekstern Muhammadiyah.
- 5. Pengembangan Kepustakaan, Informasi, dan Publikasi**
- a. Mengadakan Perpustakaan Muhammadiyah yang representatif khususnya yang menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka mengenai Muhammadiyah dan umat Islam (buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, jurnal, majalah, koran, foto, rekaman tape, audio-visual, kliping, dan sebagainya) yang menjadi rujukan informasi publik.
  - b. Menerbitkan ALMANAK Muhammadiyah, Ensiklopedi Muhammadiyah, serta buku-buku sejarah dan dokumentasi organisasi mengenai Muhammadiyah yang menjadi bahan informasi spesial khusus bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat luas.
  - c. Menerbitkan leaflet, booklet, *news-letter*, dan jurnal khusus mengenai Muhammadiyah dalam berbagai aspeknya yang spesifik untuk kepentingan publikasi umum.
  - d. Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan lembaga-lembaga Perpustakaan lain, KTLV, INIS, LIPI, Perguruan Tinggi, dan lain-lain untuk pengembangan perpustakaan Muhammadiyah.
  - e. Menyelenggarakan kajian-kajian buku khusus yang berkenaan dengan Muhammadiyah dan Islam sebagai wahana penyebaran informasi bagi warga Persyarikatan maupun publik.
  - f. Merintis berdirinya Museum Muhammadiyah di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  - g. Merintis berdirinya pusat informasi dan publikasi Muhammadiyah.

## **6. Pendidikan**

### **a. Umum**

- (1) Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis yang dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana cita-cita pendiri Muhammadiyah dan sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan dan kebudayaan Islam.
- (2) Memasukkan fungsi kaderisasi (perkaderan) dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu manusia muslim yang berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi umat dan bangsa.
- (3) Menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam yang dapat menjadi model keunggulan di masa depan.
- (4) Pengembangan sekolah-sekolah unggulan yang tidak mengarah pada eksklusivisme dan tidak semata-mata mengembangkan kualitas kognisi serta skill dari subjek didik.
- (5) Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Busthanul Atfhal (TK ABA), play-group, Taman Pendidikan Al-Quran, dan pendidikan informal dan non-formal lainnya sebagai wahana persemaian penanaman iman, akhlak/kepribadian, dan kreativitas yang sesuai dengan dan tidak mematikan perkembangan jiwa anak-anak.

### **b. Pendidikan Dasar Dan Menengah**

- (1) Memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar sebagai basis bagi pengembangan kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi yang memberikan peluang bagi subjek didik untuk berkembang baik kepribadian maupun intelektual dan keterampilannya dengan dasar keimanan dan akhlak yang kokoh.
- (2) Meningkatkan kualitas kesejahteraan guru sebagai faktor pendukung bagi pengembangan kualitas pendidikan Muhammadiyah.
- (3) Meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren yang dapat menjadi salah satu unggulan dari pendidikan Muhammadiyah sebagai basis pembentukan kader-kader ulama di masa depan.
- (4) Memberikan bobot untuk peningkatan kualitas kurikulum pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, bahasa Arab dan Inggris, matematika, dan humaniora/budi pekerti, yang dapat menjadi faktor keunggulan pengembangan sumberdaya manusia di masa depan.
- (5) Memperkuat, memfasilitasi, dan membina keberadaan serta peranan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) di sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai wahana kaderisasi Persyarikatan.
- (6) Mengembangkan jaringan dan kerjasama yang dapat memecahkan kesenjangan antara sekolah-sekolah yang maju dan tertinggal

sehingga dapat menciptakan keunggulan kualitas yang merata dalam lingkungan perguruan Muhammadiyah.

- (7) Memantapkan keberadaan dan peranan kantor Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah ke bawah sehingga dapat menjalankan fungsi yang optimal dan rutin dalam mengelola pendidikan Muhammadiyah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (8) Memantapkan keberadaan dan pembinaan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dan Hizbul Wathan (HW) di seluruh lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.
- (9) Mengembangkan kerjasama-kerjasama di dalam dan luar negeri yang dapat mengembangkan kualitas pendidikan dan sumberdaya Muhammadiyah.
- (10) Memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi, kurang mampu, dan atau terkena musibah.

**c. Pendidikan Tinggi**

- (1) Mengembangkan perencanaan strategis di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) untuk meningkatkan kualitas dan misi dengan mengarahkan peningkatan kompetensi lulusan baik dari segi mutu akademik, kepribadian, dan kemampuan profesional yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat dengan tetap bertumpu pada ciri khas pendidikan Muhammadiyah.
- (2) Pengembangan program-program studi baru dan pusat-pusat keilmuan yang menjadi ciri khas PTM dengan memperhatikan bahwa selain berorientasi pada kebutuhan juga dikembangkan keterpaduan yang dapat memposisikan dan memerankan PTM sebagai pusat pendidikan Islam dan strategi kebudayaan umat Islam dalam satu kesatuan gerakan Muhammadiyah.
- (3) Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan mobilitas vertikal karyawan dan dosen serta pengelola PTM dengan memperhatikan kebijakan untuk mensosialisasikan dan melaksanakan peran seluruh civitas akademika sebagai subjek dan pelaku kebudayaan Islam sebagai perwujudan dari pengembangan misi Persyarikatan.
- (4) Menjadikan pusat-pusat studi di lingkungan PTM antara lain berfungsi sebagai pemasok data bagi kepentingan kebijakan dan pengembangan organisasi Muhammadiyah.
- (5) Mengembangkan jaringan dan konsorsium PTM untuk mengurangi kesenjangan antar PTM sekaligus sebagai media pengembangan PTM dalam menghadapi kompetisi yang makin keras dan menyongsong era globalisasi.
- (6) Memperkuat keberadaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan meningkatkan pembinaan untuk mengembangkan kualitas peran IMM dalam melaksanakan fungsi kaderisasi dan kegiatan kemahasiswaan di PTM-PTM.
- (7) Mengembangkan dan menerapkan sistem rekrutmen dosen dan karyawan yang didasarkan pada keterpaduan faktor-faktor objektif dan profesional, komitmen keislaman, pengalaman dan kepemihakan pada pengembangan misi Persyarikatan, akhlaq yang

terpuji dan tanggungjawab, serta faktor-faktor yang mendukung kepentingan pengembangan Amal Usaha yang bersangkutan dalam sistem rekrutmen yang terstandar.

- (8) Memberikan perhatian dan antisipasi yang serius terhadap perkembangan dinamika kemahasiswaan di PTM-PTM yang antara lain ditandai oleh tumbuhnya radikalisme dan militansi kelompok-kelompok mahasiswa yang dimungkinkan tidak senapas dengan kepentingan strategi perjuangan umat Islam dan pelaksanaan misi Persyarikatan.
- (9) Mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri untuk kepentingan pengembangan studi lanjut pada khususnya dan pengembangan kualitas PTM secara keseluruhan.
- (10) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, kurang mampu dan atau terkena musibah.

## **7. Pengembangan Sosial-Budaya dan Peradaban Islam**

- a. Mengembangkan apresiasi sosial-budaya/kebudayaan dalam cakupan khusus seperti kesenian, kesusasteraan, dan pariwisata untuk memberikan nuansa kehalusan budi guna membentuk keluhuran jiwa kemanusiaan di kalangan umat Islam khususnya warga Muhammadiyah yang senapas dengan ajaran Islam dan berfungsi sebagai alat/media da'wah.
- b. Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukkan yang membawa pesan profetik (kerisalahan) dalam *setting* kebudayaan Islam di tengah kehidupan masyarakat modern yang penuh tantangan, kekerasan, dan krisis ruhaniah.
- c. Mengembangkan seni dan budaya Islami yang dapat menghidupkan fitrah kemanusiaan yang indah, halus, dan utama sehingga terbentuk peradaban kaum muslimin yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

## **8. Kesehatan dan Kualitas Hidup**

- a. Meningkatkan mutu pelayanan medik dan lembaga pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan, dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak di lingkungan amal usaha Majelis Pembina Kesehatan Muhammadiyah dan Aisyiyah dengan disertai berbagai pembenahan internal yang signifikan (menentukan) baik yang menyangkut manajemen umum, pengelolaan keuangan, pengadaan fasilitas, peningkatan kesejahteraan, dan pembenahan lainnya sehingga lembaga-lembaga pelayanan kesehatan milik Muhammadiyah itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- b. Mengembangkan pendidikan tenaga kesehatan baik jumlah maupun mutu sesuai kebutuhan dalam sistem perencanaan yang menyeluruh.
- c. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) dan pembinaan kesehatan umat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
- d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan pengelola di seluruh jajaran institusi pelayanan kesehatan yang berada dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah.

- e. Melaksanakan kajian-kajian tentang masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan aktualisasi hukum Islam yang penyelenggaraannya melibatkan Majelis Tarjih.
  - f. Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan untuk kesehatan masyarakat seperti penanggulangan HIV/AIDS, bahaya merokok, pemberantasan kecanduan Miras (minuman keras) dan Narkoba (narkotik dan obat-obat berbahaya), peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan sebagainya yang pelaksanaannya dapat bekerjasama secara terpadu dengan Majelis Tabligh dan Aisyiyah.
- 9. Pengembangan Masyarakat**
- a. Meningkatkan usaha-usaha pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dhu'afa, mustadh'afin, dan kelompok-kelompok sosial yang membutuhkan penyantunan dan advokasi baik di perkotaan dan pedesaan dari berbagai segmen sosial seperti buruh, petani, nelayan, suku terasing, transmigran, mereka yang cacat fisik dan cacat mental-sosial, anak-anak miskin dan yatim, kaum jompo/lansia, anak-anak jalanan/terlantar, dan kelompok-kelompok sosial marginal dengan program-program yang konkret (*da'wah bilisan al hal*).
  - b. Mengembangkan program-program unggulan Bina Masyarakat Sejahtera (*Qoryah Thoyyibah*), Balai Pendidikan Keterampilan (BPKM), Balai Latihan Keterampilan Anak Asuh (BLKA), Bantuan Penanggulangan Bencana Alam, Penyantunan lansia, Rumah Bina Anak Jalanan, Pondok Rehabilitasi Narkoba, dan program-program lainnya yang dapat dikembangkan baik di pedesaan maupun di perkotaan.
  - c. Melaksanakan pelatihan-pelatihan Motivator untuk Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Kesajahteraan Sosial di berbagai tingkatan.
- 10. Ekonomi dan Kewiraswastaan**
- a. Mewujudkan sistem JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) sebagai revitalisasi gerakan da'wah secara menyeluruh disertai dengan ketentuan: Untuk itu ditetapkan:
    - (1) Buku "Paradigma Baru Muhammadiyah Revitalisasi Gerakan Da'wah dengan Sistem JAMIAH" sebagai acuan program lebih lanjut.
    - (2) Proram KATAM ditetapkan sebagai program dasar bagi perwujudan sistem JAMIAH.
    - (3) Membangun infrastruktur pendukung JAMIAH melalui antara lain infrastruktur komunikasi dan infrastruktur distribusi (program MARKAZ).
  - b. Mengembangkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan keislaman seperti mengenai etos kerja, etos kewiraswastaan, etika bisnis, etika manajemen, masalah monopoli-eligopoli-kartel, keuangan dan permodalan, teori ekonomi Islam, etika profesi, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aktual yang terjadi dalam dunia ekonomi.
  - c. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi pengembangan sumberdaya manusia dalam aspek ekonomi, pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan masyarakat, pengembangan Bank Syari'ah Muhammadiyah, pengembangan

kewirausahaan dan usaha kecil, pengembangan koperasi, dan pengembangan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang benar-benar konkret dan produktif, seperti: KATAM, BMT, LKM, dll.

- d. Intensifikasi pusat data ekonomi dan pengusaha Muhammadiyah yang dapat mendukung pengembangan program-program ekonomi.
- e. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program ekonomi dan kewiraswastaan di lingkungan Muhammadiyah.
- f. Mengembangkan pelatihan-pelatihan dan pilot proyek pengembangan ekonomi kecil dan menengah baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga luar sesuai dengan perencanaan program ekonomi dan kewiraswastaan Muhammadiyah.
- g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi Bisnis dan Kewiraswastaan di bawah Majelis Ekonomi.

#### 11. Pengembangan Peran Politik

- a. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang tidak bergerak dalam dunia politik-praktis (*real politics*) seperti partai politik dapat mengembangkan fungsi sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) yang efektif melalui berbagai saluran/media untuk memainkan peranan politik secara aktif dan strategis sesuai dengan prinsip Da'wah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara, sehingga tidak menarik diri dan cenderung alergi terhadap politik yang pada akhirnya proses dan sistem kehidupan politik ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain yang dimungkinkan tidak sejalan dengan kepentingan umat dan kemaslahatan bangsa.
- b. Melaksanakan kajian-kajian yang intensif dan sistematis mengenai politik dan masalah-masalah yang aktual dan strategis sebagai masukan untuk mengantisipasi dan pengambilan sikap/kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dan negara.
- c. Menyusun konsep Etika Politik Muslim sebagai bahan pedoman bagi para politisi muslim khususnya politisi Muhammadiyah dalam memainkan peranan di kancah politik sebagai wujud melaksanakan misi Islam dalam kehidupan politik kenegaraan secara bermoral/berkeadaban dan membawa cita-cita luhur agama yang pelaksanaannya dapat bekerjasama antara Lembaga Hikmah dengan Majelis Tarjih.
- d. Melaksanakan Pendidikan Politik yang intensif dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan warga Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang pelaksanaannya bekerjasama antara Lembaga Hikmah dengan Majelis/Badan Pendidikan Kader Muhammadiyah.
- e. Memasyarakatkan pendidikan demokrasi untuk membentuk budaya politik demokratik di kalangan elit dan massa sebagai bagian penting dari reformasi yang mengarah pada demokratisasi yang tersistem dan berkeadaban.
- f. Mendirikan dan melakukan lembaga advokasi terhadap kasus-kasus yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan kekerasan politik.
- g. Meningkatkan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik



sebagai media komunikasi politik yang terbuka dalam mengartikulasikan aspirasi politik Muhammadiyah, umat Islam, dan masyarakat luas yang mengarah pada penciptaan kondisi politik yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan hajat hidup publik.

- h. Melakukan usaha-usaha yang berarti untuk terciptanya Kesatuan Politik Umat Islam dalam kerangka Ukhuwah Islamiyah dan terbentuknya kekuatan nasional Islam Politik.
- i. Menyelenggarakan forum ukhuwah dan silaturahmi yang efektif untuk menghimpun kekuatan politisi Muhammadiyah dalam mengemban misi Persyarikatan di lapangan politik.
- j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju terbentuknya Masyarakat Madani (*civil society*) sebagai basis yang kokoh menuju Indonesia Baru yang berkedaulatan rakyat dan terjadinya reposisi dan penyeimbangan baru dalam hubungan rakyat dengan negara.

## 12. Peningkatan Peran Perempuan dan Keluarga

- a. Memasyarakatkan nilai-nilai Islam dan misi perjuangan Muhammadiyah secara intensif di kalangan keluarga-keluarga Muhammadiyah melalui berbagai langkah pendidikan keluarga seperti pengajian, kursus, penuturan cerita anak-anak, pembinaan langsung oleh orangtua, penciptaan keteladanan (*uswah hasanah*), pelibatan dalam aktivitas keislaman dan aktivitas organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah, dan langkah-langkah lain yang efektif sehingga keluarga menjadi wahana kaderisasi dari gerakan Muhammadiyah.
- b. Membuat pilot-pilot proyek Keluarga Sakinah di berbagai lingkungan Cabang/Ranting Muhammadiyah sebagai perwujudan program Keluarga Sakinah secara nyata dan terukur, selain upaya-upaya lain yang bersifat memasyarakatkan di kalangan masyarakat luas untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang pelaksanaannya terkoordinasi dengan program Keluarga Sakinah yang dikelola Aisyiyah.
- c. Menyusun dan memasyarakatkan paket-paket praktis mengenai Keluarga Sakinah dalam berbagai aspeknya sesuai nilai-nilai Islam yang dikemas dengan baik dan dapat menjadi rujukan publik.
- d. Pembinaan keluarga-keluarga dhu'afa, mu'allaf, dan keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan santunan sosial-ekonomi dan nilai-nilai keislaman, sehingga dapat mencegah proses pemurtadan dan sekaligus membentuk Keluarga Sakinah di lapisan masyarakat bawah/awam melalui pembinaan langsung (hubungan-hubungan ketetanggaan dan sosial) dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Islam.
- e. Pemasyarakatkan pencegahan dini terhadap bahaya-bahaya Miras (minuman keras) dan Narkoba (narkotik dan obat-obat berbahaya), demoralisasi (kemerosotan akhlaq), perzinahan akibat pergaulan dan hubungan seks bebas, kriminalitas, dan bentuk-bentuk penyakit moral dan sosial lainnya melalui berbagai penyuluhan langsung dan penyebaran leaflet, booklet, brosur, buku, dan publikasi media cetak dan elektronika secara meluas.
- f. Pemasyarakatkan nilai-nilai Ajaran Islam melalui berbagai sarana/media mengenai perlakuan dan santunan yang baik sesuai dalam pola

hubungan suami dan istri, orangtua dan anak-anak, antar anak-anak, kebaikan anak terhadap orangtua, perlakuan terhadap orangtua lanjut usia, perlakuan terhadap pramuwisma/pembantu rumah tangga, dan hubungan-hubungan harmonis lainnya dan tiadanya kekerasan serta penindasan (hubungan yang tidak adil dan tidak benar) dalam seluruh anggota keluarga menuju pembentukan Keluarga Sakinah.

- g. Pendidikan keluarga yang mengarah pada peningkatan penghargaan dan penghormatan terhadap harkat-martabat dan hak-hak kaum perempuan yang didasarkan pada prinsip keadilan (*al 'adalah*), kesetaraan (*al musawah*), harmoni/keseimbangan (*tawazun*), kemuliaan dan kehormatan, kasih sayang (*tarahum*), toleransi (*tasamuh*), dan nilai-nilai akhlaq al karimah dalam satu kesatuan hidup untuk tegaknya Keluarga Sakinah yang membawa *rahmatan lil-'alamin*.

### 13. Peningkatan Kualitas Generasi Muda

- a. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas generasi muda melalui berbagai program pengembangan bakat, minat, kepribadian, pemikiran, keahlian, dan kreativitas yang pelaksanaannya terpadu dalam kegiatan organisasi otonom Angkatan Muda Muhammadiyah, lembaga pendidikan dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintah.
- b. Mengembangkan program balai pelatihan kerja, kewiraswastaan, dan pengembangan masyarakat untuk ikut-serta memecahkan masalah pengangguran dan pemenuhan lapangan pekerjaan di kalangan generasi muda baik yang dikembangkan oleh Majelis/Badan/ Lembaga/ Organisasi Otonom terkait maupun kerjasama dengan berbagai pihak di luar Persyarikatan.
- c. Mengembangkan usaha-usaha pembinaan dan resosialisasi bagi kalangan generasi muda yang menghadapi masalah-masalah mental dan sosial baik preventif (pencegahan) maupun kuratif (tindakan perbaikan) melalui Majelis/Badan/ Lembaga/ Organisasi Otonom dan pihak terkait

### 14. Pembinaan Supremasi Hukum dan Penegakkan Hak Asasi Manusia

- a. Mendukung dan mengusahakan berbagai upaya untuk penegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai bagian penting dari perwujudan reformasi melalui berbagai program langsung maupun tidak langsung termasuk dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang berkenaan dengan pelanggaran HAM (hak asasi manusia), kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya sehingga tercipta budaya hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Mendirikan dan melakukan lembaga advokasi hukum terhadap kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat bawah dan memerlukan perlindungan hukum.
- c. Memasyarakatkan budaya taat hukum melalui sosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk tegaknya supremasi dan budaya hukum.

### 15. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kelautan

- a. Memasyarakatkan gerakan hidup sehat dan sadar lingkungan

sebagaimana pesan luhur ajaran Islam bahwa kebersihan bagian dari iman dan hendaknya memakmurkan bumi serta tidak melakukan *fasad* (perusakan) terhadap alam, yang dilakukan melalui berbagai upaya baik langsung maupun melalui media massa cetak dan elektronik.

- b. Melaksanakan dan mengambil peranan aktif dalam gerakan-gerakan dan pengembangan program/kegiatan pelestarian lingkungan hidup baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pemerintah dan LSM (Lembaga Pengembangan Masyarakat) yang bergerak dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup maupun dalam melakukan rehabilitasi dan konservasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan.
- d. Mendorong dan ikutserta dalam mengawasi tindakan-tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merusak dan mengancam kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam di bumi Indonesia.

#### 16. Pengelolaan Wakaf dan Harta Benda

- a. Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, dan Wilayah dalam suatu koordinasi Pimpinan Pusat, melaksanakan pendataan kembali (Her-Inventarisasi) dan sertifikasi seluruh tanah milik Persyarikatan baik tanah wakaf maupun non-wakaf secara sistematis sesuai dengan sistem “Estafet” dan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan, pembinaan, dan pelatihan mengenai sistem inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf dan non-wakaf milik Persyarikatan secara terprogram dan terkoordinasi.
- c. Menyusun data base dan “peta tanah” serta harta-benda milik Persyarikatan di setiap tingkatan pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan terkoordinasi dengan baik.
- d. Menyusun konsep dan pelaksanaan mekanisme distribusi dan pemanfaatan tanah dan aset kehartaabendaan milik Persyarikatan secara terkoordinasi.

#### Bagian Kelima

### PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM

Program Muhammadiyah Periode 2000-2005 merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-44 yang harus menjadi arah dan pijakan yang mengikat seluruh kelembagaan, pimpinan, dan warga Persyarikatan dalam menentukan kebijakan dan kegiatan selama lima tahun sebagai parameter gerakan Muhammadiyah pada periode tersebut. Karena itu, untuk tercapainya tujuan, sasaran dan prioritas, serta pelaksanaan program Muhammadiyah maka berlaku pedoman pelaksanaan program persyarikatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 diberi amanat oleh Muktamar ke-44 sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab secara umum untuk memimpinkan pelaksanaan program ini dengan mengerahkan seluruh potensi

Persyarikatan sehingga program terlaksana dan mencapai tujuannya.

2. Pimpinan Persyarikatan di seluruh tingkatan (Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting) maupun Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha di seluruh lingkungan di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban mensosialisasikan dan mensukseskan program Muhammadiyah ini di lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing sehingga merupakan amanat nasional yang menyeluruh dalam kesatuan gerakan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Muhammadiyah maupun Pimpinan Majelis, Badan, Lembaga, dan Amal Usaha dalam menjabarkan program melalui Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, maupun melalui Rapat Kerja Pimpinan dan Rakat Kerja Majelis/Badan/Lembaga/Amal Usaha di berbagai tingkatan hendaknya lebih memfokuskan dan mengoperasionalkan program secara lebih efisien, efektif, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan potensi yang dimiliki dan harus dikerahkan untuk kesuksesan pelaksanaan program Muhammadiyah.
4. Pimpinan Wilayah hendaknya makin mengembangkan inisiatif dan kinerja yang optimal untuk menggerakkan pelaksanaan program di tingkat Daerah, Cabang, dan Ranting; yang diikuti dengan pimpinan di bawahnya untuk mensukseskan pelaksanaan program Persyarikatan sehingga benar-benar berhasil mencapai tujuan.
5. Pimpinan Majelis, Badan, Lembaga, Organisasi Otonom dan badan-badan pembantu Persyarikatan lainnya sebagai Badan Pembantu Pimpinan Pusat dalam menjabarkan program-program Persyarikatan melalui Rapat Kerja masing-masing hendaknya lebih memusatkan pada operasionalisasi program secara terfokus sesuai dengan bidang masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, keterpaduan, ketersediaan dana dan faktor-faktor pendukung, dan menekankan prioritas sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Rapat Kerja-Rapat Kerja Majelis, Badan, Lembaga, dan badan-badan pembantu Persyarikatan di tingkat Pusat hendaknya dalam menjabarkan dan mengoperasionalkan program Persyarikatan sedapat mungkin menghindari penggelembungan (memperlebar, memperbanyak, memperluas) sehingga menjadi daftar keinginan yang ideal tetapi tidak dapat terlaksana, dan dalam Rapat Kerja tersebut hendaknya dipakai asas penghematan dari acara-acara pendukung seperti seminar dan ceramah yang tidak terlalu mendukung dan dapat memungkinkan pada penggelembungan program tersebut.
6. Seluruh Pimpinan Persyarikatan baik secara horizontal (dalam hubungan dengan organisasi otonom, Majelis, Badan, Lembaga di tingkat masing-masing) maupun vertikal (dalam hubungan Pimpinan Persyarikatan dengan tingkatan di bawahnya) hendaknya meningkatkan koordinasi dan evaluasi yang efektif dan efisien untuk mensukseskan pelaksanaan program dengan menghindari sejauh mungkin tumpang-tindih pelaksanaan program yang cenderung pada pemborosan dan tidak terfokusnya pencapaian sasaran program Persyarikatan.
7. Segenap Pimpinan dan warga Persyarikatan hendaknya memiliki itikad, etos kerja, kemauan berkorban, dan kesungguhan yang optimal dengan mengerahkan segala potensi dan usaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan program Muhammadiyah yang disertai dengan do'a dan *taqarrub* kepada Allah Subhanahu Wata'ala agar gerakan Muhammadiyah benar-benar menjadi rahmatan lil' alamin bagi kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan di muka bumi ini dalam karunia, pertolongan, dan keridhaan-Nya.

Bagian Keenam  
**PENUTUP**

Program Muhammadiyah periode 2000-2005 sebagai langkah yang harus dilaksanakan dan merupakan bentuk operasional dari pelaksanaan visi, misi, dan usaha gerakan Muhammadiyah merupakan komitmen dan itikat sepenuh hati seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah yang menuntut kesungguhan, kekuatan tekad, etos kerja, kerjasama, kekompakan manajemen yang handal, dan pengerahan segenap potensi serta faktor-faktor pendukung (fasilitas, dana, sarana dan prasarana) yang optimal sehingga dapat berhasil dalam mencapai tujuan.

Dalam menghadapi era baru abad ke-21 dan dinamika kehidupan nasional yang sarat tantangan dan permasalahan yang demikian kompleks, maka keberhasilan dalam melaksanakan program amanat Muktamar ke-44 ini merupakan wujud amaliah yang strategis dan nyata dari gerakan Muhammadiyah sebagai pilar kekuatan umat dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di kancah dunia yang bergerak dinamik itu.

Insyallah dengan kekuatan hati, ketulusan dan kesungguhan, kemampuan dan tanggungjawab, kemauan untuk berkorban dengan jiwa jihad di jalan Allah, serta keteladanan seluruh pimpinan dan warga persyarikatan dalam mewujudkan program yang demikian strategis itu, Muhammadiyah dapat memberikan sumbangan berharga bagi *'Izzu al Islam wa al muslimin* dan terbentuknya *Baldatun thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* di Bumi Pertiwi yang tercinta ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa melimpahkan kekuatan, pertolongan taufiq, dan hidayah-Nya dalam mengemban misi mulia itu. *Nashrun minallah wa fathun qarib*.

## **ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH**

### **BAB I**

#### **NAMA, IDENTITAS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Persyarikatan ini bernama MUHAMMADIYAH.
- (2) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, berdasar Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (3) Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah, berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA**

##### **Pasal 2**

##### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

##### **Pasal 3**

##### **U s a h a**

Untuk mencapai maksud dan tujuan pada pasal 2, Persyarikatan melaksanakan da'wah dan tajdid dengan usaha sebagai berikut:

- (1) Menyebarluaskan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh.
- (2) Mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
- (3) Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlaq.
- (4) Memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam.
- (5) Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah.
- (6) Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam.
- (7) Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- (8) Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
- (9) Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat.
- (10) Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- (11) Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.
- (12) Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.
- (13) Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan

dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera.

- (14) Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah.
- (15) Menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat.
- (16) Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta peran-serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (17) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.

### **BAB III KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

##### **Keanggotaan**

- (1) Anggota Persyarikatan ialah warganegara Indonesia, beragama Islam, menyetujui, dan bersedia melaksanakan maksud dan tujuan Persyarikatan.
- (2) Anggota mempunyai hak suara, memilih, dan dipilih.
- (3) Peraturan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 5**

##### *Susunan Organisasi*

Persyarikatan bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkatan sebagai berikut:

- (1) RANTING, ialah kesatuan anggota dalam satu tempat.
- (2) CABANG, ialah kesatuan Ranting-Ranting dalam suatu tempat.
- (3) DAERAH, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam Kabupaten/Kota.
- (4) WILAYAH, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Propinsi.

#### **Pasal 6**

##### **Penetapan Organisasi**

- (1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya diputuskan oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

### **BAB IV PIMPINAN**

#### **Pasal 7**

##### **Pimpinan Pusat**

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara keseluruhan.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tigabelas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (3) Ketua Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.



- (4) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir.
- (5) Pimpinan Pusat mewakili Persyarikatan, untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan Pimpinan Pusat diwakili Ketua atau salah seorang Wakil Ketua bersama-sama salah seorang Sekretaris.

#### **Pasal 8**

##### **Pimpinan Wilayah**

- (1) Pimpinan Wilayah memimpin Persyarikatan dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
- (4) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 9**

##### **Pimpinan Daerah**

- (1) Pimpinan Daerah memimpin Persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

#### **Pasal 10**

##### **Pimpinan Cabang**

- (1) Pimpinan Cabang memimpin Persyarikatan dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
- (3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

#### **Pasal 11**

##### **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting memimpin Persyarikatan dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.

- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

#### **Pasal 12**

##### **Pemilihan Pimpinan**

- (1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Persyarikatan.
- (2) Cara pemilihan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 13**

##### **Masa Jabatan**

- (1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
- (2) Ketua Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

### **BAB V**

#### **PEMBANTU PIMPINAN**

#### **Pasal 14**

##### **Unsur Pembantu Pimpinan**

Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis, Lembaga, dan Badan.

#### **Pasal 15**

##### **Majelis**

- (1) Majelis adalah unsur Pembantu Pimpinan yang disertai tugas sebagai penyelenggara usaha Persyarikatan.
- (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 16**

##### **Lembaga**

- (1) Lembaga adalah unsur Pembantu Pimpinan yang disertai tugas dalam bidang tertentu.
- (2) Lembaga dibentuk hanya oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.

#### **Pasal 17**

##### **Badan**

- (1) Badan adalah unsur Pembantu Pimpinan untuk membantu penyelenggaraan administrasi dan manajemen Persyarikatan.
- (2) Badan dibentuk oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
- (3) Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk Badan tertentu dengan persetujuan Pimpinan Wilayah.

## **BAB VI ORGANISASI OTONOM**

### **Pasal 18**

#### **Ketentuan Umum**

- (1) Persyarikatan dapat membentuk organisasi otonom yang sesuai dengan asas, maksud dan tujuan Persyarikatan.
- (2) Anggaran Dasar organisasi otonom disahkan oleh Pimpinan Pusat Persyarikatan.
- (3) Organisasi otonom tersebut pada ayat (1) di bawah pembinaan dan bimbingan Persyarikatan.
- (4) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir.

### **Pasal 19**

#### **Klasifikasi Organisasi Otonom**

- (1) Organisasi otonom dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
- (2) Ketentuan mengenai masing-masing kategori diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII PERMUSYAWARATAN**

### **Pasal 20**

#### **Muktamar**

- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan, diadakan atas undangan Pimpinan Pusat, yang anggotanya terdiri atas :
  - a. Anggota Pimpinan Pusat.
  - b. Ketua Pimpinan Wilayah.
  - c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah.
  - d. Ketua Pimpinan Daerah.
  - e. Wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh Rapat Kerja Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang-cabang atas dasar perimbangan jumlah Cabang dalam tiap-tiap Daerah.
  - f. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Pusat.
- (2) Muktamar diadakan sekali dalam lima tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat, atas keputusan Tanwir, dapat diadakan Muktamar Luar Biasa.

### **Pasal 21**

#### **Tanwir**

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan tertinggi dalam Persyarikatan di bawah Muktamar, diadakan atas undangan Pimpinan Pusat, yang anggotanya terdiri atas :
  - a. Anggota Pimpinan Pusat.
  - b. Ketua Pimpinan Wilayah.
  - c. Wakil-wakil Wilayah.
  - d. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Pusat.
- (2) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.

### **Pasal 22**

#### **Musyawaharah Wilayah**

- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Wilayah, diadakan oleh Pimpinan Wilayah, yang anggotanya terdiri atas :
  - a. Anggota Pimpinan Wilayah.

- b. Ketua Pimpinan Daerah.
  - c. Anggota Pimpinan Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
  - d. Ketua Pimpinan Cabang.
  - e. Wakil-wakil Cabang yang dipilih oleh Rapat Kerja Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap-tiap Cabang.
  - f. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah diadakan sekali dalam lima tahun.

#### **Pasal 23**

##### **Musyawarah Daerah**

- (1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Daerah, diadakan oleh Pimpinan Daerah, yang anggotanya terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Daerah.
  - b. Ketua Pimpinan Cabang.
  - c. Anggota Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
  - d. Ketua Pimpinan Ranting.
  - e. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Daerah,
- (2) Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam lima tahun

#### **Pasal 24**

##### **Musyawarah Cabang**

- (1) Musyawarah Cabang ialah Permusyawaratan Persyarikatan dalam Cabang, diadakan oleh Pimpinan Cabang, yang anggotanya terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Cabang.
  - b. Ketua Pimpinan Ranting.
  - c. Anggota Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
  - d. Wakil Pimpinan organisasi otonom tingkat Cabang,
- (2) Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam lima tahun.

#### **Pasal 25**

##### **Musyawarah Ranting**

- (1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Persyarikatan dalam Ranting, diadakan oleh Pimpinan Ranting, yang anggotanya terdiri atas segenap anggota Persyarikatan dalam Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting diadakan sekali dalam lima tahun.

#### **Pasal 26**

##### **Keabsahan Musyawarah**

Musyawarah tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 25 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh duapertiga anggota-anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing.

#### **Pasal 27**

##### **Keputusan**

Keputusan-keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 25, diambil dengan suara terbanyak.

#### **Pasal 28**

##### **Peraturan Permusyawaratan**

Peraturan Permusyawaratan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 29**

### **Rapat Kerja**

- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut jalannya organisasi.
- (2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Majelis/ Lembaga/ Badan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, masing-masing diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam lima tahun, sedangkan Rapat Kerja Pimpinan Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
- (4) Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 30**

Keuangan Persyarikatan diperoleh dari :

- (1) Uang Pangkal, Iuran dan Bantuan.
- (2) Hasil amal usaha dan hak milik Persyarikatan.
- (3) Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat dan Hibah.
- (4) Badan Usaha Milik Muhammadiyah.
- (5) Sumber-sumber lain yang halal.

## **BAB IX**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 31**

- (1) Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat, dengan tidak menyalahi anggaran dasar, dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan, Pimpinan Pusat dapat mengadakan perubahan dalam Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai diadakan Tanwir berikutnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

##### **Pembubaran Persyarikatan**

- (1) Pembubaran Persyarikatan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Muktamar yang diundang untuk membicarakan pembubaran, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar, serta keputusannya diambil oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
- (2) Sesudah Persyarikatan dinyatakan bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik mashalihul-Islamiah, yang ditentukan oleh Muktamar yang memutuskan pembubaran itu.

**Pasal 33**

**Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Mukhtamar.
- (2) Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtamar.
- (3) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Tanwir.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtamar yang hadir.

**Pasal 34**

**Penutup**

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, telah disahkan oleh Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta pada tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1421 H bertepatan tanggal 11 Juli 2000 M, dan mulai berlaku sejak disahkan.

Jakarta, 9 Rabi'ulakhir 1421 H  
11 Juli 2000 M

PIMPINAN SIDANG

**Prof. Dr. H. A. Syafi'i Ma'arif**